

JAKARTA, 20 JUNI 2024

MAGANG

DI PENGADILAN FEDERAL AUSTRALIA
Tahun 2012 - 2014

SEJAK
30 TAHUN
YANG LALU
FCA SUDAH TIDAK
MENGUNAKAN
BUKU REGISTER

*HAKIM PASIF
MENJADI
HAKIM AKTIF*

MELIHAT
TATA
KELOLA
PERKARA DI RUANG HAKIM FCA

IMAGINASI!

HAL PENTING UNTUK
REKAYASA PROSES KERJA
PENGADILAN



Kata Pengantar.

Buku ini merupakan kompilasi laporan harian Kegiatan Magang Mahkamah Agung RI-Pengadilan Federal Australia tahun 2012 dan 2014 yang telah dipublikasikan di situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung. Publikasi ulang artikel tersebut dalam format cetak (cetak elektronik), untuk memudahkan siapapun membaca kembali “kisah” magang tersebut. Dilihat dari rata-rata jumlah hits di atas 2000, artikel kegiatan magang menarik untuk dibaca. Selain itu, publikasi ulang dilakukan dalam rangka memperingati 20 tahun kerjasama yudisial Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Federal Australia.

Program Magang merupakan salah satu kerjasama antara Mahkamah Agung dan Pengadilan Federal Australia yang paling berkesan dan memberikan dampak luas bagi proses pembaruan peradilan di Mahkamah Agung, khususnya di bidang modernisasi manajemen perkara. Pengadilan Federal Australia telah menjadi host yang baik dalam memfasilitasi program magang karena pemilihan fokus/objek magang sesuai dengan kebutuhan program modernisasi manajemen perkara Mahkamah Agung. Program ini merupakan cara efektif untuk transfer pengetahuan dan pengalaman bagaimana Pengadilan Federal Australia melakukan pembaruan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya

Untuk mengikuti program magang ini, Mahkamah Agung menugaskan beberapa hakim yustisial yang dinilai dapat berperan menjadi “agen pembaruan”. Pertama kali, program magang dilakukan pada tahun 2012 yang terbagi pada dua sesi. Sesi pertama, dilaksanakan pada bulan Maret 2012 dan sesi kedua dilaksanakan pada bulan Oktober 2012. Jeda waktu diantara dua periode tersebut digunakan oleh peserta magang untuk menjalankan program quick wins yang dicanangkan pada akhir magang. Hakim Yustisial yang ditugaskan untuk mengikuti program magang tahun 2012 adalah Bambang Heri Mulyono (Peradilan Umum), Asep

Nursobah (Peradilan Agama), dan Subur MS (Peradilan TUN). Pada sesi magang bulan Oktober 2012, MA menugaskan 2 orang hakim yustisial sebagai pemantau yaitu Lukas Prakoso dan Budi Prasetyo

Program magang kembali dilakukan pada September- Oktober 2014. Hakim Yustisial yang ditugaskan untuk mengikuti program ini adalah Asep Nursobah (Peradilan Agama), Liliek Prisbawono Adi (Peradilan Umum), Frensita Kesuma Twinsani (Peradilan Umum), dan Sumartanto (Peradilan TUN). Selama mengikuti program, peserta magang diposisikan sebagai “pegawai sungguhan” dari Pengadilan Federal Australia. Kami diberikan ruangan kerja tersendiri dengan fasilitas yang lengkap. Kami berkantor mulai pukul 08.30 hingga pukul 17.00. Peserta magang dilibatkan dalam beberapa aktivitas harian penanganan perkara. Antara lain, diikutsertakan pada persidangan, baik “duduk” sebagai hakim anggota, maupun “panitera pengganti”. Dalam kedua peran tersebut, peserta magang hanya mengamati jalannya persidangan digelar dengan hakim tunggal. Hal menarik terjadi pada kegiatan magang tahun 2014. Ketika itu, Pengadilan Federal Australia baru saja mengimplementasikan kebijakan pelayanan pengadilan berbasis elektronik. Kami merasakan perubahan cara kerja baru dari manual menjadi elektronik. Kami pun menyaksikan langsung bagaimana Pengadilan Federal Australia melakukan 8 (delapan) langkah manajemen perubahan. Beberapa kebijakan Mahkamah Agung yang terinspirasi dari pengalaman terbaik (best practice) penanganan perkara pada Pengadilan Federal Australia adalah simplifikasi template putusan, sistem pengiriman berkas elektronik /e-lodgement, penerapan quality control, dan lembar perbaikan putusan (corrigendum).

Semoga kegiatan magang dapat dilanjutkan kembali di periode mendatang



Jakarta, 20 Juni 2024
Penyusun,

Asep Nursobah
Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA

Daftar isi

Kata Pengantar	III
Daftar isi	IV
MA dan FCA Selenggarakan Kerjasama Program Magang Manajemen	06
Justice Bernard Murphi: Template dan Format Putusan Membantu Percepatan Penyelesaian Perkara	08
e-Lodgment FCA Serupa dengan Fitur Komunikasi Data Direktori Putusan	10
Melihat Ruang Sidang FCA dari Dekat: HighTech dan Humanis	11
Mempermudah Kerja Pengadilan, Semua Dokumen Terstandarkan	12
Pendekatan Kreatif Mengelola Arsip	13
Atasi Tunggakan Perkara, FCA Terapkan Individual Docket System	14
Memastikan Perkara Selesai Tepat Waktu, FCA Lakukan Realokasi Perkara	15
Dua Jam Bersama Pak Murphy : Dari Class Action, Penyusunan Putusan hingga	16
Ulang Tahun Pak Bambang	
Semua Informasi yang Dibutuhkan Hakim, Tersedia di Perpustakaan FCA	18
Putusan Sederhana Ala FCA	19
Imaginasi! Hal Penting untuk Rekayasa Proses Kerja Pengadilan	22
Class Action dan Program Magang Menjadi Topik dalam Pertemuan MA-FCA	23
Warwick Soden : MA-RI, Best Practice Pengadilan di Dunia Yang Berhasil Melakukan Pembaruan	24
Ketua MA Tandatangani Lampiran MoU dengan FCA dan FCoA	25
FCA : Pengaduan Terhadap Isi Putusan Bukan Ranah Judicial Complaint	26

Daftar isi

Inilah Cara FCA Mendekatkan Pengadilan Ke Publik	27
Melbourne Magistrates' Court: Bukan Pengadilan Biasa	29
Demi Keamanan, Pengadilan Terapkan SOP Tanpa Kompromi	31
Demi Kualitas Pelayanan, Persidangan Pengadilan dibagi Dua Sesi	32
Membuat Resume Berkas: Solusi Pengurangan Tunggakan Perkara ala Supreme Court of Victoria	33
Tata Kelola Pengadilan Federal Australia	34
Magistrate Court of Melbourne, Pengadilan Paling Sibuk di Negara Bagian Victoria	38
Sisi Lain Mahkamah Agung Victoria: Penyelesaian Tunggakan Perkara dan Penguatan Status Dokumen Elektronik Putusan	38
Hari ini, Program Magang MA RI di FCA Dimulai	42
Gedung FCA Dibangun Di atas Filosofi Access to Justice	44
Pilihannya : Semua Elektronik atau Semua Kertas (?)	46
Inilah Strategi FCA dalam Menerapkan Electronic Court File	48
Maaf ...Berkas Anda Harus Disampaikan Secara Elektronik!	50
Melihat Cara Pengadilan Federal Australia Meralat Kesalahan Ketik Putusan	51
Pasca Implementasi ECF, FCA Tidak Lagi Mencetak dan Mengirim Putusan	52
Merasakan Menjadi "Pegawai" Pengadilan Federal Australia	53
Hakim Pasif menjadi Menjadi Hakim Aktif	55
Mengenal Berbagai Layanan Elektronik Pengadilan Federal Australia	56
Menerapkan e-Court File, FCA Tempuh 8 Langkah Management Perubahan	58
Sejak 30 Tahun Yang Lalu, FCA Sudah Tidak Menggunakan Buku Register	59
Melihat Tata Kelola Perkara di Ruang Hakim FCA	60
Strategi Manajemen Perubahan Menuju Pengajuan Berkas Elektronik di Federal Court of Australia	62
Standar Penamaan Putusan dan Klasifikasi Perkara pada Pengadilan Federal Australia	66
Electronic Court File Solusi Tantangan Jaman Modern Pro Lingkungan	68
Electronic Court File Mengurangi Beban Koreksi Putusan Di Mahkamah Agung	69

MA dan FCA Selenggarakan Kerjasama Program Magang Manajemen Perkara

MELBOURNE | 08 MEI 2012

Program Magang Mahkamah Agung (MA) di Federal Court of Australia (FCA) dimulai hari Senin, 7 Mei 2012, Pukul 10.00 waktu setempat. Program bertajuk Supreme Court of Indonesia Internship Program 2012 ini merupakan aktifitas yang dipayungi oleh MoU antara MA dan FCA yang difasilitasi oleh Indonesia Australia for Partnership Justice (IAPJ) dengan biaya AusAid. Peserta magang dari MA adalah Bambang Heri Mulyono (Hakim Yustisial MA dari lingkungan peradilan umum), Subur (Hakim Yustisial MA dari lingkungan peradilan TUN) dan Asep Nursobah (Hakim Yustisial MA dari lingkungan peradilan agama).

Program magang ini dibuka oleh Warwick Soden, Chief Executive Officer/Registrar FCA bertempat di Judge Conference Room, Law Court Building, Melbourne. Hadir dalam acara pembukaan tersebut, Justice Bromberg, Justice Murphy, Sia Lagos (Kepala Kepaniteraan FCA Negara Bagian Victoria), Angela Josan (Panitera untuk urusan banding), Louise Kenworthy (Direktur Pelayanan Peradilan), David Pridle (Direktur Operasional FCA), dan Andera Jarratt (Executive Officer). Selain itu, hadir pula Nicola Colbran, Direktur Program AIPJ.

Pada hari pertama program magang, para peserta diperkenalkan dengan lingkungan kerja FCA. Melalui agenda "welcome and Tour of The Court", Sia Lagos, kepala Kepaniteraan FCA untuk negara bagian Victoria, mengajak peserta magang untuk keliling ke ruang kepaniteraan, meja informasi, ruang sidang, dan ruang hakim. Sia Lagos pun mengajak peserta untuk mampir di "meja satu" Family Court of Australia yang berada di gedung yang sama.

Keamanan Pengadilan

"Memasuki gedung FCA seperti masuk ke bandara", demikian komentar salah seorang peserta magang. Pen-

gunjung pengadilan disambut dengan metal detector dan pemeriksaan sinar x untuk barang bawaan, seperti tas dan sejenisnya. Petugas tidak memberikan kompromi ketika alat memberi informasi adanya logam dan barang yang mencurigakan. Semuanya harus benar-benar steril, baru diperbolehkan masuk. Prosedur pemeriksaan tersebut diperlakukan juga kepada peserta magang. "Ini adalah prosedur tetap untuk memberikan perlindungan keamanan pengadilan", ujar petugas.

Sementara bagi karyawan, disediakan jalur khusus yang hanya bisa diakses dengan menggunakan kartu berteknologi pintar, RFID. Masih untuk alasan keamanan, publik hanya bisa mengakses ruang sidang dan ruang pendaftaran perkara. Publik tidak bisa "seenaknya" memasuki ruang staf dan pejabat peradilan. Bahkan, untuk hakim ruangnya dipisah sehingga jangankan publik, staf pun tidak bebas keluar-masuk ruangan tersebut.

Hal lain yang menarik dari gedung FCA selain tentu kesan modern yang kental adalah perhatian terhadap pencari keadilan yang berkebutuhan khusus. FCA menyediakan kursi roda, serta petunjuk ruangan yang bisa diakses publik selalu disertai tulisan braille. Selain itu, terdapat poster yang menginformasikan adanya jasa penerjemah, jika pencari keadilan tidak bisa berbahasa Inggris.

Mengatasi Tunggakan Perkara

Tunggakan perkara adalah persoalan utama yang hampir dihadapi oleh peradilan di dunia, termasuk FCA. Menurut Warwick Soden, CEO/Registrar FCA, dalam presentasi setelah acara "tour of the court", pembatasan perkara adalah cara yang efektif untuk mencegah terjadinya tunggakan perkara. Ia mengilustrasikan bahwa tidak semua perkara bisa diperiksa di tingkat High Court (Indonesia: Mahkamah Agung, red). High Court hanya memeriksa perkara yang sudah diizinkan melalui pemeriksaan

"leave to appeal" yang dilakukan oleh hakim tunggal. Warwick mengatakan bahwa Hakim tunggal ini tidak akan memberi izin pemeriksaan di tingkat High Court jika perkara tersebut bobotnya sehingga harus selesai di tingkat banding federal court atau pengadilan tertinggi di negara bagian (supreme court).

"Jika tidak ada mekanisme filter, maka hakim High Court yang hanya berjumlah 7 orang untuk menangani perkara nasional Australia tidak akan mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan", jelas Warwick.

Upaya lain untuk mencegah tunggakan perkara adalah diperkenalkannya hakim tunggal untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. "Tidak semua perkara diperiksa dengan tiga orang hakim (full court), banyak kasus yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal", Warwick menegaskan.

Selain pembatasan perkara dan hakim tunggal, proses mediasi memberikan sumbangan cukup signifikan dalam mencegah terjadinya tunggakan perkara. "Dari perkara yang diajukan 50% selesai dengan mediasi", ungkap Sia Lagos menjawab pertanyaan peserta magang.

Upaya pembaruan lainnya adalah penggunaan teknologi informasi. Menurut Warwick, teknologi informasi adalah instrumen utama dalam meningkatkan performance pengadilan. Oleh karena itu, dalam proses pembaruan penggunaan IT adalah mutlak. "sesuai dengan tuntutan publik, pengadilan kami sudah menuju e-court", ungkapnya.

Hal lain yang nampak dari digunakannya pendekatan dunia usaha dalam manajemen peradilan di FCA digunakannya nomenklatur Chief Executive Officer (CEO) bagi Panitera-nya. [asnoer]

ADOPSI MANAJEMEN DUNIA USAHA

FCA mulai melakukan pembaruan peradilan sejak tahun 90-an. Pembaruan peradilan yang dilakukan menggunakan pendekatan yang kreatif. "Kami menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh dunia usaha ketika mereka berkompetisi dan meningkatkan performancenya", ujar Warwick Soden kepada para peserta magang di sesi terakhir pada hari pertama.

Warwick menjelaskan beberapa kunci utama pembaruan peradilan di FCA. Pertama adalah fokus pada pelanggan. FCA menganalogikan pencari keadilan sebagai pemegang saham. Sehingga orientasi pelayanan pengadilan harus kepada kepentingan dan kepuasan pencari keadilan. "Karena berkat pajak mereka pengadilan bisa beroperasi," ungkap Warwick. Ia pun mengilustrasikan perusahaan telekomunikasi dunia, Motorola, yang bangkrut gara-gara layanannya tidak menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Untuk mengukur kepuasan pelanggan, dikatakan Warwick, FCA melakukan survey terhadap pengunjung mengenai kualitas pelayanan pengadilan. Selain itu FCA selalu memantau semua berita di media yang membicarakan pengadilan.

Untuk urusan media ini, FCA memiliki petugas yang khusus untuk menghadapi media. Petugas ini yang memastikan media tidak salah menyampaikan informasi seputar pengadilan.

Kedua, merubah proses manajemen perkara dengan pendekatan yang mereka sebut "individual docket system". Sistem docket ini memungkinkan pengadilan bisa memonitor kinerja individu. Terkait dengan kinerja individu ini, tiap semester, FCA secara internal memberikan laporan kinerja individu hakim secara nasional. Dalam laporan ini, disebutkan seorang hakim berada di level berapa dalam skala nasional. "Dengan sistem ini, yang bersangkutan akan terdorong berusaha untuk meningkatkan peringkatnya pada periode penilaian berikutnya", ungkap Warwick.

"Ketua Pengadilan untuk sementara tidak akan memberi tugas untuk mengadili di negara bagian lain terhadap hakim yang berkinerjanya rendah." jawab Warwick ketika ditanya mengenai sanksi terhadap hakim yang berkinerjanya rendah.

Ke tiga adalah mendekatkan pengadilan ke publik. Untuk pendekatan ini, FCA pernah menyelenggarakan lomba bertajuk "the art delivering justice". Lomba ini digelar di kalangan pelajar sehingga mereka mengenal pengadilan dari dekat. "lukisan yang terpampang di dinding gedung ini hasil dari lomba tersebut", ujar Warwick.



Kiri ke Kanan: Subur, Asep Nursobah, Nicola Colbran, Mia Hafsari, Bambang Heri Mulyono, dan Akhmad Cholil mengawali kegiatan Supreme Court of Indonesia Internship Program 2012, Senin (7/5) di Kepaniteraan Federal Court Negara Bagian Victoria, Australia.



SERIUS : Peserta magang membicarakan persoalan manajemen perkara yang menjadi fokus kegiatan yang akan berlangsung hingga 20 Mei mendatang

Justice Bernard Murphi: Template dan Format Putusan Membantu Percepatan Penyelesaian Perkara

Peserta Magang
membicarakan tentang
sistem administrasi peradilan
bersama Louise Kenworthy,
Director for Court Services
FCA, di hari kedua program,
hadir dalam pertemuan



MELBOURNE | 09 MEI 2012

Putusan merupakan mahkota pengadilan, oleh karena itu proses penyusunannya perlu mendapat perhatian. Template, format dan teknis penyusunannya sangat penting untuk dikuasai karena akan membantu percepatan penyelesaian perkara. Karena kurang menguasai hal tersebut, seorang hakim akan memerlukan waktu lama untuk menyusun sebuah putusan. Sehingga tidak jarang penyusunan putusan menjadi penyebab lambatnya penyelesaian perkara di pengadilan.

Demikian disampaikan oleh Justice Bernard Murphy, Hakim Federal Court Of Australia, menanggapi presentasi delegasi Indonesia yang berjudul "Overview of key initiatives and reform in Supreme Court of Indonesia". Presentasi yang disampaikan oleh Bambang Heri Mulyono dan Asep Nursobah tersebut menyinggung soal template putusan di Mahkamah Agung.

Menurut Hakim FCA yang ahli di bidang class action ini, putusan FCA sangat berbeda dengan format putusan MA. "Putusan kami tidak mengulang apa yang sudah ada di putusan pengadilan sebelumnya, sehingga putusan kami tidak sampai puluhan atau ratusan halaman", ungkap Justice Murphi. Karena format yang demikian dan juga tersedianya template, lanjut Justice Murphi, ia selalu berusaha memberikan salinan putusan pada saat putusan dibacakan.

Sementara Sia Lagos, Kepala Kepaniteraan FCA untuk negara bagian Victoria memberikan apresiasi terhadap capaian pembaruan peradilan yang telah dicapai dalam waktu yang sangat cepat. "Fokus pembaruan peradilan anda dan kami sama, namun pengadilan anda telah banyak berubah, padahal pembaruan peradilan baru dimulai tahun 2003" ungkapnya memberikan apresiasi.

Pemberian Remunerasi

Sesi kedua di hari kedua program, peserta nampak antusias. Hal ini karena topik pembicaraan mengenai persoalan yang lagi isu hangat di Indonesia, yaitu persoalan penggajian hakim. Warwick Soden yang menjadi nara sumber sesi ini membawakan materi proses rekrutmen dan sumber daya di FCA. Salah satu topiknya membahas sistem rekrutmen dan remunerasi hakim.

Warwick menjelaskan bahwa yang mengurus remunerasi pengadilan dan pejabat publik lainnya termasuk anggota parlemen adalah satu badan (tribunal) khusus (www.remtribunal.gov.au). Badan ini yang mengajukan usulan penggajian ke Parlemen. Parlemen berhak menolak dan menyetujui usulan tribunal tersebut. "Namun, parlemen jarang menolak pengajuan dari Tribunal ini", tegas CEO FCA ini.

Sementara untuk hakim ada komisi khusus yang khusus untuk "memperhatikan" gaji hakim. Komisi yang bernama Komite Justice ini akan mengajukan usulan kenaikan gaji setiap 12 bulan. Komite akan mengusulkan adanya kenaikan apabila terjadi kenaikan produktifitas dan meningkatnya indeks harga kebutuhan pangan.

Besaran gaji menurut Warwick menunjukkan pentingnya peran jabatan tersebut. "Hakim gajinya sangat besar dan kedudukan mereka sangat tinggi setara dengan parlemen, komisioner, dan pimpinan lembaga tinggi lainnya", papar Warwick. Gaji dan kedudukan hakim di Australia, menurut Warwick, tidak dibedakan karena

perbedaan senioritas, beban kerja, ataupun kewenangan pengadilan.

Dari daftar yang diperlihatkan Warwick, terlihat bahwa hakim FCA mendapatkan remunerasi sebanyak AUS \$ 391.000 per tahun ditambah dengan tunjangan kendaraan AUS \$ 25.000 pertahun. Namun menurut Warwick, pendapatannya sebagai hakim bisa jadi lebih kecil dari pendapatannya dalam profesi sebelumnya. Hal ini karena persyaratan untuk menjadi hakim di FCA harus berasal dari advokat yang telah berpengalaman praktek 5 tahun dan memiliki reputasi internasional dengan melewati seleksi yang ketat.

"Namun mereka bangga dengan perannya yang penting, dan tidak mempersoalkan besaran gajinya", ujar Warwick.

Sesi terakhir di hari kedua program magang, peserta diberikan wawasan mengenai sistem penganggaran di FCA. Direktur Pelayanan Peradilan, Louise Kenworthy, yang menjadi nara sumber sesi ini memaparkan mengenai proses alokasi, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran di FCA. Louis juga menjelaskan mengenai pengelolaan biaya perkara di FCA. Secara umum tidak terlalu banyak perbedaan sistem penganggaran antara FCA dan MA. (an)



e-Lodgment FCA Serupa dengan Fitur Komunikasi Data Direktori Putusan



Peserta Magang dari MA mendemonstrasikan aplikasi komunikasi data berkas kasasi, sistem informasi perkara, dan direktori putusan kepada Direktur Palayanan Peradilan FCA. Sistem yang MA miliki memiliki kemiripan dengan sistem FCA

MELBOURNE | 10 MEI 2012

Federal Court of Australia (FCA) membolehkan para pihak untuk mengajukan berkas perkara dengan berbagai cara: langsung mendatangi kepaniteraan, kirim melalui pos, faksimile, email, dan aplikasi komunikasi data yang disebut dengan e-lodgment. E-lodgment adalah fasilitas pengiriman dokumen melalui aplikasi yang disediakan bagi publik melalui website FCA, www.fedcourt.gov.au. E-Lodgment adalah sistem komunikasi data yang terakhir dikembangkan menggantikan sistem e-mail yang dinilai rentan terhadap infeksi virus. Sistem ini terintegrasi dengan case management system yang dimiliki FCA.

Sistem e-lodgment yang dimiliki FCA ini mirip dengan fitur komunikasi data pada Aplikasi Direktori Putusan (ADP). Bedanya e-lodgment digunakan oleh para pihak untuk mengirim gugatan ke pengadilan. Sedangkan ADP digunakan oleh pengadilan untuk mengirim file elektronik putusan sebagai kelengkapan kasasi dan peninjauan kembali.

e-lodgment diperkenalkan oleh FCA pada hari ketiga program magang oleh Manager Client Services, Lauren McComick dan Director of Court Services, Louis Kenworthy. Keduanya mengajak peserta magang ke ruang kepaniteraan FCA. Lauren McComick mendemonstrasikan sistem e-Lodgment dan case management system yang dimiliki oleh FCA. Setelah Lauren selesai mendemonstrasikan, peserta magang, Asep Nursobah, berinisiatif untuk mendemonstrasikan fitur komunikasi data ADP, sistem informasi perkara, dan Direktori Putusan. Lauren dan Louise sangat antusias memperhatikan sistem yang dimiliki oleh MA. Keduanya memberikan apresiasi karena MA telah memiliki sistem yang serupa dengan FCA.

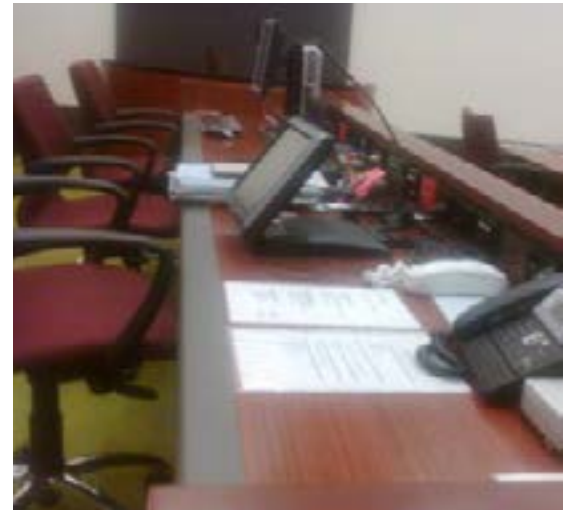
Beragama Cara Bayar Biaya Perkara

Bukan hanya cara pengiriman berkas yang bisa menggunakan beragam cara sebagaimana diatur dalam Federal Court Rules 2012 Part 2, pembayaran biaya perkara pun bisa menggunakan cara beragam. Para pihak bisa menggunakan uang tunai, cek, debit, atau kartu kredit. "Bagi para pi-

hak yang menyerahkan langsung berkas ke kepaniteraan FCA, mereka biasanya lebih suka menggunakan uang tunai", ungkap Lauren McCommick ketika memberikan penjelasan kepada peserta magang di ruang pendaftaran perkara. Sedangkan jika pengiriman berkas perkara menggunakan faks atau e-lodgment, mereka menggunakan kartu kredit. Jika menggunakan cara ini, mereka melampirkan informasi bukti pembayaran melalui form yang telah disediakan di website. Untuk mendukung berbagai cara pembayaran tersebut, kasir FCA dilengkapi dengan mesin cash register dan berbagai mesin "gesek" kartu kredit.

Beragam cara untuk pengiriman berkas perkara, menurut Louise Kenworthy merupakan upaya *access for justice* yang disediakan oleh Federal Court of Australia. Bagaimana dengan pengadilan di Indonesia? Sudah saatnya pengadilan di kota besar untuk bekerja sama dengan bank sehingga memungkinkan para pihak membayar biaya perkara menggunakan kartu kredit atau debit sebagai bagian dari *access to justice*. [an]

Melihat Ruang Sidang FCA dari Dekat: HighTech dan Humanis



Meja sidang FCA untuk panitera pengganti yang dilengkapi dengan fasilitas berteknologi tinggi

MELBOURNE | 10 MEI 2012

Hari ketiga program magang, para peserta diajak untuk melihat ruang sidang FCA. Melihat dari dekat ruang sidang FCA sungguh membuat kita berdecak kagum. Selain ruangan yang nyaman dan modern dengan atribut peralatan berteknologi tinggi, pandangan kami berhenti pada meja para pihak. Disana tersedia gelas dan teko berisi air mineral yang sengaja disajikan untuk mengatasi dahaga para pihak. Kursi pengunjung sidang pun bisa membuat kita enggan berdiri karena sangat nyaman. Sungguh menjadi harmoni yang mengagumkan antara sisi teknologi dan humanisme.

Selanjutnya kami diajak untuk melihat meja sidang hakim dan panitera. Melihat meja panitera pengganti seperti melihat kokpit pilot pesawat. Disana berderet tombol-tombol dan peralatan elektronik yang canggih. Ada monitor layar sentuh untuk mengatur video conference, pesawat telpon, laptop yang tersambung dengan case management system, mesin transkripsi, dan lainnya.

Bahkan di salah satu ruangan sidang yang khusus untuk memeriksa perkara niaga yang melibatkan pihak perusahaan besar, ruang sidang lebih canggih lagi. Ruangan tersebut sudah dipersiapkan untuk e-court. Deretan meja para pihak dilengkapi beberapa komputer. Sekilas lebih mirip kantor bursa efek. Selain itu para pihak yang membawa sendiri laptop disediakan koneksi

aringan. Lemari berkas para pihakpun tersedia disisi kiri ruang sidang.

Di sebelah ruangan sidang khusus tersebut, tersedia ruangan server yang mendukung terselenggaranya proses e-court. FCA menyediakan ruangan khusus untuk menyidangkan perkara sengketa niaga tertentu, dan ruangan tersebut akan tetap dipergunakan untuk satu perkara hingga selesai. Para pihak menyimpan berbagai properti, seperti laptop, berkas, dokumen yang terkait dengan perkara di ruangan tersebut hingga pemeriksaan selesai beberapa hari atau beberapa minggu kemudian.

Dalam design ruang sidang FCA, hakim diberikan jalur tersendiri yang tidak bisa diakses oleh siapapun termasuk staf pengadilan. Jalur "rahasia" tersebut terhubung dengan ruangan hakim yang juga terpisah dengan ruang staf pengadilan lainnya. Jika hakim dalam memeriksa perkara memerlukan referensi buku atau bahan lain, tersedia ruangan khusus untuk mengakses bahan tersebut. "Dan biasanya persidangan diskor untuk keperluan tersebut", ujar Louise Kenworthy.

Ada ruangan lain yang menarik perhatian kami, adalah tersedianya ruangan khusus untuk menyimpan alat bukti berupa dokumen penting, misalnya passport, dokumen pendirian perusahaan, kontrak dan lain-lain. Untuk mengamankan dokumen-dokumen yang

bersifat sangat penting tersebut, FCA menyediakan ruang khusus yang disebutnya sebagai "top secret". "Tidak semua orang bisa mengakses ruangan ini, dan pengamanannya berlapis." Ujar Lauren Mc Commick.

Tour kami berikutnya menuju ruang tahanan. Kami ditunjukkan satu ruangan seukuran kurang lebih 2X2 meter, didalamnya ada satu set sofa. Kenyamanan ruang tersebut tidak berbeda dengan ruang lain di FCA, hanya dinding yang tidak dilapisi wallpaper. "itu adalah ruang tahanan", bisik Louise. Cukup kaget mendengar penjelasan Louise. Namun ia segera berargumen bahwa itu implementasi penegakan hak asasi manusia. Meski ruang tahanan terkesan nyaman, namun keamanan tidak diabaikan, dan untuk membawa tahanan ke ruang sidang, digunakan jalur dan lift khusus.

Hal lain yang menjadi catatan dari tour of the court kami adalah design gedung mengakomodir para pihak atau petugas pengadilan yang memerlukan kebutuhan khusus. Sebagai contoh, FCA menyediakan jalan, meja khusus bagi juri yang menggunakan kursi roda. Demikian juga dengan fasilitas lain seperti, toilet, dan petunjuk ruangan. [an]

Mempermudah Kerja Pengadilan, Semua Dokumen Terstandarkan

MELBOURNE | 10 MEI 2012

Sebagaimana di Indonesia, pengadilan akan disibukkan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan berkas. Untuk mempermudah kerja pengadilan, FCA membuat standarisasi dokumen yang harus digunakan ketika publik mengajukan gugatan ke pengadilan. Sifat edaran tersebut mengikat, sehingga FCA akan menolak jika dokumen yang dibuat tidak sesuai dengan kriteria yang diatur dalam "Practice Note" yang dikeluarkan langsung oleh Chief Justice Federal Court of Australia.

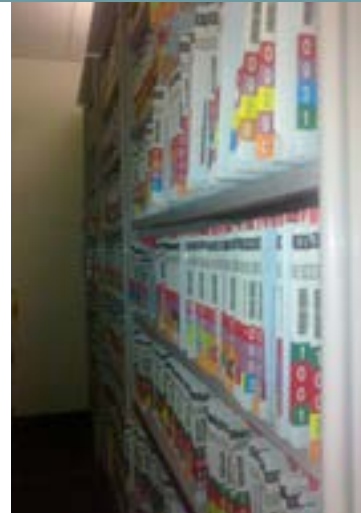
Diantara standarisasi dokumen yang diatur FCA adalah mengenai ukuran kertas. FCA menentukan jenis kertas yang harus digunakan untuk mengajukan ap-

likasi, yaitu kertas A-4 yang berkualitas tahan lama. Selain jenis kertas, FCA pun membuat standarisasi teknis penulisan. Misalnya tentang angka, baik tanggal, jumlah, atau lainnya. FCA mengharuskan semuanya ditulis dalam bentuk angka bukan hurup.

Mengenai formulir-formulir yang digunakan, FCA pun telah membuat berbagai template formulir yang sangat lengkap. Semua formulir yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara baik untuk para pihak maupun pengadilan telah ditetapkan dalam Practice Note Chief Justice dan Federal Court Rules. Semua template dokumen tersedia di website FCA, www.fedcourt.gov.au.



Pendekatan Kreatif Mengelola Arsip



//

Sentuhan teknologi informasi pada map berkas. Setiap berkas disertakan **barcode** yang akan membantu untuk input data dengan case management system

MELBOURNE | 10 MEI 2012

Arsip bisa menjadi persoalan rumit di pengadilan. Jika jumlah arsip yang kian menggunung persoalan yang muncul bukan saja bagaimana arsip itu disimpan, tetapi bagaimana arsip tersebut dengan mudah ditemukan kembali. Belum lagi, pertanyaan bagaimana arsip pengadilan tersimpan dengan aman.

Hari ketiga magang, para peserta program diajak mengunjungi ruang arsip. Arsip FCA tersimpan di lemari besi yang tahan api dan bisa digeser karena menggunakan rel. Untuk fasilitas ini, tidak terlalu surprise karena di Indonesiapun ada beberapa pengadilan yang sudah menggunakan fasilitas ini.

Yang menarik perhatian adalah kombinasi warna dan angka yang ada di "kuping" map berkas. Kombinasi warna dan angka ternyata nomor perkara. Ide ini sangat kreatif. Pertama, dari sisi penempatan di "kuping". Dengan menuliskan nomor di kuping, identitas nomor perkara bisa terlihat langsung ketika map berkas disimpan di lemari arsip. Hal ini berbeda ketika penomoran dilakukan di cover depan map

berkas. Nomor perkara baru akan diketahui ketika berkas diambil dari box, dan proses pencarian berkas pun menjadi dua tahap, yaitu mencari kelompok di lemari dan di box kemudian diambil map berkas dan dipastikan nomornya cocok dengan melihat nomor di cover depan map.

Kreatifitas kedua, kombinasi warna dan nomor. Setiap nomor diwakili oleh warna. Misalnya merah untuk angka 0, hijau untuk angka 1, kuning untuk angka 2, biru untuk angka 3 dan seterusnya. Pendekatan ini disamping memudahkan untuk mencari juga memudahkan untuk mengontrol berkas, termasuk berkas yang salah pengelompokannya. Misalnya untuk kelompok dua ratusan mesti warnanya dimulai dari warna kuning, sehingga jika tiba-tiba terselip warna biru, maka dipastikan map tersebut salah pengelompokannya.

Hal yang pasti adalah sentuhan teknologi informasi pada map berkas. Setiap berkas disertakan barcode yang akan membantu untuk input data dengan case management system. [an]

Atasi Tunggakan Perkara, FCA Terapkan Individual Docket System

MELBOURNE | 15 MEI 2012

Tunggakan perkara menjadi permasalahan yang dihadapi oleh setiap pengadilan tak terkecuali Federal Court of Australia. Untuk mengatasi hal ini pada awal tahun 90-an FCA melakukan pembaruan manajemen perkara dengan salah satu agendanya menerapkan Individual Docket System (IDS). Penerapan IDS oleh FCA dilakukan melalui proses yang panjang antara lain melalui konsultasi dengan praktisi hukum terkemuka di Australia, dan berdiskusi dengan praktisi manajemen perkara dan persidangan baik di Australia maupun dunia.

Prinsip dasar dari IDS adalah setiap kasus yang diterima pengadilan akan dialokasikan secara acak ke hakim, dan hakim inilah yang akan bertanggungjawab untuk mengelola perkara tersebut dari perkara diterima hingga perkara tersebut selesai. Hal ini berbeda dengan sistem yang diimplementasikan sebelumnya (listing system) yang tidak memberikan tanggung jawab individu terhadap penyelesaian berkas.

Demikian disampaikan oleh Justice Bernard Murphy dalam "obrolan" mengenai aplikasi sistem manajemen perkara perspektif majelis hakim bertempat di ruang kerjanya, Senin (14/5), di lantai 16 Gedung FCA, Melbourne. Dalam "obrolan" ini peserta magang didampingi oleh Sia Lagos, Kepala Kepaniteraan FCA untuk negara bagian Victoria. Perbincangan serupa pernah dilakukan bersama dengan David Proddle, Director Operations FCA, pekan lalu (Kamis, 10/5).

Baik Justice Murphy maupun David, keduanya berpendapat bahwa Individual Docket System sangat efektif untuk memonitor dan mengelola beban kerja hakim. Bahkan, sistem tersebut terbukti efektif dalam mengatasi tunggakan perkara di pengadilan.

Manajemen Perkara

Setelah berkas perkara diregistrasi di kepaniteraan FCA, petugas kepaniteraan diberikan delegasi oleh Ketua Pengadilan untuk mendistribusikan berkas ke hakim. Dalam mendistribusikan berkas ini, petugas kepaniteraan mempertimbangkan beban kerja dari masing-masing hakim melalui buku instrumen docket hakim. Instrumen ini memberi informasi jumlah distribusi perkara pada masing-masing dan status penyelesaiannya. Prinsip yang dianut dalam distribusi berkas ini adalah keseimbangan beban kerja dari masing-masing hakim. Pada tahap ini petugas kepaniteraan melakukan input data pada sistem manajemen perkara.

Setelah berkas dialokasikan ke hakim, dengan sistem Individual Docket System, hakim yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap segala proses hingga perkara tersebut selesai diputus. Untuk membantu kerja hakim, masing-masing hakim dibantu oleh associate justice. Associate Justice adalah alumni fakultas hukum terbaik atau pengacara terpilih dengan tugas membantu hakim dalam melaksanakan tugasnya. Mereka yang menginput perkembangan penyelesaian perkara ke dalam Case Management System, mempersiapkan administrasi persidangan, mengelola agenda persidangan, menyusun draft putusan, hingga melakukan penelitian hukum tertentu yang diperlukan hakim dalam memutus perkara.

Dalam kunjungan ke ruang kerja Justice Murphy, nampak associate justice menempati ruang tersendiri. Berkas yang masuk ke docket Justice Murphy berada di ruangan ini. Berkas dikelompokkan berdasarkan proses penanganan perkara. Ada kelompok berkas yang baru diterima, proses pemeriksaan, hingga yang sedang dipersiapkan putusannya.

Sementara untuk mengatur jadwal kegiatan persidangan selain adanya case management system, associate jus-

tice atau asisten juga mengelola jadwal tersebut dalam Microsoft Outlook. Selain itu untuk penanganan perkara banding, Panitia urusan banding yaitu Angela Josan, telah mengelola persidangan secara teratur untuk semua negara bagian. Dalam presentasi hari Jum'at (11/05), Angela menunjukkan jadwal persidangan banding untuk semua hakim pada seluruh negara bagian Australia.

Monitoring Beban Kerja Hakim

Untuk memonitor dan mengendalikan beban kerja hakim, Case Management System mengeluarkan laporan docket (docket report) untuk masing-masing hakim. Dalam docket report tersebut disampaikan status perkara yang ada di tangannya pada saat laporan dibuat. Informasi yang tersaji pada masing-masing perkara adalah: tanggal diregistrasi, nomor perkara, nama para pihak, jenis perkara, status penanganan perkara seperti ditunda, sidang pertama, persiapan pembacaan putusan, dll. Ketika sidang ditunda atau sidang pertama, dalam docket report juga disebutkan tanggal dan jam pelaksanaan persidangan.

Selain menerbitkan docket report, CMS juga menerbitkan "Single Judge Court Workload Report". Laporan kinerja individu hakim ini menampilkan informasi: jumlah perkara yang dialokasikan ke dalam docket masing-masing hakim, jumlah perkara yang diselesaikan, nilai clearance rate, rata-rata waktu dalam docket, perkara yang melebihi 18 bulan dalam docket, total waktu untuk semua persidangan, rata-rata waktu persidangan, jumlah putusan yang diselesaikan, rata-rata halaman putusan yang dibuat, jumlah putusan yang disampaikan lebih dari 90 hari, dan jumlah putusan yang dipersiapkan lebih dari 90 hari. [an]



Peserta magang bersama David Priddle, Direktur Operasional FCA, berfoto bersama se usai presentasi sistem manajemen perkara

Memastikan Perkara Selesai Tepat Waktu, FCA Lakukan Realokasi Perkara

MELBOURNE | 15 MEI 2012

Federal Court of Australia (FCA) menetapkan batas waktu maksimal penyelesaian perkara selama 18 bulan. Untuk memastikan setiap perkara diselesaikan tepat waktu, dalam laporan kinerja hakim disampaikan jumlah perkara yang telah melampaui 18 bulan. Laporan tersebut diperoleh dari Case Management System yang diupdate oleh asisten masing-masing hakim. Terhadap perkara yang telah melampaui 18 bulan pada docket hakim, Panitera melakukan realokasi perkara kepada hakim lain.

Demikian disampaikan Direktur Operasional Peradilan, David Priddle, kepada para peserta magang, Kamis (10/5). Menurut David, Realokasi ini dimaksudkan untuk memastikan setiap perkara bisa diselesaikan secara tepat waktu. Selain karena alasan melampaui batas waktu penyelesaian perkara, realokasi perkara bisa juga dikarenakan alasan "bias", dikarenakan hakim yang bersangkutan memiliki relasi yang dikhawatirkan menganggu asas imparsialitas.

Mengenai realokasi perkara, Case Management System FCA secara periodik mengeluarkan laporan perkara yang direalokasi. Selain berformat laporan, system pun menerbitkan dalam bentuk grafik sehingga mudah dibaca oleh pimpinan pengadilan. Selain realokasi perkara secara individu, CMS pun menerbitkan laporan perkara sistem kamar.

Untuk memonitor keadaan berkas yang ditangani oleh

hakim, CMS pun menerbitkan laporan "stock of name" perkara yang dinamakan "All Current Matters in Judges Dockets" dalam setiap akhir bulan. Dalam laporan ini disampaikan informasi Sisa perkara bulan lalu, jumlah perkara yang berkurang karena transfer antar docket (realokasi), jumlah perkara berkurang karena selesai, jumlah perkara baru yang masuk docket, jumlah perkara masuk karena transfer docket, dan total jumlah perkara dalam docket.

Laporan yang sama juga dibuat untuk masing-masing hakim yang tergabung dalam kamar perkara tertentu. Selain laporan diatas, CMS pun menerbitkan laporan detil perkara-perkara yang belum putus diatas 12 bulan. Laporan tersebut ada yang dibuat secara general dan juga detil berdasarkan masing-masing hakim.

24 Jam Update

Untuk dapat menerbitkan laporan-laporan sebagaimana tersebut diatas, David Priddle menjelaskan bahwa asisten hakim wajib mengupdate Case Management System maksimal dalam waktu 24 jam setelah terjadinya proses tahapan penanganan perkara. Batas waktu ini ditetapkan sebagai komitmen pengadilan dalam menjalankan transparansi informasi.

Sedangkan untuk menjadin akurasi data dalam sistem informasi, FCA selalu melakukan audit data. Hasil audit ini digunakan untuk melakukan perbaikan data. "Data keliru bisa menjadi masalah besar bagi pengadilan", pungkas David Priddle. [an]

Dua Jam Bersama Pak Murphy :

Dari Class Action, Penyusunan Putusan hingga Ulang Tahun Pak Bambang



Kejutan Ulang Tahun : FCA tiba-tiba memberikan kue ulang tahun ke Pak Bambang disaat peserta berdialog dengan Justice Murphy, Senin (14/5). Nampak sekali hubungan yang akrab antara MA dan FCA

MELBOURNE | 15 MEI 2012

Melbourne: Kepaniteraan.Online (15/5)

Justice Murphi salah seorang hakim FCA yang sangat dekat dengan peserta magang. Pribadinya yang ramah dan humoris menjadikan hakim yang pakar di bidang class action ini langsung mencair dengan peserta sejak pertemuan pertama. FCA menyambut peserta magang dalam kegiatan mirip welcome party yang dikemas dengan acara makan siang bersama. Justice Murphi pun sangat fasih menyapa peserta dengan sebutan Pak dan Bu. Kedengarannya lucu ketika Pak Murphy menyapa "Selamat Pagi Pak Bambang...". Dia pun memberitahu cara menyapa ala Indonesia kepada asistennya ketika kami berkunjung ke ruang kerjanya, Senin (14/5).

Oleh bu Sia Lagos, peserta magang diagendakan untuk berdialog dengan Justice Murphi di ruang kerjanya hari Senin kemarin (14/5). Tema obrolan yang ditentukan tentang " Application of Case Management System : jugdes chambers perspective". Pembawaanya yang santai dari Justice Murphy membuat peserta leluasa bertanya hingga

hal yang detail. Ia sangat semangat ketika bicara soal class action.

"Saya telah menangani 35 kasus class action ketika menjadi pengacara", ujar Justice Murphy. Beberapa dari kasus tersebut, kata Justice Murphy, merupakan kasus internasional yang melibatkan berbagai lawyer Eropa dan Amerika (Kanada). Ia meyakini sistem class action di Australi menjadi yang terbaik di dunia. Ia menawarkan agar class action menjadi fokus kegiatan magang periode berikutnya (bulan Oktober). Usulan ini disambut positif oleh peserta dan ibu Sia Lagos.

Dari pembicaraan class action, beralih ke penyusunan putusan. Justice Murphy berbicara mengenai template dan gaya bahasa putusan. Ia mengaku terbantu dengan adanya template yang disediakan oleh FCA. Soal bahasa putusan, Ia mengkritisi gaya penulisan putusan yang menggunakan istilah-istilah hukum yang rumit sehingga susah dipahami.

"Hakim-hakim dulu membuat putusan selalu dengan bahasa-bahasa yang rumit. Semakin banyak istilah-istilah teknis hukum merasa putusannya

berkualitas", ujarnya memberi ilustrasi.

Menurutnya putusan harus disampaikan dalam bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Hal ini karena pencari keadilan bukan pakar hukum. "Mereka masyarakat awam yang harus mengerti kenapa pengadilan menolak atau mengabulkan gugatannya", ujar Hakim FCA yang baru bertugas selama setahun ini.

"Namun untuk membuat pertimbangan hukum dengan lugas dan menggunakan bahasa sederhana bukan hal yang mudah, perlu pemahaman yang tinggi terhadap kasus dan penerapan hukumnya", tegasnya.

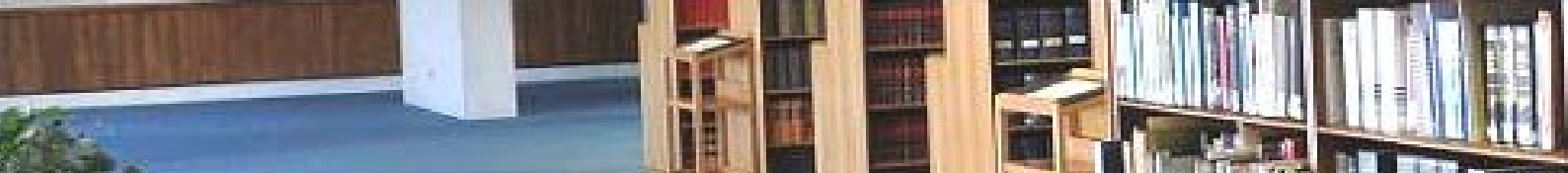
Ditanya soal proses penyusunan putusan, Justice Murphy menjelaskan bahwa ia dibantu oleh associate justice atau mirip asisten hakim di Indonesia. Asisten menyusun kerangka putusan kemudian hakim melengkapi dengan pertimbangannya. Tidak jarang Justice Murphy menyusun putusan di rumah. Ia menggunakan aplikasi "Dragon Dictation" yang bisa merubah suara ke teks.

Untuk kegiatan koreksi, Justice Murphy menggunakan fitur “track changes” yang ada di Microsoft Office Word. Fitur ini merekam jejak editing dokumen. Melalui cara ini, ia akan mengetahui kalimat mana yang diubah atau dihapus. Jelas sekali sosok Justice Murphy adalah sosok hakim yang melek teknologi informasi. “Udah ramah, ganteng, gaul lagi”, ungkap Mia Hafsari menilai sosok Justice Murphy.

Kejutan Ulang Tahun
Ketika peserta asyik bertanya dengan Justice Murphy dan Ibu Sia Lagos, tiba-tiba Andrea Jarrat, Executive Officer FCA masuk ruangan membawa kue ulang tahun. Ternyata pihak FCA mengetahui bahwa diantara peserta, yaitu Bambang Heri Mulyono, berulang tahun pada hari itu, 14 Mei. Wajah pak Bambang nampak terkejut sekaligus terharu dan gembira. Dengan sigap, Justice Murphy dan Ibu Sia Lagos memimpin

lagu “Happy Birthday” untuk pak Bambang. Setelah selesai Justice Murphy meminta peserta magang untuk menyanyikan lagu ulang tahun dalam bahasa Indonesia. Benar-benar suasana meriah dan penuh keakraban saat itu. “Ini adalah ulang tahun pertama saya yang dirayakan dengan potong roti, biasanya kalau ulang tahun dirayakan dengan nasi tumpeng”, ujar Bambang yang disambut tawa.[an]





Semua Informasi yang Dibutuhkan Hakim, Tersedia di Perpustakaan FCA

MELBOURNE | 17 MEI 2012

H-3 program magang (Rabu, 16/5), peserta diajak ke perpustakaan Federal Court yang berada di lantai 11 Law Court Building. Setengah bagian dari lantai tersebut diperuntukkan bagi perpustakaan. Dari sisi kenyamanan tidak jauh berbeda dengan Perpustakaan MA. Yang berbeda adalah jenis koleksi perpustakaan. Perpustakaan FCA berisi tentang semua informasi yang dibutuhkan hakim dalam pemeriksaan perkara. Seolah perpustakaan ini didedikasikan semata-mata untuk hakim. Koleksi terbesar adalah law report, baik Australia maupun dari negara-negara Anglo-Saxon. Koleksi Law Report di perpustakaan FCA terbilang lengkap, bahkan koleksi kuno di tahun 1800-an masih terawat dengan baik.

Dukungan terhadap hakim, selain ketersediaan koleksi pustaka yang lengkap juga update informasi jika ada koleksi baru baik berupa buletin, informasi online, atau law report elektronik. Pihak perpustakaan pun secara berkala mengadakan pelatihan kepada hakim atau asisten hakim untuk menggunakan sistem electronic legal research yang dimiliki oleh FCA atau jaringan dokumentasi informasi hukum internasional seperti Lexis-Nexis, West Law, atau Thomson Legal Online.

Informasi tersebut disampaikan oleh John Botherway, Manager Library & Informasi Services FCA, kepada peserta magang dalam serangkaian kegiatan magang yang diberi nama "tour of library", Rabu (16/5) di ruang kerjanya.

John juga menjelaskan, Perpustakaan

FCA menyediakan klipng informasi secara elektronik tentang segala hal yang terkait dengan FCA yang berasal dari pemberitaan media terkemuka di Australia. Kliping ini disediakan oleh pihak ketiga yang menaruh perhatian terhadap peradilan melalui kerjasama kontraktual.

Selain klipng elektronik, Perpustakaan FCA pun memiliki koleksi risalah persidangan dari parlemen ketika menggodog sebuah peraturan perundang-undangan. Perpustakaan pun menjalin kerjasama mutual dengan Universitas. "Universitas atau FCA saling meminjam koleksi perpustakaan jika kedua belah pihak membutuhkan bahan pustaka yang tidak tersedia", ungkap John Botherway. Jalinan kerjasama mutualis ini juga dilakukan dengan pihak swasta yang fokus terhadap law report.



Barcode : pengelolaan sirkulasi koleksi perpustakaan didukung oleh sistem barcode, baik untuk koleksi buku maupun anggota perpustakaan (hakim)

Untuk mengelola Perpustakaan FCA memiliki sistem aplikasi pengelolaan perpustakaan yang terintegrasi secara nasional. "Jika ada yang men-

cari koleksi perpustakaan, sistem akan menunjukkan koleksi tersebut ada di perpustakaan mana di semua negara bagian", ungkap Jhon Botherway ketika menjawab pertanyaan Binziad Kadafi, Senior Manager AIPJ.

Untuk memberikan pelayanan meminjaman buku kepada hakim, Per-

pustakaan FCA memiliki sistem yang dilengkapi fasilitas barcode. Selain buku yang dilekati barcode, tiap hakim pun diberikan identitas barcode. Melalui sistem ini, sirkulasi buku bisa dimonitor dengan efektif.

Putusan Sederhana Ala FCA



//

Justice Murphy dan Sia Lagos bersama peserta magang sesuai berdiskusi tentang format putusan FCA

MELBOURNE | 15 MEI 2012

Hampir 2 jam, peserta magang, Bambang Heri Mulyono (hakim peradilan umum/hakim yustisial MA), Subur (hakim PTUN/hakim yustisial MA), Asep Nursobah (hakim peradilan agama/hakim yustisial MA), Achmad Cholil (Hakim Peradilan Agama/Mahasiswa Universitas Melbourne) dan Binziad Kadafi (Senior Manager Court Reform & Access to Justice, Australia Indonesia Partnership for Justice/AIPJ), berdiskusi panjang lebar dengan Justice Bernard Murphy di ruangannya di gedung Federal Court of Australia (FCA), dengan bantuan penerjemah Mia Hapsari. Didampingi Sia Lagos, Panitera Kepala FCA untuk negara bagian Victoria, beliau membagi banyak pandangan dan pendapatnya pada kami. Justice Murphy baru setahun diangkat sebagai hakim pada FCA. Usia jabatan ini membuatnya dikategorikan sebagai hakim junior, terutama jika dibandingkan hakim-hakim lain yang bisa jadi sudah puluhan tahun menjabat.

Meski junior, bukan berarti pengalaman hukum Justice Murphy belum matang. Sebelum mengenakan toga hakim, dia puluhan tahun malang melintang

sebagai pengacara ternama di Australia. Firma hukumnya masuk dalam jajaran teratas, yang mempekerjakan sedikitnya 250 orang pengacara, jumlah yang signifikan untuk menguasai persaingan dengan firma yang lain. Selain itu, perkara-perkara besar yang ditanganinya secara langsung, terutama berbagai perkara class action di bidang perlindungan konsumen, menjadikan nama Murphy cukup dikenal di komunitas hukum Australia.

Namun tetap saja, terlepas dari latar belakangnya, di FCA Justice Murphy masih seorang junior. Selama beberapa waktu, dia harus rela untuk duduk di bawah bimbingan hakim FCA lain seniornya. Sang hakim mentor biasanya akan berperan memberi jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dari Justice Murphy ketika menjalankan fungsinya sebagai hakim. Tanpa diminta, sang mentor juga bisa memberi masukan kepada hakim baru yang dibimbingnya mengenai kemampuan yang perlu dikembangkan, sesuatu yang sebenarnya tabu untuk dilakukan antar-hakim di Australia, jika di luar hubungan mentor-junior. Di tengah kesibukannya, sang mentor harus bersedia meluangkan waktu untuk itu.

Ada satu topik yang paling banyak dibahas Justice Murphy dalam diskusinya dengan kami, yaitu soal pembuatan putusan. Menurut Justice Murphy, sebagian besar hakim FCA berasal dari kalangan pengacara berpengalaman. Ada juga yang berasal dari kalangan pengajar sekolah hukum, serta mereka yang sebelumnya pernah menjabat hakim di level yang lebih rendah. Namun mayoritas dari pengacara yang menjadi hakim itu adalah barrister, atau pengacara yang bergelut di bidang litigasi.

Kultur kerja yang terbangun di kalangan barrister ini unik. Mereka sangat independen dalam bekerja dan cenderung solitaire, mengingat umumnya mereka menggunakan bentuk kantor hukum perorangan, bukan firma. Ketika menjadi hakim, karakter independen ini juga masih kuat membekas. Ada baiknya sebenarnya, karena toh hakim memang dituntut untuk selalu bersikap independen. Namun ketika karakter independen pada cara kerja barrister diterjemahkan ke dalam konteks jabatan hakim yang sifatnya publik, hal itu bisa menjadi masalah. Masalah utama ditemukan pada cara mereka membuat putusan.

Dulu terasa sekali pilihan dan gaya individual seorang hakim dalam menu-liskan putusannya. Tidak hanya dari seberapa panjang lebar analisisnya, termasuk bagaimana format dan tata urutannya. Jika situasi itu masih bertahan, pasti akan sulit bagi Justice Murphy untuk bisa beradaptasi di awal jabatannya. Karena tidak jelas putusan mana dengan format dan gaya apa yang perlu diacu, karena sangat beragam. Atau bisa jadi Justice Murphy memilih untuk menggunakan format dan gayanya sendiri, yang akhirnya hanya akan menambah model putusan di antara banyaknya model yang sudah ada. Bayangkan, jika maraknya format dan gaya putusan menyulitkan bagi seorang hakim baru, bukankah itu artinya juga menyulitkan pelaku peradilan lain seperti pengacara? Lebih menyulitkan lagi tentu saja bagi publik, khususnya masyarakat pencari keadilan.

Template Putusan

Untuk itulah menurut Justice Murphy, sudah beberapa lama FCA mengadopsi penggunaan sebuah template putusan oleh para hakim. Template ini sebenarnya sudah cukup lama diperkenalkan di luar pengadilan oleh berbagai organisasi, terutama akademi hukum. Tujuan yang ingin dicapai dari diintroduksinya template ini adalah agar para hakim memiliki cara yang lebih seragam dalam menyampaikan pesannya ke audiens mereka, publik secara luas, demi memudahkan audiens tersebut dalam menerima pesan. Template bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan apa isi pesannya karena jelas akan mengganggu independensi hakim.

Tujuan itu ditangkap dengan baik oleh FCA. Pengadilan Federal Australia ini menyadari betul bahwa hakim bekerja untuk masyarakat. Fungsi hakim yang paling utama adalah mengurangi ketegangan di masyarakat dengan menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat lewat jalur hukum secara adil, agar mereka tidak menempuh jalur sendiri untuk itu, yang bisa berujung pada kekerasan dan hal-hal buruk lainnya. FCA, atau lebih tepat Justice Murphy meyakini, bahwa fungsi itu tidak akan berjalan dengan baik jika apapun penyelesaian yang adil yang dibuat Pengadilan tidak bisa dimengerti secara luas. Masyarakat tidak akan paham di mana letak keadilan dari suatu putusan, dan apa peran Pengadilan di dalamnya, yang akhirnya membuat ketegangan di masyarakat pun tidak banyak berkurang.

Menurut Justice Murphy, seorang hakim harus bisa berkomunikasi dengan publik lewat putusannya. Mereka tidak seharusnya berkomunikasi hanya dengan sesama hakim, atau dengan sesa-

ma anggota komunitas hukum (jurist), melainkan kepada publik pada umumnya. Hanya putusan yang mudah dipahamilah yang bisa menjangkau masyarakat. Dan putusan yang mudah dipahami dimulai dengan format yang standar, yang mudah dibaca lebih bisa diduga susunan dan sistematisnya (predictable).

Sebenarnya template putusan yang digunakan di FCA bukanlah program yang rumit. Dia hanya berbasis microsoft word yang bisa digunakan siapa pun. Dia pun hanya memuat headings dan sub-headings yang perlu diisi oleh para hakim jika dianggap relevan, yang menjadi semacam daftar periksa (check list) bagi seorang hakim untuk memastikan kelengkapan dari putusannya. Template putusan sama sekali tidak menyentuh substansi, hanya kerangka bukan isi. Soal apa yang ditulis hakim dalam putusannya, di situlah letak independensi dan kompetensi hakim, yang tidak satu pun bisa mengintervensinya.

Jika kita ambil satu putusan FCA, kita akan dibawa pada halaman pertama yang bagi pembaca sangat membantu. Halaman pertama itu memuat beberapa informasi penting mengenai putusan.

Di halaman pertama jelas dituliskan nama Pengadilan pemutus; nama dan nomor putusannya sendiri; rumusan bagaimana putusan itu seharusnya dikutip (atau lazim dikenal dengan citation); asal perkara (yang menerangkan perkara itu berasal dari banding dari pengadilan mana); nama para pihak; nomor berkas; tanggal putusan; serta keterangan mengenai kuasa hukum yang mendampingi para pihak. Namun yang paling menarik adalah indeksing dari putusan, atau dalam istilah pengadilan Australia, catchwords. Sebenarnya catchwords ini adalah kumpulan kata kunci yang akan memudahkan siapapun untuk mendapatkan putusan yang bersangkutan ketika putusan itu nanti sudah dimasukkan ke dalam database. Catchwords diisi oleh hakim yang memutus, atau asistennya. Catchwords bukan sekedar kata, melainkan beberapa konsep hukum yang relevan dengan isi suatu putusan yang digambarkan dengan kata.

Di halaman kedua dari putusan FCA, kita bisa menemukan subheading yang memuat pertimbangan hakim, atau dalam istilah FCA, reasons for judgment, yang tentu saja harus diisi hakim dan apa isinya ditentukan hakim sendiri. Subheading ini bisa memuat penjabaran atas fakta; isu hukum yang mengemuka (questions of law); analisis atas perundang-undangan, putusan terdahulu mengenai pokok perkara yang serupa; dan lain-lain.

Penomoran Paragraf: Langkah Kecil Namun Berguna

Aspek menarik lain dari template putusan yang layak diperhatikan adalah penggunaan nomor paragraf. Kesannya memang inisiatif ini sangat sederhana, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa, baik bagi kepentingan hakim sendiri, kepentingan pengembangan ilmu hukum, juga kepentingan akses publik terhadap keadilan (access to justice). Bagi hakim, penomoran paragraf bermanfaat untuk menjadikan putusannya lebih sistematis dan mudah dikutip, termasuk dalam putusan itu sendiri. Misalnya daripada mengulang menjelaskan suatu konsep yang sudah dijelaskannya dalam suatu paragraf, hakim yang bersangkutan tinggal menyebutkan paragraf mana yang ingin dia rujuk.

Bagi fakultas hukum, jelas penomoran paragraf dalam putusan akan memudahkan dalam menginventarisirnya ke dalam database, termasuk tentu saja mengutip putusan tersebut. Patut diketahui bahwa seluruh putusan FCA akan dimasukkan ke dalam database AustLii, sebuah sistem informasi hukum yang jadi pegangan komunitas hukum di Australia yang memuat tidak hanya putusan, peraturan perundang-undangan, namun juga berbagai jurnal dan artikel hukum.

AustLii dikembangkan dan dikelola oleh Fakultas Hukum University of New South Wales bekerjasama dengan Institut Teknologi Sydney. Database AustLii dapat diakses oleh siapa pun secara cuma-cuma. Ketika putusan FCA diunggah ke dalam AustLii, penomoran halaman yang semula dibuat menjadi tidak relevan. Sebab AustLii menggunakan basis html yang memang tanpa halaman. Di sinilah penomoran paragraf menjadi penting. Tanpa nomor halaman sekalipun, asalkan setiap paragraf suatu putusan memiliki nomornya, maka rujukan terhadap putusan tersebut akan tetap tepat. Bagi pencari keadilan, penomoran paragraf sangat membantu dalam membaca dan memahami putusan, mengontrol akurasi putusan, serta lagi-lagi, dalam mengutip putusan.

Aspek terakhir yang menarik dari format putusan FCA adalah kemungkinannya untuk menggunakan lampiran gambar atau grafik dalam menjelaskan suatu fakta hukum. Seringkali daripada menjelaskan panjang lebar fakta hukum tertentu, hanya dengan menampilkan suatu gambar atau bagan, suatu masalah bisa menjadi jelas dengan sendirinya (self explanatory), atau lebih mudah dipahami.



Belajar dan Belajar

Di luar peran template putusan, sebagai seorang hakim baru Justice Murphy juga membutuhkan media lain untuk membiasakannya dengan tugas menulis putusan. FCA memiliki program pendidikan bagi hakim baru yang disebut sebagai sekolah menulis putusan (decision writing school). Melalui program ini, para hakim yang berpengalaman akan membagi pengetahuan dan keterampilannya secara sistematis dalam menulis putusan dengan peserta. Semua aspek praktis terkait proses yang harus ditempuh seorang hakim saat membuat putusannya akan dibahas. Pengetahuan dan keterampilan tersebut bahkan telah dibakukan oleh penyelenggara program pendidikan ke dalam modul-modul pelatihan. Dengan kredibilitasnya, program pendidikan ini telah menjadi suatu kebutuhan di kalangan hakim.

Media lain yang sangat membantu hakim di FCA dalam menjalankan tugasnya, termasuk menyusun putusan, adalah peran asisten hakim (judge assistant). Para asisten hakim ini biasanya adalah lulusan terbaik dari fakultas-fakultas hukum yang dipilih dengan sangat selektif. Mereka dikontrak untuk 1 tahun, paling lama 2 tahun, dan digaji sebagaimana layaknya pegawai pengadilan. Fungsi mereka yang utama adalah membantu hakim dalam mengelola proses persidangan, serta melakukan penelitian hukum dalam rangka penulisan putusan, jika diminta oleh hakim. Motivasi dari be-

berapa asisten hakim yang kami temui di FCA yang paling mengemuka adalah untuk belajar langsung dari hakim yang mereka bantu dan mendapatkan pengalaman praktis di pengadilan. Namun disadari atau tidak, mereka juga sebenarnya menjalankan peran sebagai rekan belajar dan teman diskusi dari para hakim.

Salah satu tantangan yang paling berat bagi Justice Murphy adalah memulai dan menuntaskan proses menulis putusannya. Menurutnya, sangat kuat keinginan untuk segera menulis putusan tepat setelah persidangan dilakukan, dan segera setelah keterangan para pihak selesai didengar. Sebab di saat itulah ingatannya masih sangat segar mengenai suatu perkara, yang tentu akan membantu meringankan bebannya. Namun, jumlah perkara yang harus ditangani menyulitkannya untuk melakukan itu. Kadang, meski sangat jarang, baru 4 bulan setelah persidangan dituntaskan, Justice Murphy memulai menulis putusannya. Di tengah diskusi kami, Justice Murphy menunjukkan satu trolis yang di dalamnya berjejer folder berisikan berkas perkara. Dia tengah menuliskan putusan atas perkara itu.

Di akhir pertemuan kami, Justice Murphy sempat mengkopikan 3 putusan yang dia anggap sebagai putusan terbaik yang pernah dia buat. Putusan pertama mengenai perlindungan konsumen setebal 34 halaman. Putusan kedua mengenai perpajakan setebal 67 halaman. Putusan ketiga mengenai

arbitrase yang relatif sederhana, setebal 23 halaman.

Terlepas seberapa baiknya putusan Justice Murphy, Sia Lagos mencoba membandingkannya dengan Chief Justice Patrick Keane (Ketua FCA), yang menurut Sia adalah satu di antara orang terpintar di Australia. CJ Keane bisa menuliskan putusan atas perkara yang cukup kompleks hanya dalam 15 halaman. Tidak hanya pendek, putusan CJ Keane juga sangat mudah diikuti oleh siapa pun karena memang selalu menggunakan bahasa sederhana (plain language) dan cara bertutur yang apik. Menurut Sia, FCA saat ini ada dalam posisi bahwa menulis putusan secara berpanjang-panjang dengan bahasa yang rumit dan terkesan canggih (sophisticated) tidak lagi membuktikan keahlian seseorang. Malah hal itu dianggap sebagai bentuk dari kelemahan yang perlu diperbaiki. Hakim yang hebat menurut Sia, adalah mereka yang bisa menuliskan putusannya dengan singkat dan dengan bahasa sesederhana mungkin, agar pesan yang dikandung putusan itu juga bisa menyentuh masyarakat awam -tentu saja tanpa mengorbankan substansi. Karakter hakim seperti itulah yang dimiliki CJ Keane dan akan segera dikuasai oleh Justice Murphy dari proses belajarnya. (Penulis: Binziad Kadafi (Senior Manager Court Reform & Access to Justice, Australia Indonesia Partnership for Justice/AIPJ),

Imaginasi! Hal Penting untuk Rekayasa Proses Kerja Pengadilan

MELBOURNE | 18 MEI 2012

Kamis, 17 Mei 2012, peserta magang kembali bertatap muka dengan Warwick Soden, Panitera FCA yang membawahi seluruh Kepaniteraan (Registry) di berbagai negara bagian di Australia (Principal Registry). Warwick sendiri sebenarnya berkedudukan di Sydney dan hanya sesekali berkunjung ke Melbourne. Namun kali ini beliau secara khusus datang ke Melbourne untuk bisa membagi pengalamannya dengan pesertai, terutama mengenai court's business process reengineering (BPR), atau rekayasa proses kerja pengadilan. Warwick memulai paparannya (yang sebagian pernah disampaikan saat berkunjung ke Indonesia dan memberi materi di sebuah lokakarya di MA pada Desember 2011) dengan bercerita bahwa kurang lebih 8 tahun yang lalu, ada sebuah proses yang dilalui FCA untuk mendapatkan gambaran mengenai apa masa depan yang akan dimiliki FCA. Imaginasi para hakim, panitera, dan staf FCA dikumpulkan tentang gambaran masa depan tersebut. Guna membantu mengeksplorasi imaginasi tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan.

Pertanyaannya berurut dan saling terkait. Mulai dari pertanyaan mengenai dunia usaha (yang merupakan pengguna jasa FCA paling besar), yaitu "apakah dunia usaha akan menjalankan kegiatannya secara elektronik?" Lalu pertanyaan berlanjut pada, "apakah profesi hukum akan dipaksa oleh klien mereka (dunia usaha) untuk bekerja secara elektronik?" Akhirnya pertanyaan akan menjadi, "apakah profesi hukum karenanya, akan mengharapkan pengadilan untuk bekerja secara elektronik?"

Jika jawaban atas semua itu "ya", maka pertanyaan yang diajukan menjadi lebih detail. "Apakah dokumen-dokumen pengadilan akan dibuat dalam bentuk elektronik?" Selanjutnya, "benarkah bahwa jika pengadilan bekerja secara elektronik dapat meningkatkan efisiensi?" Lantas, "apakah biaya pengadilan bisa dipungut secara elektronik?" Se-

terusnya, "apakah data pada berbagai dokumen Pengadilan tersebut harus dimasukkan lebih dari satu kali?" Lalu, "bisakah suatu dokumen diakses oleh lebih dari 1 orang dalam waktu bersamaan?" Hingga, "apakah perlu ada perubahan peraturan untuk mengatur itu semua?"

Detail Perubahan

BPR adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses yang harus ditempuh guna melakukan perubahan atas hal-hal di atas. Ketika pengadilan membuat keputusan bahwa pada waktu tertentu tidak akan ada lagi dokumen kertas yang boleh diajukan ke Pengadilan, langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengimplementasikan keputusan itu disebut BPR.

Masa transisi tentu saja harus dikelola secara hati-hati. Proyek percontohan kadang diperlukan di FCA, khususnya untuk mengkombinasikan antara hakim yang belum terbiasa menggunakan komputer (hingga cenderung kuatir terhadap perkembangan baru ini) dengan hakim yang sudah familiar dengan sistem teknologi informasi. Lebih jauh, FCA pun menyediakan pelatihan kepada kalangan profesi hukum dengan mengunjungi firma-firma hukum mereka. Dengan begitu, FCA dapat memperkenalkan sistem kerja yang baru itu dengan cara yang tidak mengancam. Jika sistem ini diterapkan nantinya, FCA pun telah mengalokasikan sumberdaya untuk membantu pihak berperkara yang memilih untuk tidak menggunakan pengacara (unrepresented litigants) untuk mengajukan berkas perkaranya secara elektronik.

Hingga saat ini, sekitar 30% dokumen pengadilan diajukan secara elektronik oleh profesi hukum. Ketika diajukan secara manual pun, berkas-berkas tersebut akan di-scan ke dalam bentuk .pdf oleh pengadilan. Namun tentu saja tidak semua berkas harus disimpan oleh FCA. Hal ini menjadi topik yang harus dikonsultasikan dan disepakati

oleh para hakim dan para pemangku kepentingan. Namun FCA telah menyiapkan sistem penyimpanan elektronik hingga kapasitas 100 terrabytes, yang sepertinya memadai untuk menyimpan berbagai dokumen pengadilan tersebut.

Inisiatif lain yang sudah diambil adalah mengubah fungsi website Pengadilan menjadi fasilitas untuk menjalankan kegiatan dan menyediakan jasa, daripada sekedar menyampaikan informasi mengenai Pengadilan. Website inilah yang nantinya akan menjadi titik temu dari berbagai pihak, di mana para pengacara bisa masuk ke dalam sistem, memasukkan dokumen mereka, dan berinteraksi secara virtual melalui fasilitasi sistem itu dengan panitera, hakim, dan tentu saja pihak lawan.

Warwick menyatakan bahwa sistem kerja yang baru ini akan berdampak besar bagi FCA. Dia menyadari bahwa nantinya, jika efektif diterapkan pada 2013, terdapat berbagai penyesuaian yang harus dilakukan. Misalnya terhadap profil staf yang akan dibutuhkan ke depan setelah sistem menjadi elektronik, hingga pelatihan dan peningkatan kapasitas staf yang ada untuk mampu beralih dari cara kerja manual ke elektronik, sesuatu yang wajar untuk dikelola di organisasi mana pun yang ingin berubah. Terhadap organisasi FCA sendiri, pengaruh sistem ini perlu diantisipasi. Sebagai contoh, dengan sistem elektronik sebagian besar aktivitas pengadilan sebenarnya bisa dikelola secara terpusat, sehingga sumberdaya yang diperlukan oleh setiap perwakilan FCA di berbagai negara bagian bisa menjadi lebih efisien.

Class Action dan Program Magang Menjadi Topik dalam Pertemuan MA-FCA



BRISBANE | 03 OKTOBER 2012

MA RI bersama Federal Court of Australia (FCA) dan Family Court of Australia (FCoA) kembali akan melakukan penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman mengenai kerja sama yudisial. Penandatanganan MoU tersebut akan dilaksanakan besok (Rabu, 3/10) bertempat di Gedung Federal Court of Australia, Kepaniteraan Brisbane, Queensland, Australia. Sehari menjelang pelaksanaan MoU, digelar pertemuan antara delegasi MA dan petinggi FCA. Topik pertemuan berkisar pada bidang yang menjadi ruang lingkup MoU, diantaranya class action dan program magang

Delegasi MA yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua MA, Dr.H. Hatta Ali, SH, MH, Tuada Uldiltun, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, Tuada Pembinaan, Widayatno Sastrohardjono, SH, M.Sc, Tuada Uldilmil, H. Imron Anwari, SH, SPN, MH, Hakim Agung Prof. Prof. Dr. Takdir rahmadi, SH, LL.M, Hakim Agung Prof. Rehngena Purba, SH, MS, Hakim Agung Dr. Nurul Elmiah, SH, MH, Panitera MA, H. Soeroso Ono, SH, MH, Kepala Biro Hukum Humas, Dr. Ridwan Mansur, SH,

MH, Direktur Tenaga Teknis Ditjen Badilag, Drs. H. Purwosusilo, SH, MH dan tiga orang hakim yustisial MA yang menjadi peserta magang, yaitu Bambang Heri Mulyono, Subur MS, dan Asep Nursobah. Hadir pula dari Tim Asistensi Pembaruan MA: Wiwiek Awiati, Aria Sujudi, Desita Sari. Selain itu, dari pihak AIPJ/AusAid hadir Nicola Colbran, Binziad Khadafi, Dodi Kusardianto, dan Rachel Moore.

Sementara itu dari pihak FCA hadir Chief Justice P.A Keane, Justice Bernard Murphy, Justice Peter Gray, CEO/Panitera FCA, Warwick Soden dan Panitera FCA Kepaniteraan Victoria, Sia Lagos. Hadir pula Direktur Asian Law Center, Melbourne University, Prof. Dr. Tim Lindsey.

Topik yang dibahas dalam pertemuan yang dipimpin oleh CJ P.A Keane ini adalah seputar capaian kerja sama antar pengadilan Indonesia-Australia, pembelajaran Business Process Re-engineering dari program magang, dan gugatan class action. Sebelumnya pertemuan diantarkan oleh pido to Chief Justice P.A Keane dan Justice Grey. Topik capaian kerja sama antar pengadilan disampaikan oleh Warwick

Sodden. Pembelajaran BPR oleh Bambang Heri Mulyono dan Asep Nursobah (peserta magang) dengan pengantar Tuada Pembinaan MA-RI. Sedangkan gugatan class action dipresentasikan oleh Tuada Uldiltun MARI Prof. Paulus E.Lotulung dan Justice Murphy.

Keliling Pengadilan

Sebelum dimulai pertemuan antara delegasi MA-RI dan FCA, Panitera FCA Kepaniteraan Brisbane, Heather Baldwin, mengajak delegasi untuk keliling ke sejumlah ruangan di Kepaniteraan FCA Negara Bagian Queensland. Ruangan yang diperkenalkan ke delegasi MA adalah ruangan sidang elektronik, ruang perpustakaan, dan ruang hakim. Heather Baldwin memberikan penjelasan setiap ruangan yang diperkenalkan, termasuk sejarah berdirinya gedung Kepaniteraan Brisbane. Ia pun melayani setiap pertanyaan yang diajukan oleh delegasi MA. Pertanyaan terbanyak terjadi ketika delegasi MA diajak singgah di ruang sidang elektronik yang dipenuhi dengan komputer dan LCD TV. (asnoer)

Warwick Soden : MA-RI, Best Practice Pengadilan di Dunia Yang Berhasil Melakukan Pembaruan

BRISBANE | 03 OKTOBER 2012

Warwick Soden, Registrar/CEO Federal Court of Australia, menilai Mahkamah Agung sebagai peradilan di dunia yang telah berhasil melakukan pembaruan. Warwick mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan delegasi MA-RI dan FCA, sehari menjelang dilakukan penandatanganan lampiran nota kesepahaman antara MA, FCA, dan FCoA, Selasa (2/10) di Brisbane, Queensland, Australia. Ia bercerita bahwa penilaian terhadap keberhasilan pembaruan MA-RI tersebut diungkapkannya dalam sebuah forum internasional.

"Ketika menjadi pembicara dalam pertemuan Judisial Asia Pasifik saya mendapat pertanyaan dari salah seorang peserta, 'Pengadilan mana di dunia yang bisa dikatakan berhasil melakukan pembaruan?'. Saya jawab dengan tegas Mahkamah Agung Republik Indonesia", kisah Warwick.

Penilaian Warwick terhadap keberhasilan pembaruan MA yang disampaikan pada saat konferensi internasional yang diungkapkan kembali dalam pertemuan MA-FCA, Selasa (2/10) kemarin, bukan basa-basi. Ia mengetahui secara persis apa yang dilakukan oleh MA-RI dalam upaya memecahkan persoalan tunggakan perkara, mewujudkan transparansi pengadilan, pembinaan SDM hingga persoalan independensi badan peradilan.

"Saya mengetahui ketika MA melakukan audit perkara di tahun 2006 sehingga diketahui jumlah perkara yang berada di MA, kemudian membentuk majelis khusus untuk menyelesaikan perkara yang sudah dikategorikan tunggakan", papar Warwick.



Berbicara mengenai audit perkara, Warwick Soden, menyebutnya sebagai sebuah keharusan. Ia mengibaratkan pengadilan sebagai sebuah perusahaan, maka bagi perusahaan stock opname merupakan keharusan. "Tanpa stock of name (audit) kita tidak mengetahui secara persis apa yang dimiliki perusahaan", jelas Warwick.

Ia menambahkan bahwa untuk menyelesaikan persoalan tunggakan, berkas yang sudah berusia melampaui batas waktu penyelesaian perkara agar diberikan tanda warna pada map berkas. Dengan tanda ini, kata Warwick, maka pengadilan akan memprioritaskan penyelesaiannya. (an)



Ketua MA Tandatangani Lampiran MoU dengan FCA dan FCoA



BRISBANE | 03 OKTOBER 2012

Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. H. Hatta Ali, SH, MH, melakukan penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman (MoU Annex) dengan Federal Court of Australia (FCA) dan Family Court of Australia (FCoA), hari ini (Rabu, 3/10), bertempat di Harry Gibbs Commonwealth Law Courts Building, Gedung FCA, Brisbane, Queensland, Australia. Dari pihak FCA penandatanganan dilakukan oleh Chief Justice PA. Keane sedangkan dari FCoA dilakukan oleh Chief Justice Diana Bryant.

MoU antara MA, FCA, dan FCoA terakhir dilakukan pada tanggal 21 Juli 2008 dan diperbaharui setiap tahun melalui penandatanganan lampiran MoU (annex). Sedangkan MoU pertama antar tiga pengadilan ini dilakukan pada tahun 2004. Lampiran MoU berisi tentang kerjasama yudisial bidang tertentu yang berlaku selama satu tahun sebagai penerjemahan dari MoU. Ruang lingkup lampiran MoU tahun ini meliputi bidang mediasi, small claim court, bisnis process reengineering, program magang dan class action.

Ketua MA, Dr. H. Hatta Ali, SH, MH, dalam sambutan setelah seremoni penandatanganan MoU memberikan apresiasi kepada pihak Federal Court dan Family Court yang dalam delapan tahun terakhir ini telah menjalin kerjasama yudisial yang baik dengan MA. Kerjasama yang terjalin dengan baik ini, kata Ketua MA, terjadi ditengah-tengah perbedaan budaya, bahasa, dan sistem hukum. "Meskipun berbeda, kita sama-sama lembaga peradilan, sehingga sama-sama menjunjung supremasi hukum", ujar Ketua MA.

Ketua MA berharap kerjasama judicial antar tiga pengadilan ini, selain manajemen perkara juga diperluas ke bidang access to Justice. "masalah access to justice merupakan masalah mendasar yang dihadapi pencari keadilan di Indonesia", ungkap Ketua MA. Dijelaskan Ketua MA, minimnya sarana dan prasarana, lemahnya manajemen organisasi, proses penganggaran, dan politik legislasi yang tidak responsif memaksa peradilan Indonesia untuk lebih kreatif dan proaktif dalam menjembatani masalah access to justice ini.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut ketua MA, kerjasama yang dipayungi MoU ini akan mengusung isu access to justice yang meliputi penguatan mediasi pada hukum keluarga, gugatan kelas, dan small claim court. "persoalan tersebut sangat aktual bagi peradilan Indonesia", tegasnya.

Ketua MA pun menilai program magang tiga orang hakim di FCA sebagai

langkah yang positif untuk mendukung business process reengineering yang diamanatkan oleh cetak biru. "business process reengineering ini sangat penting karena akan menjadikan penanganan perkara yang lebih responsif, ramah pengguna, dan mampu menghadapi tantangan beban kerja", jelas Ketua MA.

Sementara itu, Chief Justice P.A Keane dalam pidatonya mengungkapkan dirinya sangat terhormat diberi kesempatan untuk memberi dukungan penerbaruan peradilan di Mahkamah Agung. "Meskipun dukungan kami kecil, kami mengucapkan terima kasih atas nama seluruh staf", ungkapnya.

Chief Justice FCA ini memberikan pengesahan terhadap mediasi yang akan dijadikan salah satu fokus dalam lampiran MoU tahun ini. Menurutnya kedudukan mediasi sangat strategis dalam proses manajemen perkara, khususnya dalam penyelesaian perkara. "Mediasi efektif dalam proses access to justice", tegas CJ PA Keane.

Soal access to justice ini juga mendapat perhatian dalam sambutan Chief Justice Family Court of Australia, CJ Diana Bryant. Diana Bryant memberi apresiasi atas capaian access to justice yang diraih oleh peradilan di Indonesia. Menurutnya dengan program access to justice ini, sejumlah orang yang dikategorikan tidak mampu dan marginal bisa mengakses pengadilan, khususnya untuk mendapatkan pengesahan nikah, dan mendapatkan akta kelahi-

ran. Program ini pun, lanjut Diana Bryant, telah berhasil memberikan akses keadilan terhadap perempuan.

Diana Bryant menyebutkan bahwa keberhasilan access to justice di Indonesia, khususnya akses perempuan terhadap peradilan dan pembebasan biaya perkara telah menarik dua jurnal internasional untuk menerbitkan laporannya mengenai kedua hal tersebut.

Hubungan Terunik

Prof. Tim Lindsley, Direktur Asian Law Center Melbourne University, yang bertindak sebagai pembicara pengantar dalam seremoni tersebut menyatakan bahwa pola hubungan kerjasama MA-RI dengan Pengadilan Australia (FCA dan FCoA) adalah hubungan terunik di dunia. "hubungan ini terjalin dengan baik lebih dari dua dekade, padahal terjadi diantara dua negara yang berbeda bahasa, agama mayoritas, budaya, bahkan sistem hukum", jelas Prof. Lindsley.

"Hubungan ketiga pengadilan tetap baik bahkan disaat hubungan politik Indonesia-Australia mengalami dinamika yang cukup memanas", imbu Tim Lindley menguatkan argumentasinya. Prof. Tim menyampaikan langgengnya jalinan kerjasama MA dengan Pengadilan Australia karena sifat hubungan yang universal, sehingga tidak terkendala perbedaan. "Yang berlawanan bisa saling tertarik", ungkapnya mengutip pernyataan seorang Ilmuwan. (an)

FCA : Pengaduan Terhadap Isi Putusan Bukan Ranah Judicial Complaint

BRISBANE | 04 OKTOBER 2012

Kegiatan magang tiga orang hakim yustisial MA di Federal Court tahap kedua dimulai hari ini, Kamis (4/10).

Bidang yang menjadi perhatian pada hari pertama ini adalah persoalan Judicial Complaint. Untuk mengelaborasi topik ini diadakan presentasi dari peserta magang dan pihak Federal Court. Bambang Heri Mulyono menyajikan presentasi tentang Judicial Complain di Mahkamah Agung. Selanjutnya, pihak FCA juga menyampaikan paparan mengenai judicial complain yang berlaku di FCA. Presentasi FCA ini disampaikan langsung oleh CEO Federal Court of Australia, Warwick Soden.



Meskipun rangkaian kegiatan magang secara formal dimulai hari ini, namun sejak dua hari sebelumnya peserta magang dilibatkan dalam serangkaian pertemuan yang menjadi bagian dari kegiatan penandatanganan MoU. Bahkan, pada hari Selasa (2/10) dalam pertemuan delegasi Indonesia dan Australia, diadakan sesi khusus laporan kegiatan magang periode pertama, yang dipresentasikan oleh Bambang Heri Mulyono dan Asep Nursobah.

Dalam presentasi Warwick, tergambar bahwa Pengadilan Federal Australia membuka pintu yang sangat luas terhadap judicial complaint. Hal ini nampak dari dibukanya berbagai media kepada publik untuk mengajukan pengaduan, yaitu langsung kepada petugas pengadilan, melalui telepon, melalui surat, secara elektronik menggunakan website pengadilan, atau menggunakan surat elektronik. Bahkan, jika yang akan mengajukan pengaduan itu memiliki gangguan pendengaran atau bicara, Pengadilan Federal Australia menyediakan protokol khusus. Bukan hanya itu, FCA pun memberikan solusi bagi pihak pengadu yang memerlukan

jasa penerjemah.

Meski FCA membuka pintu selebar-lebarnya terhadap judicial complaint, namun pengaduan yang "anonymous" tidak akan ditanggapi. Si Pengadu harus melengkapi nama, alamat, nomor kontak yang bisa dihubungi dan rincian pengaduan, termasuk nomor perkara, jika yang diajukan mengenai penyelesaian perkara.

Pengaduan Terhadap Isi Putusan Bukan Ranah Judicial Complaint

Kendati FCA membuka pintu yang sangat luas terhadap pengaduan, tidak semua hal bisa diasampaikan melalui jalur pengaduan. "Prosedur judicial complain tidak dapat digunakan apabila substansi pengaduan menyangkut anggapan bahwa putusan pengadilan tidak benar dan tidak adil atau apabila hakim/panitera tidak menangani perkara sesuai hukum acara yang baik", kata Warwick Soden mengutip prosedur judicial complain yang juga dipublish di website FCA.

Jika para pihak tidak setuju dengan putusan yang dijatuhkan, kata Warwick,

mekanisme yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan adalah melakukan upaya hukum banding. Meski demikian, untuk melakukan upaya hukum banding, dalam beberapa kasus memerlukan prosedur izin banding.

Setelah presentasi mengenai judicial complain, dilanjutkan dengan paparan Governance Arrangements in the Supreme Court yang disampaikan oleh Subur Minan Saibi. Presentasi ini mengakhiri kegiatan magang hari pertama. Dijadwalkan pihak FCA akan menyampaikan presentasi mengenai topik yang sama esok hari.

Dalam kedua presentasi ini selain peserta magang, hadir pula Tim dari JRTO yaitu Wiwiek Awiaty, Aria Sujudi, Desita Sari, Nicola Colbran, Binziad Khadafi dan Dodi Kusardianto. Tiga orang yang disebut terakhir ini adalah dari AIPJ/AusAid. Sementara dari FCA hadir Justice Grey, Sia Lagos, dan Andrea Jarrot.



Inilah Cara FCA Mendekatkan Pengadilan Ke Publik



BRISBANE | 05 OKTOBER 2012

Berulang kali CEO dan Panitera Pengadilan Federal Australia, Warwick Soden mengemukakan bahwa mengelola pengadilan laksana mengelola sebuah perusahaan. Bagaimana sebuah produk perusahaan dekat dengan publik, dirasakan ramah oleh pengguna dan diberitakan positif oleh media merupakan hal yang perlu dilakukan juga oleh pengadilan. Di hari kedua program magang (Jum'at, 5/10), FCA membeberkan pengalamannya dalam mendekatkan pengadilan ke publik.

Materi ini selain diikuti oleh peserta magang dan Tim JRTO, hadir pula Ketua Muda Pembinaan MA-RI, Widayatno Sastro Harjono, SH, M.Sc, Hakim Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi dan Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Ridwan Mansur, SH. Sedangkan dari FCA hadir Justice Gray, Warwick Soden, Sia Lagos, dan Andrea Jarrott.

Beberapa pengalaman FCA dalam mendekatkan pengadilan ke publik, sebagaimana

1. Menunjuk staf khusus untuk berhubungan dengan media.

Media, menurut Warwick, berperan besar dalam membentuk opini. Oleh karena itu jangan sampai media memberitakan sesuatu tentang pengadilan yang berakibat pada terbentuknya opini negatif tentang pengadilan. Hal ini bisa terjadi apabila media tidak memiliki informasi yang cukup sehingga informasi yang disajikan tidak utuh. Dengan ditunjuknya petugas khusus, lanjut Warwick, media akan mendapatkan informasi yang lengkap terhadap suatu isu.

Dikatakan Warwick, untuk memastikan informasi yang disampaikan melalui petugas media tepat, maka draft release yang akan disampaikan ke media harus mendapat persetujuan dari

Panitera. Oleh karena itu, kata Warwick, petugas media ini sebelumnya telah mendapatkan pelatihan menghadapi media. Bahkan menurutnya, pelatihan ini diberikan kepada pejabat struktural di FCA.

Dalam kaitannya dengan media ini Warwick mengingatkan bahwa istilah mengatur media sangatlah tidak tepat. "Lebih tepat disebut membantu media dalam menjalankan tugasnya dengan menyediakan informasi yang lengkap", ungkap Warwick.

2. Menyelenggarakan Kompetisi Seni

Untuk mendekatkan pengadilan ke masyarakat, Federal Court of Australia beberapa tahun yang lalu menyelenggarakan National Art Competition bagi

anak sekolah menengah atas (SMU). Dalam kegiatan tersebut, para siswa diperlombakan melukis dengan tema access to justice. Karya terbaik dari perlombaan ini menghiasi gedung pengadilan federal di seluruh Australia. Pengadilan Federal Australia pun memuat hasil karya terbaik national art competition dalam websitenya, lengkap dengan keterangan pelukis dan tema lukisannya.

Menurut Warwick, kegiatan lomba seni nasional yang diselenggarakan pengadilanannya mendapat sambutan luas. "Meski telah berlangsung beberapa tahun yang lalu, masih banyak yang terkenang dan membicarakan lomba ini", ungkap Warwick.

3. Access to Justice masuk kurikulum sekolah

Pengadilan Federal Australia menilai sangat penting memperkenalkan pengadilan ke anak sekolah. Oleh karena itu, pihak pengadilan federal berkoordinasi dengan pihak pemegang otoritas di bidang pendidikan agar isu access to justice masuk ke kurikulum sekolah. Selain dengan pendekatan kurikulum, FCA pun membuat video educational mengenai tugas pokok dan fungsi pengadilan yang dikhususkan untuk anak-anak sekolah.

4. Membuat Video Profile Pengadilan

Informasi yang disajikan dengan audio visual akan memiliki daya tarik lebih dibanding dengan informasi tulisan. Pesan yang disajikan melalui audio visual relatif lebih berkesan. Oleh karena itu, FCA membuat video profile pengadilan dengan berbagai topik. Mulai dari tugas pokok hingga layanan yang diberikan pengadilan. Yang menarik video-video tersebut dibuat oleh sumber daya yang ada di FCA sendiri. "Kami membuat video ini sendiri, tanpa bantuan pihak ketiga", kata Warwick Soden.

Video-video tersebut selanjutnya diupload di website, sebagian didistribusikan, bahkan diantaranya ada yang ditayangkan sebagai iklan layanan masyarakat di televisi nasional Australia.

5. Menyelenggarakan Moot Courts

Selain menyasar anak remaja di sekolah tingkat menengah dengan lomba seni, kurikulum access to justice dan video educational, Pengadilan Federal Australia membuka pengadilannya untuk pelaksanaan moot courts bagi mahasiswa sekolah hukum. Selain bagian dari kegiatan akademik, diharap-

kan moot court akan menjadikan profesi di pengadilan menarik bagi para mahasiswa. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Federal menjadikan lulusan terbaik sekolah hukum sebagai associate judge yang akan membantu hakim dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan.

6. Memberikan Layanan Kiriman Informasi Melalui e-mail

Satu lagi "kreativitas" Pengadilan Federal Australia untuk mendekatkan pengadilannya ke publik, yaitu melalui layanan kiriman informasi putusan melalui e-mail. Melalui layanan ini, siapapun bisa mendapatkan putusan pengadilan terbaru yang dikirim melalui e-mail. Untuk mendaftarkan layanan ini, seseorang tinggal melakukan registrasi di website FCA. Selanjutnya sistem di FCA akan mengirimkan putusan terbaru ke e-mail yang didaftarkan.

7. Membuat Practice Note

Untuk memudahkan publik berperkara di pengadilan, FCA membuat petunjuk praktis cara mengajukan perkara. Dari mulai persyaratan dokumen, cara pengiriman dokumen, cara pembayaran, hingga bagaimana pengadilan memproses perkara dibuatkan practice note. Practice Note yang dibuat oleh Chief Justice ini dimuat di website FCA.

8. Memuat A-Z Informasi Pengadilan di Website

Bagi FCA, website adalah representasi kantor pengadilan di dunia maya. Semua informasi tentang pengadilan ada di website. Sehingga ketika seseorang berkunjung ke halaman website pengadilan federal maka ia akan mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan tentang pengadilan. (an)



Melbourne Magistrates' Court: Bukan Pengadilan Biasa



MELBOURNE | 09 OKTOBER 2012

Setelah satu minggu melakukan rangkaian kegiatan magang (dan MoU) di Federal Court Kepaniteraan Negara Bagian Queensland di Brisbane, mulai Senin kemarin (8/10) delegasi MA-RI meneruskan kegiatan magang di Federal Court Kepaniteraan Negara Bagian Victoria di Melbourne. Aktivitas magang di hari pertama adalah kunjungan ke Melbourne Magistrates Court (MMC). Meski kunjungan ke MMC ini hanya sehari, namun delegasi MA diberikan paparan mengenai 7 (tujuh) materi presentasi secara maraton. Dari presentasi ini tergambar bahwa Melbourne Magistrates Court (MMC) bukan pengadilan biasa.

Sebutan bukan pengadilan biasa ini tidak tanpa alasan. Beberapa gambaran yang didapat dari presentasi dan pengamatan di gedung pengadilan menguatkan pada sebutan tersebut, diantaranya adalah fakta-fakta sebagai berikut:

1. Solution Focus Judging

Menurut Deputy Chief Magistrate, Lance Martin dan Pelaksana Tugas Panitera, Keith Turner, keduanya memberikan paparan di sesi pertama mengenai profil MCC, sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Magistrate berwenang menjatuhkan hukuman yang beragam, diantaranya: pembatalan lisensi/izin, pembayaran denda, hukuman percobaan, Community Based Order (CBO), Intensive Correction Order (ICO), dan penjara (max 2 tahun).

Yang menarik dari pola penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Pengadilan Magistrate adalah diadopsinya konsep penghukuman yang berfokus pada solusi (Solution Focus Judging). Konsep ini terlihat dalam penjatuhan hukuman terhadap orang yang memiliki masalah dengan pengendalian emosi

dan ketergantungan dengan narkoba. Mereka diberikan hukuman yang disebut dengan Community Based Order (CBO) atau juga Intensive Correction Order (ICO). Melalui pola hukuman ini terpidana diperintahkan untuk memasuki program rehabilitasi, counseling, melakukan kerja sosial, atau pembatasan untuk memasuki wilayah yang rawan pelanggaran. "Hukuman pembatasan bepergian ke kawasan tertentu biasanya bagi yang memiliki ketergantungan dengan narkoba. Ini agar mereka tidak terjerumus lagi", ujar Martin. Untuk memastikan mereka masuk program rehabilitasi ini dilakukan oleh badan pengawas dari lembaga pemasyarakatan.

Untuk mendukung konsep pemidanaan yang berfokus pada solusi ini MMC memiliki tiga program, yaitu: CREDIT (Court Referral & Evaluation for Drug Intervention & Treatment), Criminal Justice Diversion Program dan Court Integrated Services Program. Ketiga program tersebut mengarah pada perbaikan diri atau perilaku dari terpidana. Sehingga setelah selesai masa pemidanaan, yang bersangkutan kembali menjadi manusia yang "normal".

2. Petikan Putusan Disampaikan On The Spot

Pengadilan Magistrate Victoria (MCC) bisa disebut sebagai pengadilan tersibuk. Tidak kurang dari 250.00 perkara pidana dan perdata diterima oleh pengadilan ini. Meskipun beban yang menggung, ternyata MCC bisa menyerahkan petikan putusan sesaat begitu persidangan selesai (on the spot). Kecepatan penyampaian petikan putusan ini bisa dilakukan karena MCC menggunakan teknologi informasi. Koordinator IT MCC, Edward Dolceamoore, menunjukkan kepada delegasi MA bagaimana hakim dalam memeriksa perkara langsung menggunakan komputer yang terhubung dengan sistem

yang disebut dengan Court Link. Penggunaan komputer tersebut langsung dilakukan oleh hakim, tanpa bantuan staf pengadilan. Staf pengadilan yang disebut sebagai Bench Clerk bertugas mendokumentasikan dan melakukan digital recording jalannya persidangan. Melalui printer yang ada di Bench Clerk, maka begitu persidangan selesai maka petikan putusan pidana langsung disampaikan.

3. Keamanan Maksimum, Pelayanan Nomor Satu

Sebagai pengadilan tersibuk yang menangani perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, MCC menerapkan standar keamanan yang maksimum. Pintu masuk pengunjung pengadilan hanya satu. Dilengkapi alat pendeteksi barang bawaan berteknologi x-ray ditambah dengan pemeriksaan metal detector. Ibarat masuk ke bandara, maka siapapun yang masuk, tidak ada kompromi, harus melewati prosedur pemeriksaan. Bahkan rombongan pendamping delegasi MA, yaitu Justice Grey dan Registrar FCA Melbourne, Sia Lagos, keduanya tetap diperiksa seperti pengunjung biasa. Penerapan standar keamanan yang maksimum ini untuk memberikan rasa aman terhadap staf pengadilan maupun para pihak. Sehingga penerapan standar keamanan ini menjadi bagian dari access to justice.

Sementara itu dalam rangka memberikan pelayanan kepada pencari keadilan, khususnya dalam pelaksanaan persidangan, MCC membagi jadwal sidang kepada dua termin. Termin pertama sebelum jam 11.30 dan termin kedua setelah jam 14.00. Pembagian ini, menurut Lance Martin, dimasukkan untuk mengurangi penumpukan pihak di waktu tertentu.

4. Law Weeks

Penerapan standar keamanan yang maksimum memberi kesan “anker” terhadap pengadilan magistrate. Namun dalam presentasi Jelena Popovic, Deputy Chief Magistrate, MCC memiliki program yang sangat ramah dengan publik. Program ini diberi nama Law Weeks. Melalui program ini, satu hari dalam seminggu, MCC mengundang masyarakat ke gedung pengadilan. Di forum ini para magistrate akan berdialog dengan masyarakat, bertukar pikiran dan menerima masukan dari masyarakat. Program ini ibarat open house yang dilakukan dalam tradisi idul fitri di Indonesia. Sementara untuk kegiatan pelayanan publik harian, pengadilan magistrate ini mempunyai petugas informasi yang terlatih.

5. Moot Court dan Menerima Kunjungan Anak Sekolah

Pendekatan lain untuk membuat pengadilan dekat dengan publik adalah mengadakan kegiatan pengadilan semu atau moot court. Dengan kegiatan ini para mahasiswa akan datang ke pengadilan, menggunakan fasilitas pengadilan dan memahami tugas pokok dan peran pengadilan. Selain itu, pengadilan magistrate Victoria (MCC), menerima kunjungan anak sekolah

(SMU) ke pengadilan. “pernah di gedung ini berkeliaran 300 siswa SMU, tapi kami menyukainya”, ujar Jelena Popovic.

6. Judicial Mentoring Program

Masih terkait dengan aktivitas pembelajaran, MCC juga mengadakan program mentor judicial bagi mahasiswa hukum yang akan melakukan penelitian di pengadilan. Ketua pengadilan akan menugaskan magistrate atau panitera untuk melakukan bimbingan terhadap mahasiswa yang melakukan penelitian.

7. Menggalang Kegiatan Amal

Satu lagi yang tidak biasa dilakukan pengadilan adalah menggalang kegiatan amal. Disini MCC menggalang dana dari pegawai atau publik yang akan didistribusikan melalui lembaga terpercaya untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya kepada penduduk yang mendapatkan bencana atau peristiwa lainnya. Bukan hanya itu, MCC pun menyediakan makan gratis bagi tunawisma.

Ketujuh kegiatan Pengadilan Magistrate diatas telah berhasil mendekatkan pengadilan ke hati publik. Hal ini

menurut Jelena Popovic menjadi bagian dari access to justice.

Mengenai keberadaan MCC itu sendiri, menurut Deputy Chief Magistrate, Lance Martin dan Pelaksana Tugas Panitera, Keith Turner, adalah pengadilan tingkat pertama dalam sistem hukum negara bagian Victoria yang yurisdiksinya meliputi perkara pidana dan perdata. Di seluruh negara bagian Victoria, menurut Keith Turner, terdapat 52 Pengadilan Magistrate, dengan personil: 114 orang magistrate (53 diantaranya di MCC), 7 Judicial Registrar dan 14 Acting Registrar.

Menurut Lance Martin, Perkara pidana yang menjadi kewenangan Pengadilan Magistrate adalah perkara pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, pencurian (dalam jumlah tertentu), dan lain-lain. Kewenangan dalam ranah perdata pun meliputi seluruh sengketa perdata yang ringan dengan nilai kerugiannya tidak lebih dari AUS 100.000,-. Termasuk kewenangan pengadilan magistrate adalah perkara kekerasan keluarga dan keamanan individu. (an)



Demi Keamanan, Pengadilan Terapkan SOP Tanpa Kompromi

“Keamanan pengadilan merupakan bagian dari Access to Justice”

MELBOURNE | 15 OKTOBER 2012

Agenda magang hari Senin-Rabu (8-10 Oktober) adalah berkunjung ke Pengadilan Magistrate Vitoria, VCAT (Victorian Civil & Administrative Tribunal), dan Supreme Court of Victoria. Setiap kali memasuki gedung pengadilan, sebuah protokol keamanan pengadilan harus dilewati, tanpa kompromi!!!. Meskipun diantara delegasi Indonesia ada Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LL.M yang merupakan hakim agung dan juga ada Justice Grey dari Federal Court of Australia, mereka berdua harus melewati pemeriksaan X-ray dan metal detector. Bahkan, Justice Grey yang sangat dikenal di Victoria sebagai hakim senior di FCA “dipaksa” membuka sabuknya karena perangkat pemindai mengindikasikan ada logam di tubuh yang mulia tersebut.

Penerapan Prosedur Standar Operasi dalam melakukan keamanan pengadilan secara tanpa kompromi tersebut diterapkan untuk meminimalkan resiko gangguan keamanan hingga level terendah (0%). “Pengadilan wajib menjamin keamanan hakim, staf pengadilan dan para pihak yang berperkara”, terang Sia Lagos, Kepala Kepaniteraan FCA untuk negara bagian Victoria. “Keamanan pengadilan merupakan bagian dari access to justice”, imbuhnya.

Pengadilan tidak mau mengambil resiko adanya gangguan keamanan gara-gara memberikan toleransi dari protokol keamanan yang telah ditetapkan. Meski kedatangan delegasi Indonesia menjadi bagian dari program kerjasama bilateral antara pengadilan Indonesia dan Australia, delegasi MA tetap diposisikan sebagai pengunjung pengadilan biasa yang harus mentaati protokol keamanan pengadilan.

Bahkan, ketika delegasi MA akan melakukan observasi persidangan, Panitera (Judicial Registrar) Supreme Court of Victoria, Mark Pedley, tidak dengan mudah membawa del-

egasi menuju ruang sidang. Mark Pedley harus menunggu petugas keamanan berkoordinasi dengan atasannya mengizinkan delegasi MA memasuki ruang sidang tanpa melewati pemeriksaan kedua. Padahal Mark Pedley adalah Panitera di pengadilan tersebut. “Benar-benar penegakan SOP yang patut ditiru”, komentar Prof. Takdir Rahmadi.

Bagian dari protokol keamanan pengadilan, adalah tidak diperkenankannya pengunjung membawa kamera dan alat perekam lainnya. Telepon genggam boleh dibawa tetapi harus dalam keadaan tidak aktif.

Hati-hati dengan Account Facebook

Selain menyangkut sistem keamanan di gedung pengadilan, pengadilan di Australia, khususnya Melbourne Magistrates’ Court, melindungi keamanan hakim di luar pengadilan. Untuk tujuan ini, hakim dan keluarga dekatnya harus menjaga keamanan account social media seperti face book, twitter, linked in, dll. “semua informasi yang menunjukkan pemilik account media jejaring sosial (seperti facebook) sebagai pegawai pengadilan, informasi tersebut harus dihapus”, demikian bunyi aturan yang ada di County Court Judicial Security Reference Guide.

Aturan tersebut tidak melarang hakim memiliki account facebook, yang dilarang adalah menampilkan identitas bahwa ia adalah hakim atau pegawai dari pengadilan. Hal ini untuk menghindari gangguan keamanan atau teror terhadap hakim dan keluarganya berdasarkan informasi yang tertera dari account tersebut.

Selain itu, hakim dan keluarganya bisa meminta otoritas terkait untuk menghilangkan informasi alamat pada buku telepon atau pusat layanan informasi sehingga tidak bisa dilakukan pencarian. (an)



Demi Kualitas Pelayanan, Persidangan Pengadilan dibagi Dua Sesi

MELBOURNE | 15 OKTOBER 2012

Meski Pengadilan di Australia memberlakukan standar keamanan yang tinggi bagi pengunjung pengadilan sehingga terkesan menyeramkan, namun dalam memberikan pelayanan, pengadilan sangat mengutamakan kepuasan para pihak. Mereka memiliki paradigma bahwa mengelola pengadilan laksana mengelola sebuah perusahaan. Maka bagi mereka, pencari keadilan adalah customer. Salah satu wujudnya adalah dalam pengaturan jadwal sidang. Melbourne Magistrates' Court, misalnya, ia membagi jadwal persidangan ke dalam dua sesi, sebelum jam 11.30 dan sesudah jam 13.00.

"Dengan membagi waktu persidangan ke dalam dua sesi, tidak terjadi penumpukan para pihak dan mereka pun tidak terlalu lama menunggu persidangan, bagi yang dijadwalkan siang maka mereka tidak perlu datang

pagi-pagi ke pengadilan", kata Lance Martin, Deputy Chief Magistrate ketika memaparkan informasi tentang Case and List Management & Coordination of The Court, Senin (8/10).

Pengadilan di Australia sangat menghargai waktu untuk para pencari keadilan. Bagi Pengadilan, menentukan jadwal sidang (listing) adalah janji yang harus ditepati oleh hakim. Oleh karena itu, Hakim sangat menghindari untuk tidak hadir pada hari persidangan yang telah dijadwalkan.

"Saya tidak pernah membatalkan persidangan bahkan ketika saya sakit, saya benar-benar memaksakan datang ke persidangan karena saya menghargai mereka yang telah datang memenuhi jadwal yang telah ditetapkan pengadilan", ujar Justice Grey yang telah menjadi hakim di Federal Court

lebih dari 20 tahun ketika melakukan review kegiatan magang.

Pengaturan Jadwal Persidangan

Berbeda dengan pengadilan di Indonesia, di pengadilan Australia urusan pembagian berkas ke hakim dan penentuan jadwal persidangan dilakukan oleh panitera. Dengan sistem ini pembagian berkas ke hakim sangat memperhatikan pemerataan beban kerja. Demikian juga mengenai penentuan jadwal persidangan. Panitera akan menginventarisir kegiatan hakim dalam enam bulan mendatang, termasuk rencana cuti atau liburan atau kegiatan lain. Hal ini dilakukan agar ia tidak melakukan penjadwalan persidangan disaat hakim yang bersangkutan berhalangan hadir. (an)



Membuat Resume Berkas: Solusi Pengurangan Tunggakan Perkara ala Supreme Court of Victoria

MELBOURNE | 15 OKTOBER 2012

Beberapa tahun yang lalu, Supreme Court of Victoria (SCV) masih dirundung masalah tunggakan perkara. Namun ketika delegasi MA berdialog dengan Mark Pedley, Judicial Registrar SCV, Rabu (10/10) lalu, tunggakan perkara tersebut tidak lagi menjadi persoalan. Menurut Pedley, SCV berhasil mereduksi tunggakan perkara hingga 33 perkara tiap bulannya. Lalu apa rahasia SCV berhasil mereduksi tunggakan perkara demikian signifikan.

"Kami membentuk satu unit kerja yang namanya Registry Lawyers yang bertugas menyediakan ikhtisar berkas perkara yang diajukan banding ke Supreme Court", beber Mark Pedley yang didampingi oleh David Tedhams, Deputi Registrar yang mengurus soal banding. Menurut Pedley, petugas Registry Lawyer ini membuat resume berkas menurut template yang sudah ditentukan, resumber berkas tersebut dikirimkan kepada para pihak dan hakim. Para pihak diminta memberikan pendapat terhadap resume yang telah dibuat oleh Registry Lawyer dalam waktu empat belas hari. Jika dalam waktu tersebut tidak memberikan tanggapan, hasil resume berkas tersebut akan disampaikan kepada hakim.

Menurut Pedley, hakim sangat terbantu dengan hasil resume Registry Lawyer tersebut, sehingga sejak diberlakukan sistem ini, produktivitas mereka meningkat secara signifikan. "Sebelum ada Registry Lawyer pengadilan memiliki tunggakan sebanyak 600, kini setelah ada mereka, tunggakan perkara hanya sekitar 200 saja", papar Mark Pedley.

Ketika ditanya mengenai kemampuan Registry Lawyers dalam membuat resume, Pedley mengatakan mereka sangat profesional karena sebagian besar berasal dari Associate Judges Federal Court of Australia. "Hakim disini tidak ada yang komplain dengan pekerjaan mereka", ungkap Pedley.

Dokumen Elektronik

Supreme Court of Victoria sebagai pengadilan tertinggi di negara bagian Victoria memiliki sistem registrasi perkara online yang diberi nama CourtView. CourtView memungkinkan para pihak mengupload seluruh dokumen berkas pengajuan upaya hukum banding. "Kami tidak tergantung dengan berkas fisik, kami juga menerima dokumen elektronik melalui email dan CourtView", jelas Mark Pedley.

Sistem komunikasi dokumen elektronik yang dimiliki SCV juga digunakan untuk mengirim putusan ke para pihak dan pengadilan. Bahkan, SCV akan mengirimkan putusan kepada hakim yang putusannya diajukan banding. "Jadi hakim yang perkaranya diajukan banding akan segera mengetahui apakah putusannya dibatalkan atau dikuatkan dengan argumentasi yang mengiringinya", pungkas Pedley. (an)



Tata Kelola Pengadilan Federal Australia

oleh : Binziad Khadafi

MELBOURNE | 15 OKTOBER 2012

Sistem Peradilan Australia

Sistem peradilan di Australia cukup rumit, dan itu biasa bagi negara yang berbentuk federasi, seperti halnya Amerika Serikat. Ada pemisahan yang cukup tegas antara sistem di tingkat federal (pemerintahan pusat, atau di Australia disebut sebagai commonwealth) dan di tingkat negara bagian (pemerintahan regional, yang lazim disebut sebagai state territory). Meski terpisah, namun terdapat satu lembaga peradilan di level nasional yang mengatasi sekaligus menarik garis pemersatu antara kedua sistem tersebut, yaitu Mahkamah Agung (yang uniknya, di Australia disebut sebagai High Court, bukan Supreme Court). Umumnya hanya perkara hukum terpilih, yang punya implikasi terhadap prinsip-prinsip hukum dasar, yang bisa berujung ke High Court.

Di negara bagian sendiri, lembaga peradilan tertingginya adalah Supreme Court. Di bawahnya terdapat intermediate court, yang secara resmi dinamakan County/District Court. Di bawahnya lagi terdapat Magistrate Court. Di sini pengadilan memeriksa dan memutus semua perkara yang diatur dengan hukum negara bagian, yang bisa berupa perkara perdata, pidana, dan lainnya.

Adapun di tingkat federal, terdapat Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia) yang menangani perkara-perkara perdata berskala nasional, dan Pengadilan Keluarga Australia (Family Court of Australia) yang menangani perkara-perkara hukum keluarga. Di bawah keduanya terdapat Federal Magistrate Court yang dalam waktu dekat akan diubah namanya menjadi Federal Circuit Court. Karena program magang ini diselenggarakan antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Federal, maka ulasan dalam tulisan ini akan berfokus pada struktur Pengadilan Federal.

Struktur Pengadilan Federal Australia

Pengadilan Federal dibentuk melalui Federal Court of Australia Act 1976. Pengadilan ini dipimpin oleh seorang Ketua (Chief Justice), yang mengkoordinasikan para hakim. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Ketua dan hakim Pengadilan Federal dibantu oleh seorang Principal Registrar, yaitu semacam panitera utama yang juga berperan sebagai CEO (chief executive officer), dan seorang District Registrar di setiap negara bagian. Saat ini Principal Registrar Pengadilan Federal dijabat oleh Warwick Soden, sementara District Registrar Victoria misalnya (negara bagian di mana kota Melbourne berada) dijabat oleh Sia Lagos.

Meski semua keputusan kelembagaan harus diambil oleh Ketua Pengadilan Federal dan difasilitasi pelaksanaannya

secara administrasi oleh Principal Registrar, namun para hakim Pengadilan Federal juga memiliki peran yang sangat kuat dalam proses pembentukannya. Peran itu dijalankan para hakim melalui berbagai komite yang bertanggungjawab atas agenda atau isu tertentu. Misalnya terdapat komite yang diketuai salah seorang hakim yang bertanggungjawab atas kebijakan dan perencanaan pengadilan (Policy & Planning Committee). Hakim Peter Gray misalnya, yang mendampingi peserta magang sepanjang program magang Oktober 2012 ini, cukup lama mengetuai Bargain Enterprise Committee, yaitu komite bertugas membantu Principal Registry dalam menegosiasikan gaji dan fasilitas kerja bagi pegawai Pengadilan Federal.

Para ketua komite ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Pengadilan Federal, begitu halnya para anggota komite yang terdiri dari para hakim dan pejabat kepaniteraan. Posisi ketua dan keanggotaan komite bisa berpindah dari waktu ke waktu, tergantung kebutuhan dan tergantung pula pada preferensi hakim yang bersangkutan. Berdasarkan Federal Court of Australia Act 1976, Ketua Pengadilan Federal memang bertanggungjawab untuk memastikan administrasi peradilan berjalan dengan baik, dan untuk itu menentukan struktur pengadilan yang diperlukan. Kewenangan Ketua Pengadilan membentuk berbagai komite ada di bawah tanggungjawab ini.

Adapun di tingkat operasional, Principal Registrar selain dibantu oleh para District Registrar, juga dibantu oleh berbagai satuan kerja lainnya. Merekalah yang di lapangan harus melaksanakan segala keputusan dan arahan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Federal dan para ketua komite. Satuan kerja tersebut terdiri dari Divisi Keuangan, Divisi SDM, Divisi Layanan Informasi dan Perpustakaan, Divisi Layanan Teknologi, serta Divisi Properti dan Fasilitas.

Rapat Pleno Hakim, Court Rules, dan Practice Notes

Selain melalui komite, para hakim Pengadilan Federal juga berkontribusi terhadap jalannya roda organisasi melalui rapat pleno hakim yang diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di akhir Maret dan akhir Agustus. Biasanya rapat bertempat di kota-kota yang mudah dijangkau demi alasan efisiensi. Rapat hakim khusus di luar itu juga bisa diadakan untuk membahas isu-isu spesifik yang urgen. Untuk rapat khusus ini, lokasi selama ini adalah Adelaide karena letaknya paling strategis untuk mengumpulkan hakim dari seluruh penjuru Australia.

Berbagai agenda dan masalah kelembagaan dibahas di rapat tersebut, untuk diolah menjadi rekomendasi sebagai dasar bagi Ketua Pengadilan Federal dalam mengambil keputusan. Di sana dibahas soal kebijakan nasional yang potensial berpengaruh terhadap kerja pengadilan seperti mekanisme penanganan komplain terhadap hakim yang baru diperkenalkan di tingkat federal, atau soal amandemen UU pensiun hakim, juga rencana kebijakan nasional mengenai siaran langsung (live streaming) atas penyelenggaraan sidang pengadilan.

Hal-hal seputar fungsi pokok Pengadilan Federal juga diulas di dalam rapat. Selain soal perkara banding, juga soal peraturan-peraturan (rules) pengadilan, dan pedoman praktek (practice notes) yang akan dikeluarkan pengadilan. Rules dan practice notes biasanya dihasilkan dalam rapat pleno hakim ini. Rules dan practice notes adalah pedoman yang dikeluarkan pengadilan untuk melengkapi UU, mengisi kekosongan hukum acara, yang diarahkan terutama pada profesi hukum.

Practice notes paling banyak memberi arahan soal manajemen perkara dan berbagai formulir pengadilan. Practice notes yang paling luas dikenal barangkali pedoman mengenai bagaimana dokumen pengadilan harus dibuat, yang mengatur soal ukuran halaman, ukuran huruf dan paragraf, yang mengikat tidak hanya hakim dan staf pengadilan, tetapi juga para pengacara. Practice notes dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Federal berdasarkan masukan para hakim.

Yang membedakan practice notes dari rules adalah urgensi materinya. Jika materinya sangat penting, suatu pedoman harus dikeluarkan dalam bentuk court rules.

Tidak kalah penting, berbagai masalah administrasi kelembagaan juga dibicarakan para hakim di rapat pleno hakim. Seperti soal pengangkatan dan pensiun hakim maupun staf-staf kunci pengadilan, pengelolaan keuangan, pelatihan hakim dan staf, dan lain-lain. Di rapat ini biasanya para hakim akan mendengarkan laporan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Federal dan para ketua komite mengenai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab mereka. Bahkan laporan akuntabilitas perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan para hakim dan pejabat Pengadilan Federal juga disampaikan di sini.

Semua hal yang dibahas di rapat pleno lalu dibuatkan kesimpulannya oleh Ketua dan Principal Registrar. Apa saja isu-isu kunci yang diputuskan, bagaimana rencana implementasinya, pertimbangan waktu, implikasi finansial, sampai ke kebijakan yang harus mengikutinya, disimpulkan ke dalam sebuah laporan. Laporan ini lalu biasanya disarikan ke dalam bentuk newsletter yang diedarkan di antara para hakim Pengadilan Federal di seluruh Australia. Ulasan singkat mengenai program magang staf MA RI juga dimuat dalam newsletter terbitan terakhir, sebagai bentuk akuntabilitas dari penyelenggaraannya (Binziad Kadafi)



Magistrate Court of Melbourne, Pengadilan Paling Sibuk di Negara Bagian Victoria

oleh : Binziad Khadafi



MELBOURNE | 15 OKTOBER 2012

Struktur Magistrate Court

Sebagaimana telah dijelaskan di beberapa tulisan sebelum ini, struktur lembaga peradilan di tingkat negara bagian di Australia terdiri dari Mahkamah Agung (Supreme Court), yang merupakan pengadilan lokal tertinggi. Di bawah Supreme Court terdapat County Court, yang mungkin sepadan dengan Pengadilan Tinggi di Indonesia. Di bawah County Court terdapat Magistrate Court yang merupakan tingkat pengadilan paling rendah di negara bagian Victoria.

Magistrate Court di Australia memiliki 114 orang hakim (magistrates), yang tersebar di 11 region di seluruh Victoria (termasuk region Melbourne). Selain para hakim tersebut, terdapat 14 orang acting magistrates yang diangkat, yaitu hakim yang sesungguhnya telah memasuki masa pensiun, namun dianggap masih mampu dan layak untuk ditugaskan sebagai hakim cadangan, terutama ketika pengadilan menghadapi masalah dengan tuntutan perkara.

Setiap hakim ditugaskan di region tertentu untuk umumnya selama 3 tahun. Meski berada di dalam satu struktur, namun masing-masing region dari Magistrate Court dikelola secara otonom. Setiap region Magistrate Court



Yurisdiksi Magistrate Court

Yurisdiksi Magistrate Court adalah perkara pidana dan perdata. Untuk yurisdiksi pidana, perkara yang ditangani Magistrate Court terutama semua perkara pidana ringan, atau perkara pidana yang indictable namun bisa diperiksa dan diputus dengan acara cepat, seperti pencurian atau penyalahgunaan narkoba ringan.

Berdasarkan data statistik, perkara pidana yang paling banyak ditangani Magistrate Court (sesuai peringkatnya) adalah perkara di mana terdakwa mengemudikan kendaraan di jalan tol tanpa izin. Selanjutnya perkara pencurian, kemudian mengemudikan kendaraan dengan kecepatan berlebih, mabuk saat mengemudi, penyerangan secara fisik (assault), menyerobot properti, menimbulkan cedera, hingga kepemilikan narkoba.

Putusan/hukuman yang dikeluarkan oleh Magistrate Court bisa terdiri dari bermacam jenis. Kemungkinan pertama adalah putusan lepas (dismissal); kemudian peringatan (adjourne undertaking); lalu denda (fine); selanjutnya kerja sosial (community correction order); hukuman percobaan (suspended sentence); hingga pidana penjara (imprisonment).

Selain itu Magistrate Court juga menangani perkara pidana yang lebih khusus, dalam hal ini perkara kekerasan di dalam rumah tangga (family violence) atau perkara yang menyangkut keamanan pribadi seseorang (personal safety). Biasanya untuk perkara-perkara ini, selain putusan, Magistrate Court juga mengeluarkan perintah pengadilan (intervention order) yang tujuannya untuk membantu melindungi korban dari kekerasan lebih lanjut. Kebutuhan para korban pun coba dipenuhi oleh Magistrate Court melalui Victim of Crime Assistance Tribunal (VoCAT). Tribunal ini membantu para korban kekerasan untuk terbebas dan pulih dari dampak kekerasan yang dialaminya. Perintah yang dikeluarkan oleh Tribunal ini bisa bermacam-macam, seperti konsultasi dengan psikolog, atau menjalani program pelatihan tertentu.

Ada beberapa yurisdiksi khusus lainnya dalam Magistrate Court, yang mungkin di Indonesia bisa disamakan dengan pengadilan khusus. Seperti misalnya Koori Court, yaitu pengadilan yang menangani perkara terkait dengan suku Aborigin yang didesain dengan atmosfer lebih informal dari pengadilan biasa. Lalu ada pula NJC (Neighborhood Justice Center) yang sepadan dengan sitting platz di Indonesia, yang menangani sengketa-sengketa di tingkat lokal, namun lengkap dengan layanan mediasi dan intervensi pengadilan bagi penyelesaian masalah (seperti konsultasi psikologi/counselling, perencanaan keuangan/financial planning, dll).

Ada pula Assessment & Referral Court (ARC) yang menangani perkara pidana yang melibatkan masalah kejiwaan, seperti pelaku pidana yang memiliki gangguan mental dan harus dirujuk pada penanganan medis ketimbang penjara. Untuk yurisdiksi perdata, perkara yang ditangani Magistrate Court adalah yang nilai gugatannya secara aktual bernilai di bawah AUD 100.000 (sekitar Rp. 1 milyar di Indonesia). Tidak ada keterangan mengapa nilai tersebut yang digunakan. Pihak Magistrate Court yang ditanyai mengenai alasan di balik nilai tersebut tidak tahu selain merujuk pada UU. Perkara yang umum muncul adalah jaminan kerja, seperti kompensasi terhadap kecelakaan kerja, atau sengketa industrial, misalnya sengketa antara buruh dan perusahaan mengenai fasilitas kerja.



Beban Perkara Tinggi Tidak Menghalangi Kualitas & Konsistensi Putusan

Secara garis besar, Magistrate Court menangani hampir 90 % dari seluruh perkara yang ditangani seluruh pengadilan di Victoria. Pada 2011–2012 saja, Magistrate Court menangani 180.731 perkara pidana, 36.836 perkara perdata, dan 40.556 perkara kekerasan dalam keluarga (family violence) dan keamanan pribadi (personal safety). Perkara yang ditangani Magistrate Court bisa selesai antara 3 menit sampai dengan 144 hari. Namun rata-rata, sebuah perkara (baik perdata maupun pidana) diselesaikan dalam waktu 6 bulan.

Guna mendorong kualitas dan konsistensi putusan, Magistrate Court memiliki program yang mengumpulkan dan mengelola data mengenai putusan guna mendapatkan gambaran umum tren penghukuman yang digunakan para Magistrate. Selain itu pendidikan dan pelatihan hakim, yang sifatnya wajib selama 2–3 hari dalam 1 tahun, juga digunakan sebagai media untuk menanamkan pemahaman tentang pentingnya kualitas dan konsistensi putusan, serta media untuk membahas kecenderungan putusan di antara para hakim.

Karena kualitas dan konsistensi putusan yang terus didorong itulah mengapa hanya 10%–15% putusan Magistrate Court yang diajukan banding. Hal ini tentu menunjukkan kepuasan pencari keadilan atas putusan Magistrate Court. Apalagi mengingat putusan yang dihasilkan Magistrate Court mulai diarahkan pada konsep solution focused judging (putusan yang berfokus pada penyelesaian masalah).



Akrab dengan Teknologi

Seperti halnya pengadilan lain di Australia, yang menggunakan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan inovasi terhadap cara kerja pengadilan, Magistrate Court juga tidak lepas dari sentuhan teknologi. Di Magistrate Court telah diterapkan sistem administrasi peradilan yang dinamakan *electroning filing system*. Para pengacara dapat berkomunikasi melalui sistem tersebut terutama untuk mendapatkan jadwal persidangan yang pasti, mengajukan permohonan untuk menggunakan fasilitas videolink di persidangan (semacam teleconference untuk perkara-perkara di mana saksi harus dilindungi atau pihak-pihak yang didengar berada di lokasi yang jauh dari pengadilan), permintaan terhadap peringatan pengadilan (*adjournment*), dan lain-lain. Magistrate Court menjamin sepenuhnya bahwa berbagai permintaan yang diajukan melalui *elctronic filing system* tersebut akan direspon secara tepat waktu.

Teknologi juga digunakan secara optimal di ruang pengadilan. Dalam memimpin persidangan, hakim dilengkapi oleh sebuah sistem di mana mereka dapat menginput seluruh informasi yang relevan termasuk hukuman yang dijatuhkan, lalu sistem tersebut akan mengantarkan mereka pada sebuah form (template) ringkasan putusan yang bisa segera dicetak melalui sebuah printer yang terkoneksi. Ringkasan putusan inilah yang bisa segera diberikan hakim kepada para pihak. Adapun putusan lengkapnya sendiri, harus dibuat hakim dalam waktu 3 bulan sesudahnya.

Di ruang sidang juga terdapat alat rekam (*digital audio recording*) yang merekam seluruh percakapan dalam proses yang terjadi di ruang sidang. Alat ini dioperasikan oleh seorang petugas ruang sidang (*court clerk*) di mana hasil rekamannya harus disimpan (menurut UU) selama 1 tahun. Tujuan perekaman sidang ini adalah untuk menyediakan dokumentasi yang lengkap mengenai proses persidangan, yang tentu saja bermanfaat dalam menjaga integritas proses persidangan, yang setiap saat bisa jadi rujukan para pihak atau bahkan hakim ketika ada yang mempertanyakan persidangan tersebut.

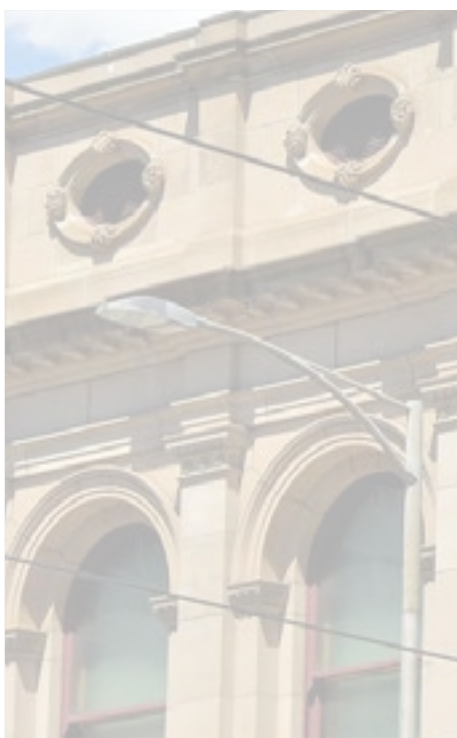
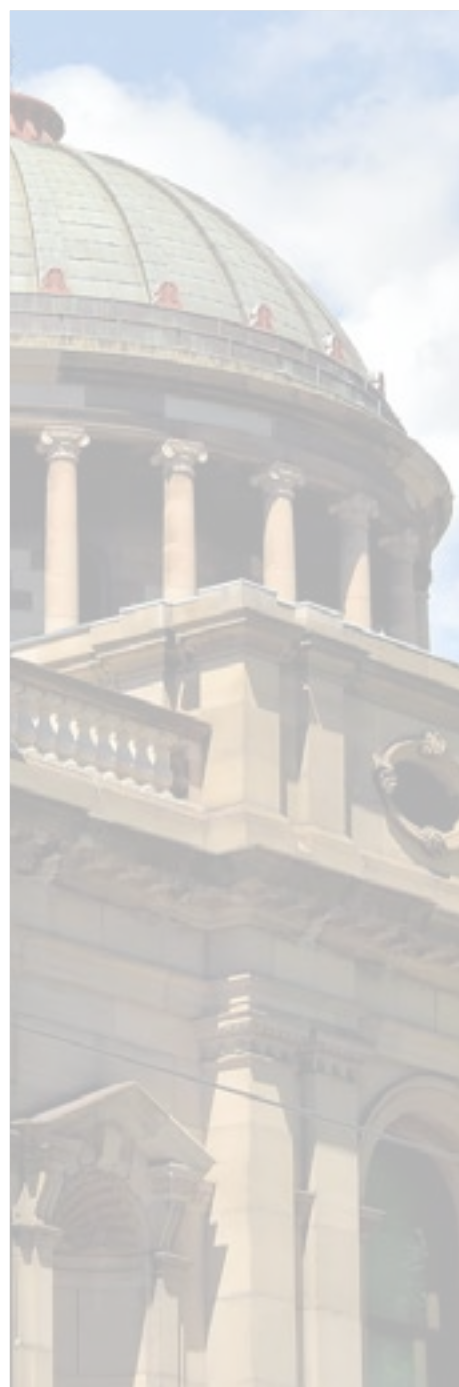
Para pihak dapat meminta salinan rekaman tersebut dari pengadilan dengan membayar AUD 55 untuk setiap rekaman per-hari sidang. Transkrip atas rekaman tersebut tidak disediakan, jadi hanya berupa audio. Namun untuk perkara pidana yang serius, yang akan dirujuk ke pengadilan yang lebih tinggi (*committal cases*), transkrip umumnya dibuat oleh pengadilan.

Selain itu dikenal pula *supression order*, yaitu perintah pengadilan untuk menjaga kerahasiaan transkrip persidangan untuk perkara-perkara tertentu yang sangat khusus (umumnya yang melibatkan perlindungan saksi). Rekaman tersebut baru bisa dibuka dan diberikan pada para pihak jika ada perintah hakim yang mengizinkan setelah mempertimbangkan antisipasi risikonya. (Binziad Kadafi)

Sisi Lain Mahkamah Agung Victoria: Penyelesaian Tunggakan Perkara dan Penguatan Status Dokumen Elektronik Putusan

MELBOURNE | 15 OKTOBER 2012

Pada Selasa, 10 Oktober 2012, delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) melakukan kunjungan untuk berdiskusi dengan dan mengobservasi persidangan di Mahkamah Agung (Supreme Court) negara bagian Victoria, Australia, yang berkedudukan di Melbourne. Delegasi MARI terdiri dari Prof. Takdir Rahmadi, Dr. Ridwan Mansyur, Asep Nursobah, Subur Minan Sibi, Bambang Hery Mulyono, Budi Prasetyo Muso, dan Lukas Prakoso. Hadir pula perwakilan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, Wiwiek Awiati dan Desita Sari, serta perwakilan AIPJ dan AusAID, Nicola Colbran, Binziad Kadafi dan Doddy Kusadrianto. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, para pejabat Victoria District Registry dari Pengadilan Federal Australia, Sia Lagos, David Priddle, dan Andrea Jarrat.



Diskusi diawali dengan presentasi oleh Mark Predley, Judicial Registrar, dan David Tedhams, Deputy Registrar (Legal), dari Court of Appeal Mahkamah Agung Victoria. Keduanya secara bergantian menceritakan mengenai berbagai aspek dari pengadilan tempat mereka bekerja, sambil menjawab berbagai pertanyaan kritis yang diajukan oleh delegasi Indonesia.

Sekilas Mahkamah Agung Negara Bagian Victoria

Mahkamah Agung Victoria sebagai pengadilan banding (court of appeal) mulai beroperasi pada 1995. Yurisdiksi Mahkamah Agung Victoria adalah memeriksa dan memutus perkara banding pidana dan perdata yang berasal dari Trial Division Mahkamah Agung Victoria sendiri, dan dari County Court (semacam Pengadilan Tinggi). Selain itu Mahkamah Agung Victoria juga menerima perkara banding atas putusan dari Victoria Civil & Administrative Tribunal (VCAT).

Patut dicatat bahwa perkara-perkara pidana yang sangat serius seperti pengkhianatan terhadap negara (treason), pembunuhan (murder), dan pidana berat lainnya, serta perkara perdata yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar, terlebih jika perkara-perkara tersebut mengandung persoalan hukum (question of law) yang rumit dan mendasar, dapat ditangani di tingkat pertama oleh Mahkamah Agung Victoria. Terdapat sebuah Divisi khusus di dalam Mahkamah Agung Victoria yang menangani perkara-perkara ini. Divisi tersebutlah yang dinamakan Trial Division, yang dipimpin oleh seorang Ketua (Chief Justice), beberapa hakim (trial judges dan associate judges) dan panitera. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Mahkamah Agung Victoria terdiri dari 2 bagian, yaitu Court of Appeal yang dipimpin oleh seorang President, dan Trial Division tersebut.

Struktur Mahkamah Agung Victoria terdiri dari 12 orang hakim, termasuk Chief Justice dan President dari Court of Appeal. Saat ini keseluruhan jumlah hakim hanya 10 orang, karena 2 orang baru saja memasuki masa pensiun. Umumnya para hakim Mahkamah Agung Victoria berasal dari advokat (barrister dan solicitor) ternama, akademisi di bidang hukum, atau para hakim dari pengadilan lain seperti County Court. Mereka dinominasikan oleh Jaksa Agung negara bagian (Attorney General) untuk diangkat oleh parlemen setelah mendengar masukan mengenai kemampuan dan integritas mereka, baik dari komunitas hukum maupun masyarakat luas. Para hakim ini dibantu oleh sekitar 22 orang staf Kepaniteraan.

Diskusi dan observasi yang dilakukan kali ini adalah mengenai Court of Appeal dari Mahkamah Agung Victoria. Hukum acara dan sistem administrasi peradilan Mahkamah Agung Victoria diatur melalui UU (Acts of Parliament), berbagai peraturan pengadilan (Court Rules), dan petunjuk/pedoman praktek (Practice Notes) yang dikeluarkan oleh pengadilan. Saat ini Mahkamah Agung Victoria menerima sekitar 600 perkara banding setiap tahunnya, yang terdiri dari 350 perkara pidana dan 250 perkara perdata. Sekilas memang tampak bahwa beban perkara tersebut sangat kecil. Namun patut diketahui bahwa di balik itu terdapat berlipat-lipat permohonan banding yang harus diperiksa oleh hakim tunggal di Mahkamah Agung Victoria, untuk menentukan apakah permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk menjadi perkara banding atau tidak (dikenal sebagai proses leave application). Hampir semua perkara banding pidana harus menempuh proses leave application, sementara di perkara perdata hanya sebagian kecil yang membutuhkan leave.

Seluruh perkara banding di Mahkamah Agung Victoria diperiksa dan diputus melalui sidang yang terbuka untuk umum. Di yurisdiksi pidana, hampir 45% perkara banding mempersoalkan mengenai pemidanaan (sentencing), 25% mempersoalkan pernyataan bersalah (conviction), dan sekitar 25% menguji keduanya. Terdapat 5% perkara banding lainnya yang mempersoalkan hal-hal lain. Jenis perkara pidana yang diajukan banding di Mahkamah

Agung Victoria umumnya kejahatan seksual, lalu kejahatan terhadap harta benda, kejahatan narkoba, pembunuhan, dan penganiayaan. Mahkamah Agung Victoria belum lama mengadopsi sistem banding pidana yang baru sejak 2011, dan akan mengadopsi sistem banding perdata baru pada 2012/2013. Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara banding pidana, mulai dari pendaftaran hingga penyampaian putusan kepada para pihak adalah 11 bulan. Adapun perkara banding perdata umumnya diselesaikan dalam waktu 8,5 bulan.

Peran Substantif Staf Kepaniteraan dan Asisten Hakim dalam Penyelesaian Tunggakan Perkara

Sistem banding pidana yang baru sangat bergantung pada dokumen banding yang lebih detail yang diajukan oleh pemohon banding serta pada manajemen perkara yang lebih intensif yang dikerjakan oleh Kepaniteraan. Dalam sistem baru ini, Kepaniteraan diwajibkan untuk membuat ringkasan (summary) atas setiap perkara yang masuk, untuk kepentingan hakim maupun untuk kepentingan para pihak. Sebelum dikirimkan kepada hakim, ringkasan perkara tersebut akan dikirimkan terlebih dulu kepada para pihak untuk menanyakan apakah ringkasan yang dibuat sudah tepat. Para pihak diberi waktu 7 hari untuk menyampaikan masukkannya. Hakim sangat terbantu dengan tersedianya ringkasan perkara ini.

Sistem banding pidana baru ini berhasil mengurangi tunggakan perkara banding pidana di Mahkamah Agung Victoria dari semula sekitar 600 perkara menjadi hanya 200 perkara. Tentu saja sistem ini membutuhkan investasi sumber daya manusia tersendiri di lingkungan Kepaniteraan. Setidaknya terdapat 9 orang staf (disebut legal officer) yang berlatar belakang hukum yang harus direkrut untuk menjalankan tugas ini. Posisi tersebut, meski baru ada kurang dari setahun, diyakini akan menjadi posisi yang prestisius di Victoria mengingat peran pentingnya dan syarat keahliannya. Saat ini saja, sebagian legal officer di Mahkamah Agung Victoria berasal dari mereka yang pernah bekerja di Mahkamah Agung Amerika Serikat (US Supreme Court) dan mereka yang sebelumnya menjadi asisten hakim di Pengadilan Federal Australia (yang juga merupakan posisi prestisius).

Selain legal officer di Kepaniteraan, peran substantif asisten hakim di Mahkamah Agung Victoria juga sangat penting. Misalnya guna mendorong konsistensi putusan, setelah putusan didraf oleh hakim yang bersangkutan, para asisten akan diminta untuk membuat ringkasan atas putusan tersebut.



The Supreme Court Of Victoria
210 William St, Melbourne VIC 3000, Australia



“Kualitas dan konsistensi putusan di Victoria juga disumbangkan oleh praktek yang baik.”

Binziad Kadafi

Ringkasan draf putusan tersebut akan dikirimkan kepada President Court of Appeal untuk disirkulasikan kepada para hakim guna diketahui. Jika ada isu hukum spesifik yang harus didekati secara hati-hati karena implikasinya terhadap tatanan hukum, ringkasan draf putusan tersebut akan dikirimkan kepada sekelompok hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan, untuk mendapat tambahan pertimbangan dan masukan, sebelum resmi diputus.

Untuk mendapat gambaran yang utuh, delegasi Indonesia berkesempatan untuk mengobservasi secara langsung jalannya persidangan atas perkara pidana dan perdata di Mahkamah Agung Victoria. Sidang perkara pidana yang diobservasi sebagian delegasi, dipimpin langsung oleh Chief Justice Marilyn Warren dengan 2 anggota majelisnya yang merupakan hakim senior. Salah satu perdebatan yang menarik yang terjadi antara seorang anggota majelis hakim dengan pembela (barrister) adalah mengenai konsistensi putusan. Keduanya saling mengajukan argumen yang merujuk pada berbagai putusan pengadilan sebelumnya mengenai perkara sejenis. Dalam perdebatan ini, peran substantif asisten hakim kembali mengemuka. Merekalah yang harus memilah dan menyediakan informasi putusan terdahulu yang relevan kepada para hakim, melalui komputer yang terkoneksi dengan intranet Mahkamah Agung dan dengan komputer di meja para hakim.

Percepatan Penyampaian Putusan kepada Para Pihak dan Hakim yang Putusannya Dibanding secara Elektronik

Teknologi informasi juga sudah menjadi bagian integral dari tata kerja Mahkamah Agung Victoria di mana dokumen perkara dapat diunggah secara elektronik secara kronologis untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen manual. Dokumen perkara juga dapat diterima melalui email untuk kemudian bisa diunggah ke dalam sebuah sistem yang di Mahkamah Agung Victoria dinamakan CourtView.

Sebagai manfaat langsung dari penerapan teknologi informasi, putusan Mahkamah Agung Victoria bisa dikirimkan kepada para pihak langsung melalui email selain diunggah di website. Putusan elektronik tersebut akan

memuat scan tandatangan hakim dan menggunakan lambang (seal) Mahkamah Agung Victoria. Umumnya dokumen elektronik putusan tersebut sudah dianggap memadai oleh para pihak. Meski para pihak sebenarnya bisa tetap datang ke Mahkamah Agung Victoria untuk mendapatkan salinan manual putusan, namun hal itu jarang sekali dilakukan. Hanya terpidana yang tengah menjalani penahanan dan karenanya tidak memiliki akses internet, yang dirasa perlu dikirim versi manual dari putusan.

Sebenarnya ketergantungan terhadap dokumen manual belum lama ditinggalkan di Victoria. Kecukupan (sufficiency) dan legalitas dokumen elektronik kadang masih dipertanyakan. Namun keberhasilan membangun kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Mahkamah Agung Victoria termasuk tata kelolanya, menjadikan transisi dari penggunaan dokumen manual ke dokumen elektronik tersebut bisa berjalan lebih mulus. Masyarakat dan para pemangku kepentingan percaya bahwa setiap dokumen yang dikeluarkan Mahkamah Agung Victoria adalah dokumen sah dan memiliki kekuatan hukum. Apalagi masyarakat diajak memahami bahwa pendekatan ini jelas menghasilkan efisiensi dalam sistem administrasi peradilan yang terbukti memangkas waktu dan jalur birokrasi bagi para pihak untuk mendapatkan putusannya. Sesuatu yang sangat penting bagi pemenuhan prinsip peradilan yang cepat bagi pencari keadilan.

Selain kepada para pihak, putusan banding juga dikirimkan melalui email kepada hakim yang putusannya diperiksa di tingkat banding, baik yang dikuatkan maupun dibatalkan. Tujuan hal ini dilakukan adalah selain bentuk penghormatan pada hakim yang bersangkutan, juga untuk menghidupkan diskusi mengenai putusan di internal peradilan, di mana hakim yang putusannya dibanding bisa membandingkan dan memetik pelajaran dari bagaimana hakim yang lebih tinggi membuat pertimbangan atas perkara yang sama. Kualitas dan konsistensi putusan di Victoria juga disumbangkan oleh praktek yang baik ini. (Binziad Kadafi)





Hari ini, Program Magang MA-RI di FCA Dimulai

SYDNEY | 30 SEPTEMBER 2014

Program Magang Mahkamah Agung RI di Pengadilan Federal Australia Tahun 2014 dimulai hari ini, Senin (29/9). Program ini diikuti oleh empat orang hakim yustisial MA, yaitu Lilliek Prisbawono Adi, Frensita K. Twinsani, Sumartanto dan Asep Nursobah. Turut serta juga Senior Manager AIPJ bidang Reformasi Pengadilan, Binziad Kadafi. Mereka akan mengikuti program ini dalam dua tahap. Tahap pertama mulai hari ini hingga 10 Oktober mendatang. Sedangkan tahap kedua, direncanakan enam bulan mendatang setelah magang pertama selesai.

Fokus kegiatan magang ini adalah tentang penyelenggaraan manajemen perkara di Pengadilan Federal

Australia. Diantara aspek manajemen perkara yang menjadi fokus, implementasi Electronic Court File adalah fokus utamanya.

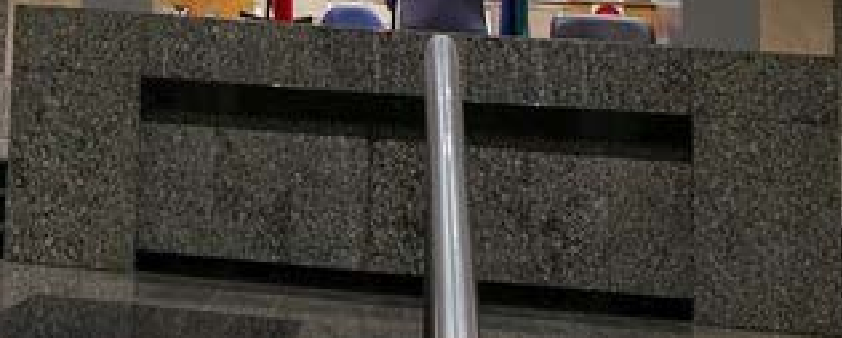
Hari ini para peserta magang akan berada di Pengadilan Federal Australia Kepaniteraan New South Wales di Sydney. Selama dua hari mereka berada di Sydney untuk bertemu dengan Chief Justice. Selanjutnya, program magang akan dilanjutkan di Kepaniteraan Victoria, Melbourne

Ada dua fokus perhatian selama di Sydney, pertama mengenai strategi manajemen perubahan yang diterapkan oleh FCA dalam merubah proses manual ke sistem kerja elektronik dan kedua, mengenai strategi manajemen perubahan melalui media. (an)



AUSTRALIA

HIGH COURT OF AUSTRALIA
FEDERAL COURT OF AUSTRALIA
FAMILY COURT OF AUSTRALIA
ADMINISTRATIVE APPEALS TRIBUNAL





Gedung FCA Dibangun Di atas Filosofi Access to Justice



SYDNEY | 30 SEPTEMBER 2014

Bagi pengadilan, *access to justice* adalah ruh yang harus menjiwai semua aspek, dari mulai standarisasi layanan bahkan hingga desain gedung. Ketika gedung pengadilan dibangun, filosofi *access to justice* ini harus menjadi fondasinya. Kenapa ruang sidang berada di bagian samping gedung dengan kaca yang besar sehingga menyerap cahaya yang banyak, itu tidak lain simbolisasi *access to justice*.

Demikian disampaikan Warwick Sodden, Registrar/CEO Federal Court of Australia kepada peserta magang di acara Welcome and Tour of The NSW Registry. Di acara ini, para peserta diajak memasuki ruangan-ruangan penting di Pengadilan Federal, seperti ruang hakim, ruang judge associate (asisten hakim), ruang sidang, dan ruang mediasi.

“Ruang sidang yang berada di bagian samping gedung adalah simbol keterbukaan dan terkoneksiya pengadilan dengan dunia luar, sedangkan jendela kaca adalah gambaran pengadilan untuk senantiasa menemukan kebenaran”, jelas Warwick Sodden.

Bukan hanya soal konsep gedung dan design interior yang dijiwai filosofi *access to justice*, kualitas sound system di ruang sidang pun demikian. Warwick menjelaskan bahwa sound system di ruangan sidang harus dipastikan berkualitas tinggi. Sehingga orang yang berada disudut manapun dapat men-

engar dengan jelas apa yang disampaikan selama proses persidangan. “Sound System pun merupakan bagian dari *access to justice*”, tegas Warwick.

Ruang Sidang Berteknologi

Ruang di Federal Court of Australia nampak sangat mewah dengan fasilitas berteknologi tinggi. Layar untuk video conference, digital recording device, pesawat telpon, beberapa komputer untuk hakim dan panitera sidang, faksimile, dan sound system dengan high definition. Disamping itu terdapat podium yang tinggi rendahnya bisa disesuaikan dengan orang yang akan berbicara. Pengaturan podium ini dikontrol secara elektronis. Bukan hanya itu podium pun bisa diputar ke segala arah. Untuk ruang sidang utama, FCA menyediakan ruang pengunjung sidang yang berada di balkon.

Lengkapya fasilitas ruang sidang ini, menurut Warwick adalah bentuk *access to justice* juga. Sebab ruang sidang ini bisa digunakan unruk seminar, konferensi, atau kegiatan publik lain-

nya.

“Jika digunakan untuk seminar maka podium diarahkan ke audience, bukan lagi menghadap meja hakim”, terang Warwick.

Inovasi Layanan

Di bidang layanan, Federal Court of Australia akan segera memperbarui layanan penyampaian salinan putusan. Putusan akan disampaikan melalui email para pihak bersamaan dengan publikasi putusan di website pengadilan. Selain itu, putusan pun akan dikirim ke hakim di tingkat sebelumnya.

Untuk mendorong staf pengadilan memberikan pelayanan yang terbaik, mereka disediakan seluruh fasilitas kerja yang dibutuhkan. Bahkan, ketika dilakukan renovasi gedung dengan visi *access to justice*, para associate judge ditempatkan di spot yang memiliki view yang indah.

“ Itu semua demi pemberian layanan keadilan yang maksimal untuk publik”, pungkas Warwick. (an)



Pilihannya : Semua Elektronik atau Semua Kertas (?)

SYDNEY | 30 SEPTEMBER 2014

Federal Court of Australia baru saja meluncurkan sistem electronic court file yang diberlakukan bagi pihak yang mengajukan perkara dan aparaturnya. Dengan penerapan sistem ini, pengajuan berkas dari pihak dan pemeriksaan berkas oleh pengadilan bersifat paperless. Meski FCA bisa dibidang pengadilan modern, namun implementasi sistem elektronik bagi para aparaturnya bukan tanpa kendala. Perlu upaya maksimal untuk memperkenalkan dan meyakinkan manfaat penerapan sistem elektronik di pengadilan. Untuk efektifitas implementasi sistem ini, FCA menerapkan prinsip "semua elektronik atau semua kertas".

Demikian disampaikan CEO/Pa-

nitera Utama Pengadilan Federal Australia, Warwick Sodden, Senin (29/9). Warwick menyadari bahwa menerapkan sistem elektronik adalah merubah budaya kerja. Oleh karena itu, ketika sistem ini akan diimplementasikan hanya ada dua pilihan: semua akan berbasis elektronik atau tidak sama sekali. Menurutnya, dua pilihan adalah prinsip bagi sebuah keberhasilan. Karena jika setengah-setengah akan malah akan menjadi beban pengadilan. Dalam mensosialisasikan sistem baru ini, Warwick menggandeng unsur hakim untuk meyakinkan efektifitas sistem ini.

Ketika pilihannya jatuh pada "semua berbasis elektronik", maka pengadilan tidak memfasilitasi pencetakan dokumen. Meski demikian jika hakim akan mencetak, maka itu diperbo-

lehkan namun dilakukan sendiri di kamarnya. Pencetakan ini pun, kata Warwick, sangat terbatas bagi dokumen yang akan digunakan.

Cara Kerja

Bagi pihak yang akan mengajukan perkara ke pengadilan federal, mereka mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam format yang telah ditetapkan pengadilan. Mereka selanjutnya mengunggah seluruh dokumen ke dalam e-lodgment. Sistem e-lodgment memproses penerimaan dokumen, pembayaran biaya perkara dan memberikan nomor perkara. Semua dokumen yang dikirim melalui e-lodgment ini selanjutnya diambil oleh Case Management System di internal pengadilan.



Mengunggah seluruh dokumen ke dalam e-lodgment. Sistem e-lodgment memproses penerimaan dokumen, pembayaran biaya perkara dan memberikan nomor perkara. Semua dokumen yang dikirim melalui e-lodgment ini selanjutnya diambil oleh Case Management System di internal pengadilan.

Ketika perkara sudah terdistribusi ke hakim, maka dokumen yang berada di Case Management System diunduh kedalam elektronik work file. Distribusi dokumen ke para staf pengadilan ini dilakukan menggunakan produk Microsoft Share Point yang sudah dicostumisasi. Sistem ini merupakan layar kerja para

hakim dan staf pengadilan. Melalui sistem ini, para hakim dapat melakukan highlight bagian-bagian penting, memberi catatan, dan aktivitas apapun selayaknya dilakukan di atas kertas. Mempersiapkan draft putusan pun dilakukan dengan sistem ini. Ketika berbincang dengan salah

seorang hakim, Ia mengakui mendapat banyak kemudahan menggunakan sistem elektronik court file. Meskipun sejumlah hakim yang lain, mengaku perlu beradaptasi secara sungguh-sungguh untuk menggunakan sistem ini.



Electronic Court File



Inilah Strategi FCA dalam Menerapkan Electronic Court File

MELBOURNE | 01 OKTOBER 2014

Australia termasuk dalam jajaran negara modern yang identik dengan kehidupan yang serba elektronik. Namun bagi Pengadilan Federal Australia (FCA), penerapan sistem pengadilan elektronik secara keseluruhan masih dianggap hal yang baru. Keputusan FCA untuk melakukan penguatan layanan elektronik pengadilan (e-Services) pada acara The Judge Meeting di bulan September 2009. Baru lima tahun setelah itu (2014), FCA melakukan soft launching sistem electronic court file (ECF). FCA Melbourne telah memperkenalkan sistem ini sejak Agustus 2014. Direncanakan sistem ini akan berlaku sepenuhnya di tahun 2015.

Warwick Sodden (CEO/registrar), Elizabeth Connolly (Manager Policy & Planning) dan John Mathieson (Deputy Registrar) berbagi pengalaman dengan peserta magang tentang strategi FCA untuk mengimplementasikan sistem ECF, Selasa (29/9) di Gedung FCA New South Wales, Sydney.

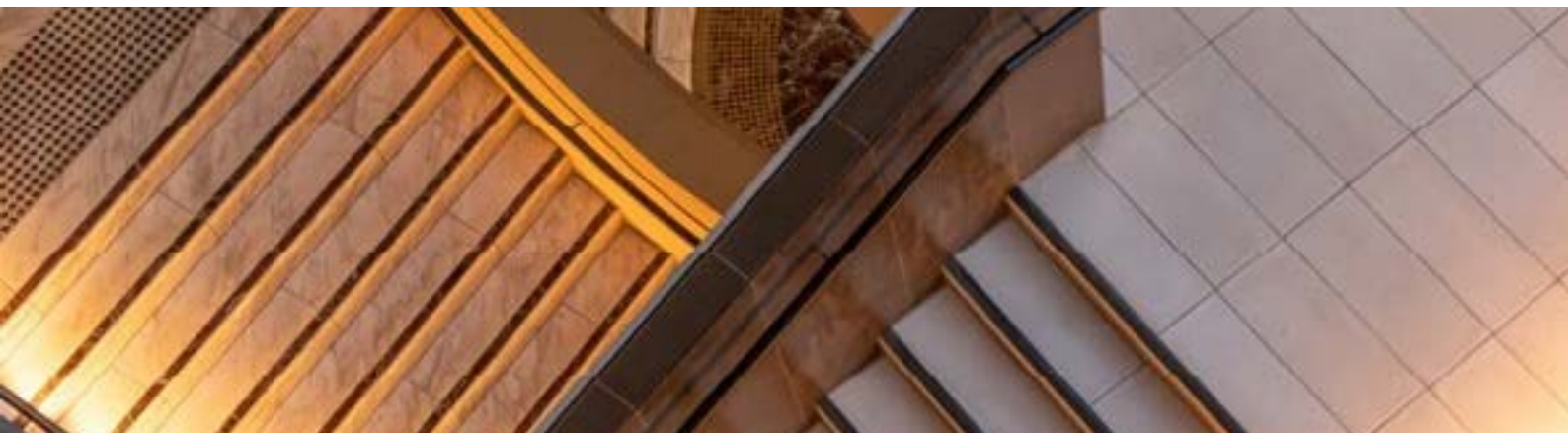
Menurut Warwick, hambatan implementasi ECF bagi pengadilan, terutama hakim, adalah persepsi mereka bahwa akan kesulitan dengan sistem baru ini. Mereka beralih tidak mahir menggunakan komputer sehingga penerapan ECF akan memperlambat proses penanganan perkara. Ada juga yang menolak karena khawatir sistem tidak akan berjalan baik karena diakses oleh semua pihak. Akibatnya proses penanganan perkara terganggu, bahkan terancam gagal karena

dokumennya hilang.

Menurut Warwick adanya persepsi demikian pada umumnya disebabkan oleh tiga hal: tidak mau (unwilling), tidak bisa (unable) dan tidak tahu (unknowing). Oleh karena itu strategi FCA untuk menghadapi resistensi tersebut adalah dengan menjalin komunikasi dengan para hakim. Tim implementasi ECF memberi penjelasan bahwa ECF akan membuat pekerjaan efektif dan efisien. Mereka pun diingatkan bahwa masih dapat mencetak dokumen yang dibutuhkan.

Untuk meyakinkan hal tersebut Tim melibatkan hakim yang mendukung implementasi ECF untuk menjadi juru kampanye. Bahkan hakim yang dilibatkan menunjukkan bukti bahwa dengan ECF proses penyusunan putusan lebih cepat dan pencarian dokumen pun menjadi lebih mudah. Bahkan agar peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik dirasakan nyaman, para hakim diberikan monitor berlayar besar dan laptop. Dengan perangkat ini hakim bisa membaca berkas sekaligus membuat catatan, highlight dan lain-lain yang biasa dilakukan dalam proses membaca berkas manual.

Selain proses komunikasi, pelibatan, dan persuasi, FCA juga melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparatur peradilan. Proses pembelajaran ECF bagi para staf ini dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang bersifat tatap muka dan ada juga menggunakan teknologi informasi.





Elizabeth Connolly, Manager Policy & Planning, menyampaikan bahwa salah satu cara mensosialisasikan ECF sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur peradilan, FCA membangun sistem e-learning terkait dengan implementasi e-CF. Sistem yang terintegrasi dengan intranet ini berisi segala hal tentang implementasi ECF.

Salah satu bentuk informasi yang disajikan adalah dengan menyusun pertanyaan yang paling sering dikemukakan oleh para hakim (Frequently Ask Question)

Sedangkan strategi yang digunakan untuk pihak di luar pengadilan, FCA melakukan sosialisasi kepada kantor-kantor hukum yang secara statistik

paling banyak beracara di pengadilan. Disampaikan kepada para praktisi bahwa mengirimkan dokumen elektronik melalui sistem e-lodgement akan lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Dari sisi pembebanan biaya pun, sistem elektronik akan banyak memotong post pengeluaran pencetakan dokumen, penggandaan, dan lain-lain.

Dari sisi aturan, penerapan ECF memerlukan petunjuk pelaksanaan dari ketua pengadilan. Meski implementasinya tidak memerlukan pengaturan oleh Undang-Undang Federal, Ketua Pengadilan Federal dapat mengeluarkan practice note



Sejak diperlakukannya ECF, FCA menyesuaikan ruang penerimaan perkara dengan menyediakan mesin scanner dan beberapa komputer untuk unggah dokumen

Maaf,... Berkas Anda Harus Disampaikan Secara Elektronik!

MELBOURNE | 02 OKTOBER 2014

“Maaf Berkas Anda Harus Disampaikan Secara Elektronik!” . Demikian disampaikan oleh Daniel Caporale, Deputy Registrar FCA, ketika memimpin sidang perkara kepailitan, Kamis (2/10) di Law Court Building, Melbourne. Daniel Caporale yang bertindak sebagai Delegated Judge menolak menerima dokumen kertas ketika kuasa hukum penggugat mau menyampaikan beberapa lembar dokumen. Daniel menjelaskan kepada pihak tersebut bahwa sesuai aturan pengadilan, sejak Agustus 2014 FCA Melbourne telah menerapkan sistem electronic court file yang mewajibkan pihak berperkara menyerahkan dokumen secara elektronik.

“Silahkan anda mengunggahnya melalui e-lodgment besok”, kata Daniel.

Pengadilan Federal Australia menerapkan kewajiban pihak untuk menyampaikan dokumen elektronik dengan pendekatan yang berbeda antara pengacara dan pihak yang tidak didampingi pengacara. Bagi pihak yang didampingi kuasa hukum mereka wajib mengirimkan dokumen ke pengadilan melalui aplikasi e-lodgment. Sedangkan bagi pihak yang tidak didampingi kuasa hukum, mereka bisa membawa berkas ke pengadilan, lalu oleh petugas pengadilan dibantu dimasukkan ke

sistem e-lodgment.

Dari sisi pengadilan, dengan diberlakukannya kebijakan electronic court file, proses penanganan perkara tidak lagi menggunakan berkas. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Daniel Caporale, peserta magang diberi kesempatan untuk mengikuti persidangan, sehingga menyaksikan proses persidangan yang dilakukan tanpa berkas perkara. Asep Nursobah duduk bersama asisten hakim/panitera, Lauren Mc. Cormik. Sedangkan Lieliek Prisbawono, Frensita K. Twinsani, dan Sumartanto duduk di tempat petugas transkrip.

Dalam persidangan tersebut asisten hakim mempersiapkan segala sesuatu tentang jalannya persidangan. Ia membuka aplikasi electronic court file dan perkara-perkara yang akan disidangkan pada hari itu muncul. Hakim pun membuka sistem yang sama. Khusus untuk hakim, tersedia satu laptop dan layar monitor yang cukup besar. Penggunaan dua piranti ini agar hakim bisa bekerja (membuat catatan dll, red) di laptop sekaligus membaca dokumen persidangan di layar monitor besar. Penggunaan laptop yang diproyeksikan juga ke monitor besar, digunakan di setiap ruangan hakim dan staf kepaniteraan. Laptop. Output monitor disetting extended sehingga beberapa pekerjaan bisa dilakukan secara sekaligus (multi tasking).

Asisten hakim juga mengupdate proses persidangan dalam Case Tracking System. Apabila ada penetapan yang ha-

rus dibuat, seperti penundaan sidang, asisten mempersiapkannya menggunakan aplikasi case management system.

Dalam persidangan yang digelar Kamis pagi (2/10), ada beberapa pihak yang masih menyerahkan dokumen kertas. Hakim langsung mengingatkan bahwa bagi perkara yang didaftarkan Agustus 2014, pengadilan tidak lagi menerima dokumen kertas. Ia meminta agar pihak memasukan soft copy dokumen tersebut ke sistem e-lodgment.

Apabila bukti yang diserahkan berbentuk non dokumen, Menurut Warwick Soden, pengadilan mengambir gambar dari barang bukti tersebut kemudian mengunggahnya di sistem e-CF.

Untuk mengantisipasi pihak yang tidak bisa memasukan dokumen melalui sistem e-lodgment, maka pengadilan menunjuk seorang koordinator yang bertugas untuk membantu memasukan sistem ini ke aplikasi e-lodgment. Petugas ini pun yang membantu jika ada dokumen yang cukup besar sehingga tidak bisa diupload di aplikasi e-lodgment.

FCA pun menyediakan sebuah mesin scanner besar yang mampu melakukan scanning secara cepat dan dalam jumlah yang banyak. Selain itu ada beberapa komputer yang terhubung dengan sistem ECF yang bisa digunakan oleh para pihak pencari keadilan. (an)



Diberlakukannya kebijakan electronic court file, proses penanganan perkara tidak lagi menggunakan berkas.





Melihat Cara Pengadilan Federal Australia Meralat Kesalahan Ketik Putusan

Putusan adalah mahkota hakim. Kesalahan sedikit pun tidak boleh terjadi dalam sebuah putusan, walaupun kesalahan itu adalah kesalahan ketik yang tidak mempengaruhi makna.

MELBOURNE | 02 OKTOBER 2014



Putusan adalah mahkota hakim. Kesalahan sedikit pun tidak boleh terjadi dalam sebuah putusan, walaupun kesalahan itu adalah kesalahan ketik yang tidak mempengaruhi makna. Oleh karena itu jika kekeliruan yang bersifat “typo”, maka ada mekanisme perbaikan. Di pengadilan Indonesia, koreksi terhadap kekeliruan redaksi putusan disebut dengan “renvoi”. Prosedur renvoi dilakukan dengan mencoret redaksi putusan yang keliru kemudian diganti dengan redaksi yang benar. Pada margin kiri putusan yang keliru tersebut kemudian diberi keterangan tentang adanya perbaikan tersebut dan ditandatangani oleh majelis hakim. Dalam praktek renvoi dikenal beberapa istilah seperti sah

coret ganti, sah coret tambah, dan lain-lain.

Pengadilan Federal Australia juga mengenal mekanisme ralat terhadap redaksi putusan yang keliru. Mereka menyebutnya dengan Corrigendum. Berbeda dengan cara renvoi di Indonesia, Corrigendum tidak dilakukan di setiap halaman tempat terjadinya kekeliruan. Corrigendum dibuat di lembaran terpisah yang isinya menjelaskan bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan di halaman sekian, tertulis A seharusnya B. Atau, telah dihapus kalimat A dan dimasukkan kalimat B. Hakim selanjutnya membuat pernyataan bahwa telah terjadi koreksi atas kekeliruan. Corrigendum mirip dengan ralat yang biasa dilakukan dalam sebuah terbitan.



Pada dasarnya tak ada template khusus bagi para Hakim, namun biasanya putusan berisi judul (heading), para pihak yang terlibat, nomor perkara, nama hakim, tanggal putusan, kata kunci untuk pencarian, peraturan terkait, yurisprudensi, kutipan, tanggal persidangan, kesimpulan akhir, tempat, divisi, katagori, jumlah paragraf, penasihat hukum dan pendukung penggugat juga tergugat, pertimbangan hukum (reason for judgement) yang terdiri dari fakta-fakta penting dan hukum terhadap duduk perkara lalu perintah pengadilan (order) atau lazim kita sebut amar putusan dan diakhiri dengan pernyataan bahwa kopi putusan sesuai asli dari putusan Hakim yang ditanda-tangani oleh Associate (asisten hakim dalam persidangan). Menurut Justice Bennet, para pihak tidak membutuhkan sejarah perkara dalam putusan tetapi yang dipedulikan mereka adalah pertimbangan hukum. Pihak yang menang hanya peduli amar putusan dan yang kalah hanya peduli alasan ia dikalahkan. Oleh karena itu menurutnya putusan tidak seharusnya panjang dan memuat hal-hal yang sudah diketahui para pihak dalam proses persidangan, bahkan putusan yang baik adalah yang sesingkat mungkin, beralasan, dan dapat dipahami oleh orang awam sekalipun. Pendapatnya tersebut bertujuan untuk memberikan yang dibutuhkan para pihak (solusi) dengan sesegera mungkin didasari filosofi bahwa keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan (justice delayed justice denied). (Frensita K. Twinsani)



Pasca Implementasi ECF, FCA Tidak Lagi Mencetak dan Mengirim Putusan

Semuanya berbasis dokumen elektronik yang dikelola dalam sebuah sistem yang disebut electronic court file (ECF)

MELBOURNE | 02 OKTOBER 2014

Sejak Agustus 2014, FCA khususnya Kepaniteraan Victoria di Melbourne sudah menerapkan sistem berkas elektronik (electronic court file). Dengan diimplementasikannya ECF maka Pengadilan Federal Australia tidak lagi menggunakan kertas dalam proses penanganan perkara. Semuanya berbasis dokumen elektronik yang dikelola dalam sebuah sistem yang disebut electronic court file (ECF). Pasca implemetasi ECF ini, putusan ataupun penetapan tidak lagi dicetak dalam bentuk kertas dan dikirim ke pihak

yang bersangkutan. Putusan cukup diupload di website, dan pihak tinggal mengunduhnya. Demikian disampaikan oleh Lauren McCormik, saat berdiskusi dengan peserta magang perihal persidangan elektronik yang sebelumnya diikuti oleh peserta magang. Lauren menjelaskan kalau dulu pengadilan mengirim dokumen putusan atau penetapan ke alamat pihak berperkara melalui pos, maka bagi putusan yang perkaranya terdaftar Agustus 2014, cukup dipublish. Status putusan yang dipublish ini merupakan salinan resmi yang dikeluarkan pengadilan.

Lauren menjelaskan bahwa ada perbedaan format putusan yang dipublish sebelum dan sesudah diberlakukannya ECF. Kalau sebelum berlaku ECF, putusan yang dimuat di internet tidak dibubuhi setempel dan statusnya bukan salinan resmi. Sebab, pihak yang berperkara menerima salinan putusan dari pengadilan. Setelah berlaku ECF, putusan yang dipublish di website dibubuhi setempel Pengadilan Federal. Pembubuhan stempel ini menjadi ciri bahwa ia adalah dokumen resmi pengadilan. [an]

Merasakan Menjadi “Pegawai” Pengadilan Federal Australia



Peserta Magang diikutkan seolah menjadi anggota majelis dalam persidangan yang dipimpin oleh Justice Murphy

MELBOURNE | 03 OKTOBER 2014

Kegiatan magang Mahkamah Agung RI (Internship Program 2014) memasuki hari ke-3 (1/10). Setelah dua hari memperoleh informasi tentang e-lodgment dan manajemen perubahan di Federal Court of Australia (FCA) New South Wales, Sidney, Tim Magang mendatangi FCA Victoria di Kota Melbourne. Di FCA Melbourne, Tim Magang akan mendalami proses pemasukan berkas secara elektronik. FCA Melbourne dipilih karena merupakan pengadilan percontohan.

Kegiatan magang di FCA Melbourne dimulai dengan acara coffee morning, Rabu (1/10). Sia Lagos, Panitera Kepala FCA Kepaniteraan Victoria menyambut tim magang dan memperkenalkan dengan sejumlah hakim dan staf.

Dalam acara coffee morning yang penuh dengan nuansa kekeluar-

gaan, tanpa diduga Justice Bernard Murphy menawarkan kepada dua orang anggota tim yaitu Liliek Prisbawono Adi, SH., MH., dan Frensita K. Twinsani, SH., M.Si.,MH untuk ikut menyaksikan proses persidangannya. Bahkan mengajak kedua anggota tim tersebut untuk duduk di meja hakim di sisi kiri dan kanan sehingga dapat melihat dan merasakan langsung atmosfer saat ia memimpin persidangan. Dengan dikutkannya kedua peserta magang, sekilas nampak persidangan menjadi persidangan majelis (full court). Padahal sidang hari itu adalah persidangan dengan hakim tunggal. Kewenangan Pengadilan

Selain sebagai pengadilan banding, Federal Court of Australia adalah Trial Court yang menangani perkara fakta (judex facti) seperti Pengadilan Umum di Indonesia, namun yurisdiksinya hanya menangani perkara komersial dan sebagian kecil perkara pidana yang berkait-

tan dengan perkara komersial yang diatur oleh hukum federal. Ada dua jenis persidangan di sini yang dibedakan berdasarkan nomor perkaranya yaitu perkara Federal Court dan perkara Federal Circuit Court. Sedangkan untuk perkara perdata yang berhubungan dengan masalah keluarga yang di Indonesia juga merupakan yurisdiksi peradilan umum, di Australia disidangkan tersendiri di Pengadilan Keluarga (Family Court) yang memiliki kantor dan struktur organisasi berbeda. Di Federal Court perkara disidangkan oleh satu orang Hakim dan apabila ada pihak yang tidak menerima putusan maka akan dibawa naik banding yang ditangani Majelis yang terdiri dari 3 orang Hakim (full court). Dengan demikian, Hakim tingkat pertama Pengadilan Federal juga merangkap sebagai hakim banding. Pengadilannya sama, adapun yang membedakan keduanya adalah jumlah hakim yang menangani perkaranya saja.

Di Australia, lembaga peradilan tertinggi yang bisa menangani banding dari semua jenis peradilan termasuk Pengadilan Federal, atas alasan hukum yang sangat kuat (*question of law*) adalah High Court yang berpusat di Canberra dan memiliki cabang di setiap negara bagian. Anggota High Court hanya berjumlah 7 orang Hakim Agung yang merupakan Hakim-Hakim yang dipilih dengan sangat selektif dan memiliki kualifikasi terbaik di Australia. Biasanya perkara kasasi akan ditangani oleh 5 atau 7 orang Hakim Agung. High Court ini dalam beberapa hal lebih mirip dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Delegated Judge

Di Australia ada beberapa perkara yang dapat didelegasikan pada Panitera (Registrar) antara lain perkara permohonan pailit. Biasanya perkara yang ditangani Registrar ini bersifat mudah, singkat dan sederhana pembuktiannya. Apabila saat persidangan Registrar merasa perkaranya adalah perkara yang memerlukan waktu lama dengan pembuktian yang agak rumit maka ia akan merujuk berkas perkara tersebut untuk disidangkan oleh Hakim. Biasanya perkara selesai di tingkat pertama atau trial court karena prosedur yang sangat sulit dan ketat untuk mengajukan banding apalagi kasasi. Ada suatu mekanisme beracara yang disebut dengan *leave* yang akan memeriksa apakah suatu perkara diperbolehkan untuk diajukan upaya hukum banding dan/atau kasasi. Kesadaran hukum masyarakat yang cukup tinggi membuat mereka menerima apabila dalam mekanisme tersebut perkaranya dianggap tidak layak banding atau kasasi. Kesadaran hukum ini juga menyebabkan kepatuhan terhadap putusan dan penghormatan terhadap pengadilan sangat tinggi.

Hakim Federal Australia berjumlah 50 orang dengan jumlah perkara sekitar 5,000 berkas per tahun. Untuk menjawab tuntutan modernisasi pengadilan dan pelayanan yang lebih cepat, sejak sekitar 4 minggu yang lalu Pengadilan Federal Australia melaksanakan kebijakan penerapan pengajuan berkas secara elektronik (*e-lodgment*) untuk mengalihkan berkas dalam bentuk kertas menjadi berkas dalam bentuk elektronik. Penanganan perkara yang diterima Federal Court diawali saat sebuah perkara didaftarkan. Oleh karena *e-lodgment* masih dalam masa transisi, sejak kebijakan diterapkan maka untuk penggugat yang diwakili oleh penasehat hukum pengadilan mewajibkan pengajuan berkas secara elektronik sedangkan untuk peng-

gugat yang tidak diwakili penasehat hukum (*unrepresented applicant*) pengadilan menyediakan petugas khusus yang akan memberikan informasi dan membantu memasukkan berkas secara elektronik.

Tim Magang juga berkesempatan melihat fasilitas untuk *e-lodgment* tersebut dalam sebuah ruang yang terbuka bagi umum di kepaniteraan. Di ruang itu disediakan komputer dan mesin scanner yang bisa diakses publik untuk mengajukan berkas secara elektronik, bahkan untuk penggugat yang memiliki keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris pengadilan menyediakan akses untuk memperoleh penerjemah yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Tampak sekali bahwa akses masyarakat pada keadilan (*access to justice*) merupakan perhatian dan kepedulian yang utama.

Setelah berkas diajukan secara elektronik, ada petugas yang memeriksa kelengkapan berkas untuk *unrepresented applicant* apakah sesuai dengan peraturan. Jika berkas tidak lengkap maka petugas tersebut akan berkomunikasi dengan penggugat dan memberi batas waktu untuk memasukkan berkas yang dibutuhkan. Setelah itu akan ditentukan siapa Hakim dan Panitera yang akan menangani perkaranya serta ditentukan hari persidangannya. Pihak penggugat akan diwajibkan memberikan panggilan sidang langsung pada Tergugat, dan apabila dianggap perlu maka dalam panggilan sidang, Hakim melalui Panitera akan memberikan informasi atau petunjuk kepada para pihak mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat menghadiri persidangan.

Dalam persidangan yang diikuti oleh tim magang, sebelum persidangan permulaan, Justice Murphy memerintahkan para pihak untuk membuat pernyataan tentang pokok permasalahan dalam bentuk poin-poin yang akan disepakati pembahasannya di persidangan, sehingga persidangan tidak akan berjalan bertele-tele dan melebar ke arah yang tidak perlu. Setelah penggugat (*Applicant*) menyampaikan pokok masalah dan Tergugat (*respondent*) menyampaikan pendapatnya, apabila hakim menganggap masalah itu bisa diselesaikan dengan mediasi maka ia memberikan sedikit arahan yang menekankan keuntungan masalah diselesaikan secara mediasi dan kerugiannya jika perkara dilanjutkan untuk diputuskan oleh Hakim. Selanjutnya perkara ditunda untuk memberi waktu mediasi sekaligus menentukan hari sidang jika perdamaian tidak tercapai.

Mediasi di FCA

Perbedaan yang mendasar antara mediasi di Federal Court dengan mediasi perkara perdata di Indonesia adalah mediasi di Federal Court digantungkan pada pertimbangan Hakim Federal dan keinginan para pihak untuk berdamai dan menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan, bukan kewajiban seperti di Indonesia, yang jika tidak dilakukan dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Demikian juga berbeda dengan di Indonesia, tidak semua perkara perdata dapat melalui proses mediasi, karena Pemerintah Australia melarang perkara-perkara tertentu untuk diselesaikan melalui mediasi. Penyelesaian dengan mediasi tersebut akan menghindari penumpukan perkara di pengadilan di samping memberikan kepuasan yang lebih bagi semua pihak daripada penyelesaian melalui putusan hakim yang bersifat menang dan kalah.

Mediasi biasanya difasilitasi oleh Registrar yang ditunjuk. Para Registrar merupakan mediator yang handal. Di Negara bagian Victoria keberhasilan mediasi mencapai 70%. Hal tersebut tampak dari tingkat keberhasilan mencapai kesepakatan. Dalam hal perkara diselesaikan dengan perdamaian, maka kesepakatan tersebut merupakan hukum yang berlaku bagi para pihak dan mempunyai kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan. Secara umum jarang terjadi pelanggaran terhadap hasil kesepakatan. Para pihak takut melakukan pelanggaran karena mempunyai konsekuensi hukum yang sangat berat. Adapun apabila mediasi gagal maka sesuai tanggal yang telah ditetapkan, persidangan dilaksanakan melalui proses jawab menjawab, pembuktian, hingga memperoleh putusan akhir dari Hakim yang rata-rata memiliki jangka waktu penyelesaian 6 (*enam*) s/d 12 (dua belas) bulan, kecuali beberapa jenis perkara yang harus diselesaikan dalam tenggang waktu tertentu.

Proses penyelesaian putusan Hakim di Pengadilan Federal cukup singkat. Biasanya setelah diputus Hakim akan memberikan putusannya pada petugas yang harus melakukan *upload* dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak Hakim memberikan putusannya untuk di-*upload* sehingga para pihak dapat segera memperolehnya. Putusan yang dibuat Hakim sangat singkat, Justice Bennet, salah seorang Hakim senior di Pengadilan Federal New South Wales, Sidney (NSW Registry) mengatakan putusannya hanya sekitar 10 (sepuluh) halaman.



Perubahan Paradigma Hakim Perdata di FCA:

Hakim Pasif Menjadi Hakim Aktif

“

hakim bertanggung jawab untuk mengelola persidangan perkara sehingga dapat berjalan dengan cepat, tidak bertele-tele.

MELBOURNE | 04 OKTOBER 2014

Selama ini hakim perdata memegang teguh prinsip bahwa ia harus pasif dalam menangani perkara. Namun prinsip tersebut tidak lagi dianut sepenuhnya di Pengadilan Federal Australia. Sejak tujuh belas tahun yang lalu prinsip ini sudah mulai ditinggalkan. Hakim FCA tidak hanya diam mendengar pihak yang bersengketa di persidangan, tapi ia aktif mengendalikan persidangan sehingga perkara dapat segera diselesaikan. Hakim pun aktif mendorong para pihak agar dapat mengakhiri sengketa dengan damai. Di sistem hukum Australia, ada aturan tertulis bahwa hakim bertanggung jawab untuk mengelola persidangan perkara sehingga dapat ber-

jalan dengan cepat, tidak bertele-tele.

Demikian disampaikan Panitera Pengadilan Federal Australia Kepaniteraan Melbourne, Sia Lagos, Rabu (1/10) pada sesi berbagi pengalaman FCA-MA tentang manajemen perubahan. Sia Lagos menjelaskan bahwa Australia memiliki undang-undang tentang prosedur penyelenggaraan persidangan (Court Procedures Rules 2006 (ACT)). Undang-undang ini pada intinya menghendaki persidangan berjalan efektif efisien, penyelesaian perkara terukur, dan terhindar dari persidangan yang bertele-tele, dan hakimlah yang bertanggung jawab untuk mengelola persidangan sehingga berjalan sesuai yang dikehendaki undang-undang tersebut.

Menurut Sia Lagos mesti belum seluruh hakim menganut paradigma hakim aktif dalam kasus perdata, namun tidak kurang dari 80 % hakim sudah menerapkan prinsip hakim aktif.

Sia Lagos menjelaskan bahwa ada preseden pembatalan putusan oleh High Court of Australia karena proses persidangan yang lama dan bertele-tele. Putusan itu adalah putusan *Aon Risk Services Aust Ltd v Australian National University* [2009] HCA 27. Putusan ini merupakan putusan banding dari Supreme Court of The Australian Capital Territory. Sebelumnya terdapat juga putusan serupa yang telah dimuat di berbagai Law Report (an)

Mengenal Berbagai Layanan Elektronik Pengadilan Federal Australia

Oleh : Asep Nursobah

MELBOURNE | 05 OKTOBER 2014

Pengadilan Federal Australia sudah lama menjadi pengadilan modern. Sebagai pengadilan modern, maka layanan berbasis elektronik menjadi keniscayaan. Layanan elektronik Pengadilan Federal Australia ini terbagi pada dua, untuk internal dan eksternal. Yang dimaksud internal adalah aparaturnya, sedangkan eksternal adalah pihak berperkara dan publik pada umumnya. Kegiatan magang hakim yustisial Mahkamah Agung yang berlangsung tanggal 28 September s.d 10 Oktober 2014 berkesempatan melihat dari dekat berbagai layanan elektronik tersebut.

Internal

Pengadilan Federal Australia menerapkan berbagai aplikasi elektronik untuk mendukung penanganan perkara yang menjadi kewenangannya. Aplikasi-aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:



1. Case Track

Case Track adalah aplikasi manajemen perkara yang mencatat perjalanan perkara dari mulai berkas diterima oleh pengadilan, didistribusikan ke docket para hakim, disidangkan sampai dengan perkara diputus dan salinan putusannya diserahkan kepada pihak. Case Track ini serupa dengan SIIP pada pengadilan negeri, SIADPA di pengadilan agama atau SIAD TUN dan SIAD MIL di pengadilan tata usaha negara dan militer. Aplikasi Case Track ini mengikuti alur perjalanan berkas dan penggunaannya adalah pegawai yang berada di titik yang dilewati oleh alur perkara tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan berkas di ruang sidang, asisten hakim (judge associate) langsung mengupdate status penanganan perkara seperti tanggal putusan, penetapan, atau penundaan sidang. Yang menarik, penasih hukum bisa mengakses Case Track ini, khusus untuk memantau perkara-perkara dia yang sedang ditangani di pengadilan.



2. Aplikasi Template Putusan

Pengadilan Federal Australia memiliki aplikasi untuk memudahkan penyusunan putusan. Aplikasi ini ditanam di Microsoft Office menggunakan macro sehingga muncul menu baru yaitu judgment. Di menu ini terdapat beberapa sub menu terkait dengan penyusunan putusan. Meski aplikasi ini belum terhubung dengan data base Case Track, aplikasi memudahkan untuk menyusun putusan. Ketika putusan sudah selesai disusun, aplikasi bisa melakukan bookmark kata kunci, undang-undang yang dikutip, putusan-putusan yurisprudensi yang dikutip. Semua bookmark akan ditampilkan di halaman depan sebagai sinopsis putusan. Aplikasi ini juga bisa menggabungkan beberapa pertimbangan hakim menjadi satu putusan. Yang menarik dari aplikasi ini karena ditanam di Microsoft Office sehingga semua orang familier dengan tampilan. Aplikasi ini tidak hanya diinstal di komputer hakim, tetapi seluruh komputer di Pengadilan telah diinstal Microsoft Office hasil kustomisasi.



3. Dokumen Manajemen Sistem

Untuk mengelola dokumen yang digunakan oleh pengadilan, Pengadilan Federal Australia menggunakan aplikasi Microsoft Share Point. Aplikasi ini membantu pengadilan untuk mendistribusikan dokumen yang dikirim oleh pihak kepada para hakim, para associate judge, dan staf pengadilan yang terkait dengan pemeriksaan berkas. Aplikasi Dokumen Manajemen Sistem ini sangat dibutuhkan oleh pengadilan, terlebih ketika pengadilan sudah mulai menggunakan dokumen elektronik dalam pemeriksaan perkara.



4. Electronic Court File

Aplikasi Electronic Court (ECF) file mulai diterapkan oleh Pengadilan Federal Australia seiring dengan kebijakan pengadilan untuk merubah cara kerja dari paper based ke paperless. ECF ini bersumber dari berkas elektronik yang dikirimkan oleh pihak menggunakan aplikasi untuk eksternal yang disebut dengan e-lodgement. ECF berisi kumpulan berkas perkara elektronik yang sebelumnya berbentuk kertas. Ketika hakim akan memeriksa berkas, dokumen elektronik dari ECF ini dipindahkan ke sub-aplikasi yang disebut dengan Working File. Di Working File, seluruh berkas yang berbentuk PDF dibuka menggunakan aplikasi Adobe PDF Profesional. Dengan aplikasi ini para hakim dapat melakukan highlight bagian-bagian penting, memberi catatan, copy paste ke template putusan, dan lain-lain.

ECF juga digunakan dalam pemeriksaan persidangan. Ketika peserta magang diikutkan dalam persidangan, di meja sidang tidak tersedia kertas. Yang ada hanyalah satu buah laptop dan satu monitor yang cukup besar. Fungsi laptop adalah untuk mencatat hal-hal penting, memberikan komentar, dll. Sedangkan layar monitor adalah untuk membaca dokumen berkas perkara yang sedang disidangkan. Yang tampil di monitor ini adalah dokumen yang berasal dari ECF yang diproyeksikan dari laptop dengan mode display monitor extended. Bekerja dengan dua monitor ini juga dilakukan di setiap ruang kerja hakim.



5. Portal Website

Setelah diberlakukan ECF, maka pengadilan tidak lagi mencetak dokumen pengadilan di kertas, termasuk putusan. Lalu bagaimana Pengadilan Federal Australia menyampaikan dokumen resmi putusan ke para pihak?. Caranya adalah Pengadilan Federal Australia mengunggah putusan ke website pengadilan. Karena publikasi putusan di website ini merupakan pemberitahuan resmi, maka dilakukan sedikit modifikasi dari model publikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Modifikasi itu adalah membubuhkan stempel resmi pengadilan di lembar putusannya.



6. e-Trial

e-Trial adalah layanan persidangan elektronik. Saat ini belum semua persidangan dilakukan secara elektronik. Persidangan elektronik hanya diterapkan untuk perkara-perkara niaga yang melibatkan banyak pihak dengan dokumen yang banyak. Persidangan elektronik dilakukan di ruang sidang khusus yang dilengkapi dengan komputer yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak. Dalam persidangan elektronik ketika pihak membacakan gugatan melalui iPadnya, misalnya, maka dokumen tersebut juga tampil dilayar hakim. Demikian juga ketika hakim membuka dokumen maka dokumen yang dibuka hakim tersebut juga muncul dilayarnya para pihak. Lalu lintas dokumen yang akan ditampilkan di layar dikendalikan oleh seorang operator. Dalam kegiatan magang tahun 2012, peserta magang diajak untuk melihat persiapan persidangan elektronik. Sepintas ruang sidang lebih menyerupai laboratorium komputer, karena banyaknya komputer yang tersedia di ruang sidang. e-Trial ini didukung oleh server khusus yang tersedia di belakang ruang sidang.

Lalu apa bedanya dengan ECF?. ECF adalah sistem pengganti dokumen kertas. Alur penanganan perkara tidak mengalami perubahan yang signifikan. Demikian pula persidangan masih dilaksanakan di ruang sidang biasa. Komputer yang digunakan oleh para pihak dan oleh hakim tidak terhubung, namun masing-masing membuka dokumen yang sama.



7. e-Courtroom

e-Courtroom adalah sebuah ruang sidang online yang digunakan oleh para Hakim dan Panitera untuk membantu penanganan dan persidangan perkara di Pengadilan Federal Australia atau Sirkuit Federal Court of Australia (sebelumnya Federal Magistrates Court). Dengan menggunakan layanan e-Courtroom, pihak yang mengajukan perkara tidak perlu datang ke pengadilan. Demikian pula persidangan dilakukan secara online, sehingga pihak dan hakim tidak berada di ruang sidang.

Perkara yang bisa ditangani oleh e-court room adalah perkara permohonan sepihak seperti perkara permohonan ganti rugi dalam kepailitan, permohonan panggilan pemeriksaan. Selain itu eCourtroom juga dapat digunakan untuk pemberian petunjuk dan penetapan-penetapan lainnya yang berada dalam ruang lingkup Hukum Federal.

eCourtroom terintegrasi dengan eLodgment, sehingga pihak yang mengajukan berkas perkara melalui e-lodgment terhubung dengan eCourtroom dan eLodgment. Selain itu, eCourtroom menyediakan fasilitas korespondensi dan pertukaran dokumen yang berhubungan dengan Administrasi perkara. Pihak menyampaikan berkas ke pengadilan, dan pengadilan memberikan penetapan ke para pihak.

Sebuah fasilitas transkrip juga disediakan untuk merekam semua pesan yang diposting oleh hakim yang memimpin persidangan dan/atau yang dilakukan oleh para pihak dalam sistem e-Courtroom. Transkrip ini dapat dilihat oleh publik. Namun, dokumen yang diposting atau diajukan oleh pihak hanya dapat dilihat oleh petugas pengadilan dan pihak yang terkait.

Eksternal

Untuk layanan eksternal, ada beberapa aplikasi yang disediakan Pengadilan Federal Australia, yaitu:



1. e-lodgment

ini adalah aplikasi untuk mengirimkan berkas perkara ke pengadilan. Pengacara atau pihak yang berperkara dapat mengirim berkas perkara ke pengadilan melalui e-lodgment setelah merigistrasikan dirinya di sistem ini. Berkas yang telah dikirim akan diperiksa oleh pengadilan, apakah memenuhi syarat kelengkapan atau persyaratan lainnya yang diatur oleh practice note ketua pengadilan. Jika berkas tidak lengkap, maka pengadilan menuliskan kekurangan-kekurangannya dan akan terkirim ke emailnya pihak yang mengajukan. Melalui aplikasi e-lodgment ini pemohon bisa memberikan informasi bahwa perkara ini adalah penting, perlu waktu segera menyelesaikan, atau dokumen yang bersifat rahasia. Pemohon pun bisa meminta tanggal tertentu untuk dilaksanakan persidangan, meski keputusan nantinya ada di pihak pengadilan.

Setelah berkas diterima, pengadilan akan menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh pihak. Pihak dapat membayar menggunakan sistem pembayaran yang sudah disediakan oleh sistem, atau melalui media lain kemudian bukti pembayarannya diunggah ke e-lodgment. Selanjutnya pengadilan akan menentukan kapan persidangan pertama akan dilakukan.

Bagi pihak yang tidak didampingi penasihat hukum dan tidak bisa menggunakan e-lodgment, ia bisa datang ke pengadilan membawa berkas. Di bagian pendaftaran perkara, telah disediakan mesin scanner dan beberapa komputer yang terhubung dengan e-lodgment. Pengadilan Federal Australia telah menunjuk seorang kordinator yang membantu untuk memasukan berkas perkara ke sistem elektronik pengadilan. Petugas ini pun yang akan membantu apabila ada dokumen yang tidak bisa dimasukkan karena kapasitas filenya terlalu besar.



2. Common law Portal

Common Law Portal adalah portal untuk menampilkan seluruh dokumen pengadilan. Semua berkas yang sudah dikirim ke pengadilan bisa dilihat di website ini. Demikian pula produk pengadilan seperti penetapan, putusan, corrigendum putusan, bisa diakses disini.



3. Website Pengadilan

Seperti telah dijelaskan dibagian awal, pengadilan memuat informasi pengadilan di website. Jadwal sidang, putusan, dan lain-lain tersedia di website. [an]

Menerapkan e-Court File, FCA Tempuh 8 Langkah Management Perubahan

Melbourne | 05 OKTOBER 2014

Meski sudah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik (e-court services), namun benar-benar meninggalkan kertas dalam penanganan perkara adalah benar-benar hal yang baru. Oleh karena itu harus ada strategi manajemen perubahan dalam melakukan peralihan dari paper based ke paperless. Berkaitan dengan hal tersebut, FCA menempuh delapan langkah manajemen perubahan.

Sia Lagos, Panitera FCA Kepaniteraan Victoria, berbagi pengalaman mengenai 8 langkah yang telah ditempuh untuk implementasi electronic court file. Delapan langkah tersebut menurut Sia Lagos harus dilakukan secara berurutan. Inilah kedelapan langkah manajemen perubahan yang telah dilakukan FCA untuk mengimplementasikan e-Court File

Pertama, Memastikan apakah benar-benar perlu dilakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan, pertimbangan signifikansi melakukan perubahan harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Menurut Sia, ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Pada tahap ini harus dilakukan identifikasi permasalahan yang terjadi atau yang berpotensi terjadi dan pelu-ang dilakukannya perubahan. Dalam konteks pengadilan, alasan pentingnya dilakukan perubahan misalnya banyak tunggakan atau banyak keluhan atas layanan pengadilan.

Kedua, membentuk tim pendukung perubahan yang kuat. Setelah diyakini bahwa perubahan benar-benar perlu dilakukan, langkah berikutnya adalah membentuk tim yang mendukung adanya perubahan. Tim ini harus merupakan sebuah kelompok yang memiliki

kekuatan yang cukup untuk mengupayakan perubahan yang meliputi unsur hakim dan aparat peradilan yang lainnya seperti bagian perencanaan, keuangan dan lainnya. Dalam konteks e-CF di FCA, telah dibentuk ECF Board dan ECF Project Team. Setelah dibentuk tim atau kelompok kerja, yang harus dilakukan berikutnya adalah mendorong kelompok ini untuk bekerja sama sebagai sebuah tim.

Ketiga, merumuskan visi perubahan. Langkah berikutnya setelah terbentuk pokja adalah merumuskan visi perubahan. Langkah ini harus dilakukan untuk membantu secara langsung upaya-upaya perubahan tersebut. Setelah visi terbentuk harus disusun strategi untuk mencapai visi tersebut.

Keempat, mengkomunikasikan visi kepada seluruh aparat peradilan. Visi yang sudah ditentukan dan strateg untuk mencapainya telah dirumuskan, selanjutnya harus dikomunikasikan. Dalam mengkomunikasikan kedua hal tersebut sedapat mungkin menggunakan berbagai media dan berbagai kesempatan. Karena perubahan akan mengakibatkan cara kerja baru, maka mengajarkan cara baru itu sebaiknya dengan contoh yang dilakukan oleh kelompok kerja yang sudah dibangun di tahap kedua diatas.

Kelima, memberi wewenang kepada yang lain untuk melakukan perubahan sesuai visi. Perubahan adalah "virus" yang harus dilularkan. Agar perubahan dapat mewabah dengan cepat, maka harus banyak agen-agen yang diberikan wewenang untuk melakukan perubahan. Di tahap ini segala sesuatu yang merintang perubahan harus "disingkirkan". Perubahan struktur organisasi juga perlu dilakukan jika memang keberadaannya mengganggu pencapaian misi. Agen-agen perubahan yang sudah "dikembang-biakkan" didorong untuk berani menanganis risiko dan memberi-

kan gagasan, dan aktivitas non-tradisional.

Keenam, merencanakan dan menyusun program jangka pendek (quick wins). Pada tahap ini, tim perubahan harus menyusun rencana peningkatan kinerja yang memungkinkan. Harus dipastikan rencana tersebut terlaksana, dan segera dilakukan perbaikan jika ada yang menyimpang dari visi. Tidak boleh dilupakan adalah selalu memperkenalkan perubahan kepada staf yang terlibat dalam program peningkatan kinerja, dan memberikan penghargaan kepada yang berhasil.

Ketujuh, mempertahankan kemajuan yang telah didapat dan menghasilkan keberhasilan bidang yang lainnya. Supaya perubahan yang telah menghasilkan perbaikan kinerja dapat dipertahankan maka perlu dilakukan pendekatan oleh sosok yang kredible untuk merubah sistem, struktur, dan kebijakan yang tidak sejalan dengan visi perubahan. Jika dibutuhkan, perlu merekrut pegawai, mempromosikan atau melatih pegawai yang bisa melaksanakan visi perubahan. Yang tidak boleh dilupakan adalah melakukan menguatkan proses perubahan dengan program baru, tema baru dan merubah agen-agen perubahan.

Kedelapan, Melembagakan program perubahan sebagai pendekatan baru. Jika program jangka pendek telah berhasil. Demikian juga duplikasi di bidang lainnya juga telah menunjukkan hasil. Langkah selanjutnya, adalah menjadikan cara tersebut sebagai pendekatan baru. Keberhasilan cara kerja baru ini harus dilembagakan dan harus dikaitkan dengan keberhasilan pengadilan. Untuk memastikan perubahan dapat dijaga kesinambungannya, maka harus dipastikan bahwa proses pembinaan kepemimpinan dan proses suksesi kepemimpinan harus berpihak kepada program-program perubahan. [an]



Sejak 30 Tahun Yang Lalu, FCA Sudah Tidak Menggunakan Buku Register

MELBOURNE | 05 OKTOBER 2014

Pengadilan Federal Australia sejak sepuluh tahun terakhir telah mengembangkan e-Court Services. Layanan pengadilan berbasis elektronik ini terdiri dari e-lodgment, e-Court File, dan e-Trial. Sedangkan jauh sebelumnya, kurang lebih 30 tahun yang lalu, untuk kepentingan pengelolaan perkara mereka memiliki aplikasi manajemen perkara yang disebut dengan Case Track. Sejak itulah Pengadilan Federal Australia sudah tidak lagi menggunakan buku register perkara.

Hal tersebut mengemuka dalam perbincangan dengan Lauren McCormick, Senior Legal Case Manager, seusai meninjau pelaksanaan

sistem e-court file di ruang kepaniteraan dan ruang sidang, Rabu lalu (1/10).

"Saya dan Daniel Caporale (Deputy Registrar, red) tidak pernah melihat pengadilan menggunakan buku register", ungkap Lauren menjawab pertanyaan pesetra Magang.

Menurut Lauren peran buku register untuk mencatat pergerakan berkas, dijalankan oleh sistem informasi manajemen perkara, "Case Track". Namun demikian, dalam setiap berkas ada lembaran yang berisi riwayat perjalanan perkara tersebut. Demikian juga hakim membuat catatan sendiri terkait dengan perkara-perkara yang ditanganinya.

Sejak Agustus 2014, FCA mulai menerapkan sistem e-Court File sehingga penanganan perkara di pengadilan sama sekali sudah tidak menggunakan kertas.

Bagaimana dengan sistem keamanan aplikasi dari serangan hacker?. Lauren menjelaskan bahwa untukantisipasi hal tersebut diberlakukan apa yang disebut dengan "Zona Demilitarisasi". Artinya selain keamanan sistemnya dibangun super maksimal, publik pun diberi pemahaman bahwa pengadilan adalah zona yang tidak boleh diganggu. Jika ada yang berusaha mengganggu, maka itu adalah perbuatan yang akan dihukum berat.

Melihat Tata Kelola Perkara di Ruang Hakim FCA



Melihat dari dekat tata kelola perkara oleh asisten dan sekretaris hakim agung di ruang hakim

MELBOURNE | 07 OKTOBER 2014

Hari ke-7 program magang, peserta Magang melakukan aktivitas on the spot ke ruang hakim. Tujuannya untuk melihat bagaimana sistem tata kelola berkas perkara di ruang hakim dan bagaimana peran asisten untuk mendukung tugas hakim di FCA. Sebelum melakukan kunjungan ke ruang hakim, dilakukan presentasi mengenai peran asisten hakim di kedua pengadilan. Presentasi dari MA disampaikan oleh Frensita Twinsani dan Sumartanto sedangkan dari FCA disampaikan oleh Andrea Jarrat, Direktur Pelayanan Pengadilan FCA.

Dalam presentasinya Andrea menyampaikan bahwa seorang hakim FCA didukung oleh lima unsur yaitu: eksekutif asisten, associate, registrar, legal case manager, dan registry support. Eksekutif asisten dan associate berada di ruang hakim sedangkan tiga yang lainnya berada di ruang kepaniteraan. Jika dipadankan dengan ruang hakim agung di Indonesia, eksekutif asisten ini adalah sekretaris atau staf yang bertanggung jawab mengelola administrasi berkas di ruang hakim agung. Sedangkan associate adalah asisten/panitera pengganti.

Associate (asisten) dijabat oleh seseorang yang berlatar belakang pendidikan hukum. Seseorang yang menduduki posisi associate berasal dari lulusan sarjana hukum terbaik atau pengacara junior setelah melalui proses seleksi yang ketat oleh hakim yang

bersangkutan. Berbeda dengan associate, eksekutif assistant (sekretaris) tidak perlu berlatar belakang pendidikan hukum, namun ia harus mengerti prosedur penanganan perkara di pengadilan dan menguasai keterampilan di bidang sekretaris. Biasanya yang duduk di eksekutif asisten ini adalah seseorang yang pernah menjadi sekretaris di firma hukum terkemuka di Australia.

Tugas pokok seorang associate antara lain: melakukan penelitian hukum dan memberikan dukungan administratif kepada hakim, membantu hakim selama proses persidangan termasuk persidangan antar negara bagian, mengelola pemberkasan dokumen yang terkait dengan doket hakim dan pengelolaan administrasinya. Meski jabatan associate ini biasanya hanya untuk 12 bulan, tetapi ini merupakan jabatan yang sangat bergengsi dan diidam-idamkan oleh para lulusan fakultas hukum di Australia.

Disebutkan dalam dokumen yang diterbitkan oleh FCA bahwa syarat-syarat untuk menjadi associate adalah sebagai berikut: sarjana hukum, memiliki kemampuan penelitian hukum yang berkualitas tinggi, memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan bagus, memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik dan keterampilan untuk bertindak sebagai penghubung dan memiliki keterampilan mengelola administrasi dan organisasi yang baik,

Sedangkan seorang eksekutif assistant dipersyaratkan memiliki pengetahuan/pengalaman sebagai berikut: memahami pemahaman yang cermat mengenai tatalaksana kamar hakim dan prosedur penanganan berkas perkara di pengadilan, memiliki kemampuan yang baik di bidang administrasi dan kesekretarian termasuk kemampuan membuat korespondensi, memiliki kemampuan mengoperasikan komputer seperti MS Word dan Excel, berkepribadian terpuji serta mampu berkomunikasi dengan baik, memahami prinsip penelitian hukum, mampu untuk bekerja sama dalam tim kecil.

Tata Kerja Sekretaris

Setelah melakukan presentasi dari masing-masing pengadilan, peserta magang langsung menuju ruang hakim Justice Bernard Murphy. Justice Murphy hanya dibantu oleh seorang sekretaris (executive assistance) yaitu Sarah Young dan seorang asisten (associate judge), Charles.

Sarah Young benar-benar berperan sebagai sekretaris profesional. Untuk memastikan tatakkerja tim pendukung Justice Murphy bekerja dengan efektif ia menyusun sebuah dokumen yang diberi nama petunjuk manual kamar Justice Murphy. Dokumen ini berisi tata kerja dan standar operasional prosedur semua aktifitas yang dilakukan dalam pengadministrasian berkas perkara. Bagaimana cara menerima berkas, menata berkas, mempersiapkan persidangan, membuat dokumentasi dokumen penetapan, menyusun jadwal, membuat laporan persidangan, menggunakan aplikasi manajemen perkara, menyusun template putusan, menyimpan surat masuk, cara berkorresponden bahkan bagaimana cara memesan tiket dan protokol jika hakim bersidang ke negara bagian lain di Australia telah ada petunjuk manualnya.

Charles yang baru beberapa minggu bekerja dengan Justice Murphy mengaku sangat terbantu dengan adanya buku manual tata kerja tersebut. Sarah memang sangat detail menjalankan fungsi sekretaris. Ia mengatur tata letak dokumen atau berkas mana yang harus segera dibaca oleh hakim, ia pun mempunyai tempat tersendiri untuk menyimpan surat-surat yang ditujukan kepada Justice Murphy. Surat kabar dan informasi lain ia tempatkan di tempat tersendiri, dan Justice Murphy sudah sangat mengerti dengan tata letak tersebut.

Untuk mengatur jadwal hakim dari mulai jadwal sidang, jadwal piket hakim (duty judge), cuti, seminar, dan kegiatan lain Justice Murphy, Sarah Young menggunakan Microsoft Outlook. Ia juga menggunakan MS Outlook untuk mengelola dokumen elektronik yang dikirim menggunakan e-mail.

Sarah juga melakukan koresponden dengan para pihak jika ada berkas atau dokumen yang kurang lengkap. Ia melakukan koresponden tersebut atas nama hakim. Dalam koresponden antara sekretaris dengan pihak atau kebalikannya, harus selalu ditembuskan kepada pihak lawan. Jika ada email tetapi pihak lawan tidak ditembuskan, maka Sarah akan segera memberitahunya kepada pihak lawan. Prinsip ini sangat dipegang teguh karena isu keberpihakan kepada salah seorang bisa mengancam putusan yang dijatuhkan dapat dibatalkan. Oleh karena itu, komunikasi pihak hanya boleh dengan sekretaris, tidak boleh langsung dengan hakim.

Tata Kerja Asisten

Ruang lingkup pekerjaan asisten (Associate Judge) berada di domain teknis penanganan perkara. Charles yang baru beberapa minggu dipilih oleh Justice Murphy menjelaskan bahwa ia harus melakukan penelitian berbagai aturan atau putusan yang terkait dengan perkara yang akan ditanganinya. Ia harus meneliti puluhan buku dan law report kemudian memberikan resume. Seorang asisten juga harus mempersiapkan ruang sidang seperti komputer hakim, sound sistem, sumber-sumber rujukan yang dibutuhkan. Ia pun yang bertugas memanggil para pihak untuk memasuki persidangan.



Update informasi penanganan perkara di Case Track dan menggunakan electronic court file adalah juga tugas asisten. Perkembangan penanganan perkara harus segera diupdate ke sistem Case Track di ruang sidang.

Berkas perkara hanya boleh disimpan di ruang asisten. Penyusunannya didasarkan pada proses penanganan perkara. Hakim hanya menggunakan foto copy berkas dalam memeriksa perkara, sehingga ia bisa mencoret dan memberikan catatan.

Asisten membantu menyusun dan mengoreksi putusan. Dalam mengoreksi putusan, ia menggunakan checklist yang berisi bagian-bagian penting yang harus dipastikan penulisannya dilakukan dengan benar. Checklist ini merupakan mekanisme Quality Control terhadap putusan. Jika penyusunan putusan telah selesai dilakukan, maka asisten harus membuat informasi singkat tentang putusan tersebut yang meliputi: kata kunci (klasifikasi, sub klasifikasi), putusan-putusan /yurisprudensi yang dikutip dalam putusan, peraturan perundangan

yang dikutip.

Dalam melakukan koreksi putusan, Charles dan juga asisten yang lain, menggunakan fasilitas Track Changes yang tersedia di Microsoft Word. Dengan fasilitas ini jejak perubahan selama proses penyusunan putusan dapat diketahui.

Tugas Panitera

Diatas disebutkan bahwa salah seorang dari lima unsur pendukung hakim adalah panitera. Di FCA seorang panitera terasosiasi dengan dua orang hakim. Panitera ini bertugas melakukan mediasi dan pertemuan terkait dengan manajemen perkara yang berhubungan dengan perkara yang ditangani oleh hakim sebelum dilaksanakannya persidangan. Panitera juga menjalankan fungsi sebagai delegated judge yang akan melakukan persidangan dan menerbitkan penetapan-penetapan. Berbeda dengan sistem di Indonesia, panitera tidak ikut bersidang. Peran panitera ini dilakukan oleh asisten (associate judge). [an]dengan sistem di Indonesia, panitera tidak ikut bersidang. Peran panitera ini dilakukan oleh asisten (associate judge). [an]



FEDERAL COURT
OF AUSTRALIA

Strategi Manajemen Perubahan Menuju Pengajuan Berkas Elektronik di Federal Court of Australia



MELBOURNE | 10 OKTOBER 2014

Federal Court of Australia telah membuat kebijakan untuk menerapkan pengajuan berkas perkara secara elektronik (e-court lodgment) sehingga kelak dapat menerapkan persidangan secara elektronik. Dengan demikian pelaksanaan peradilan dapat lebih efisien dan ramah lingkungan. Meskipun belum diterapkan pada seluruh perkara, saat ini telah dilaksanakan beberapa persidangan elektronik (e-trial) dalam ruang sidang elektronik, dimana semua pihak yang terlibat dalam persidangan akan menggunakan piranti elektronik dalam proses seperti pengajuan gugatan, jawab menjawab, pembuktian dan lain-lain. Dalam persidangan elektronik ini, jika diperlukan masing-masing pihak dan hakim dapat melihat berkas yang sedang dibahas dalam laptop atau komputer yang tersedia. Demikian juga semua proses direkam secara elektronik dan tersedia fasilitas sound system dan teleconference yang dapat mendukung proses persidangan.

Federal Court of Australia juga telah menerapkan E-court room yang meru-

pakakan ruang sidang virtual. E-courtroom digunakan untuk mengelola dan mengetahui beberapa hal sebelum dilakukan persidangan di Pengadilan Federal Australia atau Sirkuit Federal Court of Australia. E-court room digunakan misalnya ada satu pihak (ex parte) memerlukan salinan pengganti untuk permohonan pailit yang hilang juga untuk surat panggilan pemeriksaan secara online. E-court room terintegrasi dengan e-Lodgment, untuk menjamin transparansi maka dalam e-court room ada fasilitas transkrip memberikan catatan dari semua pesan yang diposting oleh Pejabat Yudisial dan para pihak dalam segala hal yang dilakukan melalui e-court room. Transkrip ini dapat dilihat oleh pihak serta masyarakat, namun dokumen yang diposting atau diajukan hanya dapat dilihat Petugas Yudisial. Ada protokol yang harus dipatuhi dalam e-court room, pada intinya proses dilakukan seolah-olah dalam ruang sidang nyata, berarti hakim yang mengendalikan. E-court room dirancang sebagai suatu cara yang efisien untuk berinteraksi dari waktu ke waktu tanpa perlu kehadiran fisik pengadilan.

Pengadilan Federal Negara Bagian Victoria di Melbourne (FCA Melbourne) adalah percontohan dalam penerapan E-court lodgment dan Kepaniteraan Negara Bagian Melbourne (Victoria Registry) ditugaskan untuk melakukan supervisi untuk menerapkannya dalam tingkat nasional.

Penerapan E-court lodgment saat ini baru berjalan sekitar 4 Minggu di Registry Victoria, proses tersebut dilaksanakan setelah melalui proses panjang persiapan dalam rangka perubahan manajemen dan pemberkasan secara elektronik. Mrs. Sia Lagos, Panitera Kepala di FCA Melbourne berpendapat bahwa perubahan sistem dari berkas cetak (kertas) ke berkas elektronik tidak dapat hanya sekedar dilakukan begitu saja, namun harus ada langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk menjamin keberhasilan dan ia memberikan presentasi yang sangat impresif mengenai 8 langkah yang dilalui dalam mentransformasikan sistem di kepaniteraan yang dipimpinnya yaitu melalui upaya:

1

Membangun rasa perlunya segera menerapkan (urgency)

Pertama harus ada kesadaran bahwa perubahan yang hendak dilakukan adalah sesuatu yang sangat diperlukan, bahwa selama ini ada masalah mengenai lambannya akses pada keadilan (access to justice) bagi masyarakat yang harus dihadapi, adanya kebutuhan akan modernisasi dan yang terpenting adalah adanya persaingan sehat dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu maka perlu segera dilakukan identifikasi terhadap masalah yang telah ada, masalah yang masih potensial dan kesempatan untuk melakukan perubahan.

2

Pembentukan Koalisi yang menjadi pemandu perubahan yang solid.

Saat Federal Court memutuskan perlunya memodernisasi Pengadilan melalui e-court lodgment, Chief of Justice menugaskan Sia Lagos membentuk kelompok yang memiliki perhatian tentang berbagai masalah di Pengadilan yang antara lain terdiri dari: ia sendiri sebagai Panitera Kepala Victoria Registry, Panitera senior (Senior Registrar) dan staff. Setelah koalisi itu terbentuk maka harus ada dorongan kepada para anggota group untuk bekerja sebagai satu tim.

3

Menciptakan visi.

Pembuatan visi yang jelas perlu dilakukan untuk membantu menghasilkan perubahan secara langsung, disamping membangun strategi-strategi untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu masing-masing anggota tim harus mengerti apa yang harus dilakukan dan mengapa harus dilakukan.

4

Mengkomunikasikan visi.

Merupakan hal yang sulit untuk bekerja sendiri dan hasil yang dicapai pun tidak akan maksimal. Kebanyakan orang tidak mau menjalankan pekerjaan yang tidak dimengerti apalagi jika ia tidak dilibatkan di dalamnya, karena itu saat memutuskan untuk melakukan perubahan, tim di Federal Court Australia mengajak para staf untuk terlibat dan ikut menjadi bagian dari perubahan itu dengan cara: membentuk beberapa kelompok kerja serta menggunakan segala macam cara yang mungkin dilakukan untuk menyampaikan visi dan strategi baru disamping juga mengajarkan perilaku baru dengan memberikan contoh. Tim juga perlu meninjau kembali peran masing-masing bagian, melakukan lokakarya bagi para staff sehingga dengan lokakarya itu tim mendapat umpan balik berupa masukan-masukan yang dibutuhkan tentang struktur dan peran-peran kepaniteraan. Tim juga menerbitkan berita secara rutin dan melakukan diskusi-diskusi dalam rapat tim.

5

Pemberdayaan pihak-pihak yang terlibat.

Langkah selanjutnya adalah memberdayakan pihak-pihak lain untuk ikut melaksanakan visi yang telah dibuat, membebaskan diri dari hambatan-hambatan perubahan, mengubah sistem atau struktur yang sangat menghambat visi dan mendorong keberanian untuk mengambil resiko, tidak hanya terikat dengan ide-ide, kegiatan dan tindakan tradisional. Untuk itu kepaniteraan FCA Melbourne menunjuk orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, misalnya jika terdapat hambatan kekurangan dana untuk melakukan perubahan tersebut maka harus ada orang yang ditugaskan untuk mencari jalan mengusahakan anggarannya. Dalam melakukan perubahan harus ada manajemen sumber daya manusia dengan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan untuk melaksanakan apa yang harus dan ingin dilakukannya.

6

Membuat sasaran Jangka Pendek.

Victoria Registry juga merencanakan dan membuat sasaran kerja jangka pendek, merencanakan visi peningkatan penampilan (performance) yang dapat dicapai, melaksanakan peningkatan tersebut dan memberikan penghargaan pada pegawai yang terlibat dalam peningkatan untuk memacu gairah kerjanya. Ada hal yang harus ditekankan yaitu dalam melakukan perubahan, terutama saat masa transisi tugas utama pelayanan terhadap pencari keadilan harus tetap berjalan dan tidak boleh dikesampingkan. Pengadilan Federal Kepaniteraan membentuk struktur dalam kepaniteraan yang antara dengan menunjuk petugas khusus sebagai koordinator untuk penggugat/pemohon (litigant) yang mewakili dirinya sendiri (unrepresented applicant). Perlu ada orang yang khusus menangani memberikan informasi tentang E-court lodgment ini agar informasi yang diberikan tidak kacau atau berbeda.

Adapun bantuan yang diberikan untuk memasukkan berkas secara elektronik tergantung dengan kebutuhan, misalnya ada perlakuan dan bantuan khusus untuk orang yang tidak punya akses penasehat khusus, tidak punya pengetahuan komputer, keterbatasan mental atau tidak punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup. Petugas yang dipilih adalah staf senior yang punya kepedulian untuk melaksanakan tugas ini, tentu saja dengan insentif jenjang karir dan promosi yang jelas. Untuk itu panitera kepala mengumumkan posisi dan kesempatan baru pada staf dengan kemungkinan karir tersebut, dan ternyata pendekatan tersebut menimbulkan ketertarikan karena para pegawai merasa mendapat tantangan dan motivasi. Yang terpenting dalam penerapan kebijakan adalah:

konsistensi dan kesamaan perlakuan terhadap semua pihak merupakan suatu keharusan. Kepaniteraan FDA telah merancang jalur yang berbeda bagi pihak yang ingin mengajukan berkas perkaranya, yaitu untuk litigant yang mewakili dirinya sendiri (unrepresented applicant) dan untuk litigant yang diwakili oleh penasehat hukum (represented applicant). Terhadap pihak yang pertama tersebut pengadilan akan memeriksa semua berkas yang diajukan apakah telah sesuai dengan ketentuan sedangkan pada kelompok kedua mereka bisa langsung memasukkan berkasnya. Meskipun demikian kapanpun Hakim menganggap berkas yang dimasukkan tidak sesuai dengan ketentuan ia dapat menolaknya.

7

Konsolidasi peningkatan dan terus menghasilkan perubahan.

Menggunakan peningkatan kredibilitas untuk merubah sistem, struktur dan kebijakan yang tidak sesuai dengan visi, mempekerjakan, mempromosikan dan membangun pegawai yang mampu menerapkan visi serta terus membuat penyegaran dengan proyek-proyek baru, tema dan pergantian pelaku perubahan. Pemimpin harus memberi keleluasaan berinovasi pada bawahan, tidak mengambil alih pekerjaan dan ikut memikul tanggung jawab pada bawahan yang berada dibawah tanggung jawabnya, hal ini akan menimbulkan rasa penghargaan bawahan pada atasan dan mendorong produktivitas.

8

Menggunakan pendekatan baru, harus diingat bahwa kerja di Pengadilan sangat penting karena putusan akan mempengaruhi hidup para pihak karena itu ada hubungan penting antara perilaku baru untuk memperbaiki sistem dengan modernisasi melalui E-court lodgment dengan keberhasilan lembaga sehingga harus ada motivasi dan kesadaran tinggi serta keberanian untuk mengadakan perubahan dan perbaikan. E-court lodgment akan mempertinggi efisiensi dan menekan biaya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah regenerasi kepemimpinan, untuk menjaminkelangsungan dan perbaikan lembaga.





OWEN DIXON
COMMONWEALTH
LAW COURTS BUILDING

*Unveiled by the Hon. Justice G. G. Allsop
on 14th April 2000*

HIGH COURT OF AUSTRALIA
FEDERAL COURT OF AUSTRALIA
FAMILY COURT OF AUSTRALIA
FEDERAL CIRCUIT COURT OF AUSTRALIA

Standar Penamaan Putusan dan Klasifikasi Perkara pada Pengadilan Federal Australia



BEBERAPA HAL YANG DIATUR STANDARISASINYA
DALAM GUPJ ini adalah

format putusan, pemberian nomor halaman dan nomor paragraf putusan, penamaan/identitas putusan, dan kata kunci/klasifikasi.

MELBOURNE | 15 OKTOBER 2014

Putusan bukan hanya milik pihak yang berperkara. Putusan adalah dokumen publik yang dapat menjadi rujukan berbagai kalangan seperti: akademisi, peneliti, pengacara, para hakim atau siapapun yang memiliki minat dengan persoalan hukum. Untuk itu diperlukan standar penamaan putusan (identifikasi) yang akan memudahkan pengutipan putusan. Agar putusan yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan, maka identifikasi putusan harus memuat nama pihak yang bersengketa, tahun registrasi, nomor perkara, dan kode pengadilan yang memutus. Struktur identitas putusan tersebut kemudian akan menjadi standar pengutipan dalam berbagai dokumen, seperti: karya tulis, gugatan, pertimbangan hukum, pemberitaan, dan lain-lain.

Australia memiliki standar penulisan putusan yang dimuat dalam dokumen *Guide to Uniform Production of Judgments (GUPJ)*. Dokumen ini diterbitkan oleh Australian Institute of Judicial Administration (AIJA). Pedoman ini mullanya untuk kebutuhan standarisasi publikasi putusan secara elektronik, namun kemudian juga diberlakukan publikasi manual. Semua pengadilan di Australia menjadikan pedoman ini sebagai rujukan dalam penyusunan putusan.

Beberapa hal yang diatur standari-

sasinya dalam GUPJ ini adalah format putusan, pemberian nomor halaman dan nomor paragraf putusan, penamaan/identitas putusan, dan kata kunci/klasifikasi.

Penamaan Putusan

Terkait dengan penamaan putusan, prinsip yang diusung GUPJ adalah suatu putusan dapat dibedakan dari putusan yang satu dengan putusan yang lainnya. Oleh karena itu penamaan suatu putusan harus memuat unsur: (nama para pihak yang bersengketa) [tahun publikasi putusan] (kode inisial pengadilan) (nomor urut putusan). Contoh penamaan putusan yang mengikuti pola tersebut adalah : *Smith v Jones [1998] HCA 99*. *Smith v Jones* adalah pihak yang berperkara, 1998 adalah tahun perkara tersebut diputus, HCA adalah kode inisial pengadilan untuk High Court of Australia dan 99 adalah nomor urut putusan tersebut di tahun 1998. Sistem di Australia nomor putusan berbeda dengan nomor perkara. Nomor putusan diberikan berdasarkan urutan putusan yang diselesaikan di tahun yang bersangkutan.

Struktur penamaan putusan tersebut selanjutnya menjadi standar pengutipan jika putusan tersebut menjadi rujukan. Jika yang dirujuk dalam suatu putusan pengadilan lebih spesifik pada paragraf tertentu, GUPJ telah menyusun standar pengutipan dengan struk-

tur sebagai berikut:

(The parties) [the year of the decision] (the Court abbreviation) (the sequential number of the judgment) [A pinpoint paragraph reference]

Contoh: *Smith v Jones [1998] HCA 99 at [17]*. Arti dari pengutipan putusan tersebut adalah: *Smith v Jones* adalah pihak yang berperkara, 1998 adalah tahun perkara tersebut diputus, HCA adalah kode inisial pengadilan untuk High Court of Australia, 99 adalah nomor urut putusan tersebut di tahun 1998 dan 17 adalah nomor paragraf.

GUPJ mengharuskan setiap putusan menggunakan nomor paragraf. Selain untuk memudahkan dalam merujuk putusan, penggunaan nomor paragraf dibutuhkan dalam publikasi putusan secara elektronik di website yang berbasis HTML (Hyper Teks Multi Language). Publikasi berbasis HTML tidak mengenal halaman, sehingga nomor paragraf inilah yang menjadi acuan. Demikian juga ketika putusan akan dipublikasikan di media cetak yang format dan ukurannya berbeda dengan salinan yang diterbitkan pengadilan seperti koran, majalah, buku, dan lain-lain maka nomor paragraf inilah yang menjamin otentikasi dokumen putusan ini. Oleh karena putusan menggunakan nomor paragraf maka di lembaran legalisasi redaksinya berbunyi sebagai berikut:



Associate:

Standar pengutipan putusan yang diatur dalam dokumen yang diterbitkan oleh AIJA tersebut diikuti pula oleh dunia akademis. Hal ini dapat dibaca dalam buku Australian Guide to Legal Citation yang diterbitkan oleh Melbourne University Law Review Association Inc. Dalam dokumen ini selain diatur standar pengutipan putusan pengadilan Australia, diatur juga standar pengutipan putusan pengadilan sejumlah negara, yaitu: Canada, China, Francis, German, Hong Kong, Malaysia, New Zaeland, Singapura, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika.

Cover Sheet Putusan

Pedoman Penyeragaman dalam Penerbitan Putusan (Guide to Uniform Production of Judgments [GUPJ]) yang dikeluarkan oleh AIJA mewajibkan setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, baik yang akan dipublikasikan di berbagai media atau disampaikan kepada para pihak, harus dilampiri dengan cover sheet yang dilekatkan di bagian depan putusan. Cover sheet ini berisi informasi singkat putusan, sehingga dengan membaca bagian ini kita akan mendapat gambaran umum tentang putusan tersebut. Cover sheet ini memuat data-data sebagai berikut: Nama Perkara /Kutipan Perkara, Para Pihak, Nama Pengadilan, Yurisdiksi, Nomor Perkara, Tanggal Putusan, diterbitkannya putusan, tang-

gal sidang, nama hakim, kata kunci, perkara-perkara yang dirujuk dalam putusan, perundang-undangan yang dirujuk dalam putusan, amar putusan, kategori putusan, kuasa hukum dan jumlah paragraf putusan.

Mahkamah Agung RI telah menerapkan model cover sheet putusan ini, namun terbatas pada publikasi elektronik di Direktori Putusan. Komponen informasi dalam cover sheet putusan ini juga belum selengkap seperti yang diatur dalam dokumen GUPJ.

Kata Kunci

Salah satu komponen penting dalam cover sheet putusan adalah informasi kata kunci putusan. Fungsi dari kata kunci ini adalah untuk memberikan sebuah informasi singkat tentang klasifikasi materi perkara yang ada dalam perkara yang bersangkutan. Selain itu dari sisi teknis, pencantuman kata kunci akan memudahkan dalam proses pencarian putusan yang dipublikasikan secara elektronik. Semakin presisi pencarian dengan kata kunci yang ditulis maka perkara yang dicari akan ditemukan dengan tepat.

Dalam dokumen GUPJ, dijelaskan bagaimana aturan penulisan kata kunci dalam cover sheet putusan. Berikut beberapa prinsip dalam penulisan kata kunci:

- Kata kunci disusun dari norma hukum ke fakta dan dari umum ke khusus. Kata kunci pertama haruslah merupakan judul dari topik norma hukum umum, seperti CRIMINAL LAW. Kata kunci kedua merupakan bagian dari topik tersebut, seperti : CRIMINAL LAW -- LIABILITY AND CAPACITY , CRIMINAL LAW -- PARTICULAR OFFENCES, CRIMINAL LAW – EVIDENCE
- Dari dua kata kunci pertama tersebut selanjutnya akan diikuti oleh kata kunci lain yang merupakan bagian lebih khusus dari materi perkara, seperti:
 - CRIMINAL LAW -- LIABILITY AND CAPACITY -- MENS REA -- STATUTORY OFFENCE -- LIABILITY OF EMPLOYER
 - CRIMINAL LAW -- PARTICULAR OFFENCES -- SEXUAL OFFENCES -- CORROBORATION OF
 - CRIMINAL LAW -- EVIDENCE -- CONFESSIONS AND ADMISSIONS -- DISCRETION TO EXCLUDE
- Kata kunci sedapat mungkin disusun dengan kalimat singkat dan tepat, atau dapat pula kata kunci menggunakan pertanyaan yang terkandung dalam perkara tersebut:
 - CRIMINAL LAW -- LIABILITY AND CAPACITY -- MENS REA -- STATUTORY OFFENCE -- LIABILITY OF EMPLOYER -- WHERE DELEGATION OF RESPONSIBILITY TO SERVANT -- DUTY TO PROTECT EMPLOYEES OF CONTRACTORS
 - CRIMINAL LAW -- PARTICULAR OFFENCES -- SEXUAL OFFENCES -- CORROBORATION OF -- DIRECTIONS TO A JURY ON -- JURY NO LONGER TO BE WARNED ON UNCORROBORATED EVIDENCE OF FEMALE COMPLAINANT

(asep nursobah)

Electronic Court File Solusi Tantangan Jaman Modern Pro Lingkungan



MELBOURNE | 21 OKTOBER 2014

Kemajuan jaman tak terelakkan, meningkat jumlah penduduk, meningkat pula aktifitas manusia sehingga kecenderungan sengketa para pihak yang berujung di Pengadilan pasti akan meningkat pula.

Tuntutan modernisasi Pengadilan dalam pelayanan yang cepat sehingga dapat segera diakses oleh pihak pencari keadilan menjadi sebuah langkah yang patut direalisasikan. Era sebelumnya yang mengandalkan sistem manual, pada gilirannya kini menimbulkan permasalahan baru, akibat banyaknya dokumen-dokumen dalam sistem Peradilan yang membutuhkan kertas dalam penuangan dokumennya.

Efek konsumsi kertas yang sedemikian banyaknya, tentu tidak sejalan dengan pencanangan program Go Green yang selalu dikumandangkan sebagai jargon perlindungan terhadap permasalahan lingkungan hidup.

Tehnologi telah menyediakan solusi, mengatasi beberapa persoalan penyelesaian perkara diatas. Tehnologi

komputerisasi diyakini pasti akan mempercepat proses penanganan suatu perkara, efektif dan efisien, tanpa mengulang hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Dari aspek pemanfaatan kertas, sudah pasti pula akan bisa dihemat, sehingga menghemat anggaran Negara sekaligus turut menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tentu saja system ini harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait secara bersinergi.

Dari Aspek modernisasi Pengadilan Indonesia menuju cetak biru Mahkamah Agung dalam mewujudkan Peradilan yang Agung, tentunya alih sistem menuju sistem baru yaitu Electronic Court File (Berkas Pengadilan Elektronik) patut disandingkan sebagai sistem penerimaan dan penyelesaian perkara menuju Peradilan Modern Indonesia. Demikian salah satu diskusi tentang pentingnya Electronic Court File (Berkas Pengadilan Elektronik) diterapkan di Peradilan Indonesia yang disampaikan para Peserta Magang dihadapan Justice Bennett maupun CEO/Registrar Federal Court Of Australia, Warwick Sodden baru-baru ini di Sydney.(sumartanto)

Electronic Court File Mengurangi Beban Koreksi Putusan Di Mahkamah Agung



Pembaharuan Mahkamah Agung melalui pedoman cetak biru, telah banyak melakukan upaya menuju arah yang dicita-citakan.

MELBOURNE | 21 OKTOBER 2014

Kemajuan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung patut diacungi jempol karena proses putus setiap perkara yang demikian cepat. Hal ini tentu saja harus diimbangi pula dengan proses minutasasi yang cepat pula. Apabila tidak maka percuma saja perkara diputus cepat. Pencari keadilan harus segera dapat menerima salinan putusannya.

Pembaharuan Mahkamah Agung melalui pedoman cetak biru, telah banyak melakukan upaya menuju arah yang dicita-citakan. Mewujudkan putusan yang cepat diterima oleh pihak pencari keadilan adalah bagian dari cita-cita itu sendiri. Bukan hal yang mustahil, teknologi elektronik telah tersedia, tinggal kemauan kita. Kemauan yang harus didukung oleh siapa saja yang terlibat dalam alur proses penyelesaian perkara itu.

Hal tersebut juga disampaikan Sia Lagos, Registrar Federal Court of Australia dalam paparannya ditengah-tengah diskusi dengan para magang program Internship Mahkamah Agung dengan Federal Court Australia. Sia mengatakan bahwa Electronic Court File nantinya juga mau diterapkan di seluruh Pengadilan di Australia.

Penyelesaian perkara melalui dokumen elektronik akan mengefektifkan proses pekerjaan.

Apabila pengiriman berkas elektronik ini telah berjalan, maka dokumen-dokumen yang telah disampaikan sebelumnya ditingkat I, tidak perlu diajukan lagi, ataupun kalau dokumen tersebut harus dimasukkan dalam putusan seperti gugatan, eksepsi, rekonsensi, kita tinggal copy paste sehingga tidak terlalu banyak kita mengoreksinya, karena apa yang kita ambil kembali tersebut berasal dari Pengadilan Banding atau Pengadilan Tingkat I yang sudah dikoreksi putusannya.

Koreksi dalil-dalil gugatan, eksepsi, rekonsensi, adalah pengulangan koreksi yang telah dilakukan sebelumnya di Peradilan Tingkat I atau Peradilan Tingkat Banding. Apabila dokumen telah dilakukan secara elektronik maka bagian putusan Mahkamah Agung yang merupakan pengulangan tersebut, tidak terlalu berat bagi Panitera Pegganti untuk mengoreksinya. Sehingga proses koreksi putusan di Mahkamah Agung dapat berjalan cepat. (sumartanto)